**PANDUAN**

**UJIAN KOMPREHENSIF**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

**2018**

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga penyusunan Panduan Ujian Komprehensif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Edisi 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan buku pedoman ini dimaksudkan untuk dapat memberikan arah dan rambu-rambu yang jelas dalam pelaksanaan ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Selain itu, buku pedoman ini diharapkan juga bisa memberikan penyamaan visi dan persepsi bagi setiap komponen yang terlibat dalam pelaksanaan ujian komprehensif ini, baik fakultas, jurusan, dosen penguji dan mahasiswa sehingga dapat bersinergi dan efektif demi tercapainya tujuan yang diharapkan dan menghasilkan hasil yang optimal.

Kehadiran buku ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman oleh mahasiswa untuk sedini mungkin dapat mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian komprehensif dikarenakan materi ujian ini terintegrasi dalam seluruh mata kuliah reguler ataupun praktikum kelas yang di dapatkan mulai dari semester awal sampai akhir.

Semoga bermafaat…

*Wassalam.*

Tulungagung. Desember 2018

Tim Penyusun

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 4

Penjelasan Umum 5

Tujuan 6

Persyaratan 7

Materi 7

Mekanisme Ujian 9

Penutup 11

Lampiran – lampiran 12

**PANDUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**IAIN TULUNGAGUNG**

1. **Penjelasan Umum**

Dalam rangka mengemban tugas perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Tridarma Perguruan Tinggi, dipandang perlu melakukan usaha-usaha sinergis guna pendukung terlaksananya proses pendidikan yang dapat menghasilkan *output* yang berdaya guna dan memiliki kompetensi yang jelas setelah menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Salah satu bagian penting agar bisa tercapainya tujuan Tridarma Perguruan Tinggi tersebut adalah proses monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyelenggaraan pendidikan itu sendiri sehingga diharapkan dapat menghasilkan out put dan out came yang ideal sesuai kebutuhan riil perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan penguasaan keagamaan sebagai ciri khas dari perguruan tinggi keagamaan,

Ujian komprehensif, disamping ujian-ujian lainnya, merupakan salah satu dari bentuk monev dalam mengukur dan mengevaluasi perjalanan mahasiswa selama menempuh perkuliahan serta untuk mengetahui indikator kesiapan mahasiswa sebelum masuk dunia kerja sesuai dengan disiplin keilmuannya sekaligus sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk dapat menyelesaikan program sarjana (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mahasiswa diwajibkan mengikuti dan harus lulus ujian komprehensif sebagai prasyarat untuk bisa mengikuti ujian skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan. Ujian komprehensif menuntut mahasiswa untuk mampu menguasai teoritik dan praktik ilmu yang didapat mahasiswa selama menempuh pendidikan di FEBI, yang terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu materi Institusi yang meliputui materi Keislaman, materi Kefakultasan berkaitan dengan penguasaan pengetahuan tentang ekonomi dan bisnis Islam, serta materi Jurusan/Program Studi, yang meliputi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah.

1. **Tujuan**

Maksud dan tujuan Ujian Komprehensif adalah:

1. Mengetahui tingkat penguasaan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kompetensi yang melekat pada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di IAIN Tulungagung.
2. Mengetahui sejauh mana tingkat kompetensi dan keahlian mahasiswa sesuai dengan spesifikasi jurusan/program studi masing-masing.
3. Sebagai persyaratan ujian skripsi
4. **Persyaratan**

Untuk bisa mengikuti ujian komprehensif, seluruh calon peserta diharuskan:

1. Lulus seluruh mata kuliah sebagaimana yang telah diatur dalam buku pedoman akademik dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah
2. Mendaftarkan diri kepada Panitia/Tim yang Ujian komprehensif yang dibentuk dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan:
3. Foto kopi Slip Regestrasi Mahasiswa Aktif
4. Transkip Nilai Sementara
5. Surat Pernyataan Cek Nilai
6. Foto Kopi Sertifikat KKN
7. Foto Kopi Sertifikat PPL
8. Foto Kopi Sertifikat TOEFL & TOAFL
9. **Materi**

Materi Ujian Komprehensif meliputi Materi Keislaman (Keinstitusian), Materi Ekonomi dan Bisnis Islam (Kefakultasan), dan materi Perbankan Syariah atau Ekonomi Syariah (Kejurusanan/Program Studi). Adapun materi secara rinci adalah sebagai berikut:

1. **Materi Keislaman (Keinstitusian):**
2. Membaca ayat al Quran
3. Menulis ayat al Quran
4. Hafalan ayat/surat al Quran
5. Teori dan praktik tajwid
6. Wudlu dan tayamum
7. Teori dan praktik salat wajib
8. Teori dan praktik salat sunnah
9. Teori dan praktik salat janazah
10. Doa-doa sholat sunnah
11. Zakat
12. Haji
13. Fiqh
14. Isu aktual keislaman
15. **Materi Ekonomi dan Bisnis Islam (Kefakultasan):**
16. Pengetahuan Ayat dan Ekonomi
17. Dasar-dasar Ekonomi Islam
18. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
19. Akad-akad syariah
20. Analisis mikro dan makro ekonomi Islam
21. Bisnis Syariah
22. Isu Aktual ekonomi dan bisnis Islam
23. **Materi Kejurusanan/Program Studi**
24. **Jurusan/Prodi Perbankan Syariah**

**Konsep dan Aplikasi Perbankan Syariah**

Meteri ini mencakup prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, identifikasi transaksi terlarang, penjelasan konsep riba, berbagai bentuk akad transaksi syariah dan implementasinya pada bank syariah, mengenali produk –produk bank syariah dari sisi penghimpunan dan penyaluran serta produk jasa, teknik penghitungan bagi hasil dan penetapan margin.

**Uraian Materi**

* + - 1. Ikhtisar Perbankan Syariah dan Produknya.
  1. Konsep dasar perbankan dari perspektif Islam
  2. Perbandingan perbankan konvensional dan syariah
  3. Sejarah dan jenis-jenis perbankan syariah di Indonesia
     + 1. Jenis-jenis Transaksi yang dilarang

Tiga klasifikasi transaksi dilarang

* + - 1. Teori Pertukaran dan Ventura

1. Pertukaran dan kontrak
2. Obyek dan waktu masing-masing
3. Perbedaan antara pertukaran dan usaha
   * + 1. Kontrak di Bank Syariah
4. Perbedaan antara Akad dan Wa'ad
5. Jenis kontrak Tabaru dan Tijarah
6. Qard, Wadiah, Wakalah, Rahn, Hibaha dan Wakaf
7. Murabahah, Ijarah, Musyarakah dan Mudarabah
   * + 1. Ikhtisar Produk & Jasa
   1. Prinsip produk pendanaan
   2. Prinsip produk jasa
   3. Prinsip produk pembiayaan
   4. Perbedaan antara konseppendanaan, jasa, dan pembiayaan dalam perbankan syariah dan dan perbankan konvensional.
   5. Produk yang sering digunakan di Bank Syariah
      * 1. Produk Pendanaan
   6. Jenis produk pendanaan dan karakteristiknya
   7. Perbedaan jenis produk pendanaan
   8. Contoh jenis-jenis produk pendanaan
   9. Aplikasi produk pendanaan di Lembaga Keuangan Syariah
      * 1. Murabahah
8. Mekanisme pembiayaan Murabahah
9. karakteristik produk murabahah
10. Aplikasi pembiayaan murabahah yang benar
11. Teknik perhitungan angsuran, jangka waktu pinjaman
12. Identifikasi praktik pembiayaan murabahah yang benar dan yang salah
    * + 1. Produk Pembiayaan Istihsna & Salam
13. Memahami mekanisme produk pembiayaan Istishna & Salam
14. Mengidentifikasi aplikasi yang benar dari produk pembiayaan Istishna & Salam
    * + 1. Ijarah dan IMBT
15. Mekanisme dan jenis Ijarah
16. Mengidentifikasi aplikasi yang benar dan tantangan pada produk Ijarah dan IMBT
    * + 1. Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah
        2. Mekanisme pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah
        3. Jenis-jenis Mudharabah
        4. Perbedaan antara pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah
        5. Teknik perhitungan bagi hasil
        6. Produk dan Jasa Keuangan Lainnya
17. Mekanisme produk pembiayaan lainnya, seperti: Qardh, Qardul Hasan, dan Rahn
18. Jenis layanan perbankan syariah
19. Karakteristik produk dan aplikasi
20. Mengidentifikasi produk dan jasa yang sesuai untuk Lembaga Keuangan Syariah
    * + 1. Harga Pembiayaan Produk
21. Komponen preferensi profit margin
22. Menetapkan harga terbaik untuk - margin, dan nisbah / porsi
23. Kesalahan umum dalam LKS
    * + 1. Pendapatan dan Bagi Hasil Untuk Pendanaan
24. Mekanisme distribusi pendapatan antara Bank dan nasabah
25. Perbedaan antara prinsip-prinsip dan bagi hasil
26. Perbedaan metode perhitungan dalam alokasi pendapatan, distribusi pendapatan, dan pendapatan bersama bagi nasabah di berbagai negara
    * + 1. Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia
27. Mendata dan menjelaskan produk-produk perbankan syariah yang sering digunakan
28. Peraturan tentang perbankan Syariah di Indonesia
29. Mendiskusikan tantangan LKS di Indonesia
30. Penerapan prinsip-prinsip perbankan syariah di Indonesia
31. **Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah**

**Konsep dan Aplikasi Ekonomi Islam**

Materi ujian ini berisi dasar-dasar, metode, filosofis dan pengembangan teori Ekonomi Islam dalam kerangka mikro dan makro serta implementasinya pada tataran praktis.

Tujuan dari materi ujian ini adalah:

1. Memahami secara komprehensif nilai-nilai dasar, filosofis, metode, ruang lingkup dan sejarah pembentukan teori ekonomi Islam
2. Membandingkan dan menganalisis secara teoritis ekonomi Islam dengan Konvensional
3. Menganalisis konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam
4. Memahami Konsep Maslahat dan implementasinya pada prilaku konsumsi Islam
5. Memahami konsep pelarangan riba, mengenali dasar-dasar berbagai transaksi secara syariah, menghitung bagi hasil & margin.
6. Memahami penerapan transaksi syariah pada berbagai lembaga-lembaga keuangan syariah
7. Memahami konsep & pengembangan keuangan public dalam ekonomi Islam
8. Memahami konsep & pengembangan sistem moneter dalam ekonomi Islam

**Uraian Materi**

1. Konsepi Dasar Ekonomi Islam
2. Definisi Ekonomi Islam
3. Dasar-dasar Ekonomi Islam
4. Nilai-nilai Ekonomi Islam
5. Metodologi Ekonomi Islam
6. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
7. Perbandingan Sistem Ekonomi Islam, Kapitalis dan Sosialis
8. Konsep Kekayaan & Kepemilikan dalam Islam
9. Konsep Kekayaan dalam Islam
10. Konsep Kepemilikan dalam Islam
11. Konsep Kerja dalam Islam
12. Perbedaan konsep kekayaan dalam sistem ekonomi islam dan konvensional
13. Konsep Perilaku Konsumen & Maslahah dalam Islam
14. Etika Konsumsi dalam Islam
15. Perilaku Konsumsi Islam
16. Konsep Maslahah
17. Konsep Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Lainnya
18. Konsep Perbankan Syariah
19. Konsep BMT / Koperasi Syariah
20. Konsep Asuransi Islam
21. Konsep Pegadaian Syariah
22. Konsep Sukuk & Investasi Syariah Lainnya
23. Konsep Riba dan Transaksi Syariah
24. Sumber Hukum dan Penjelasan tentang Riba
25. Identifikasi Transaksi yang dilarang
26. Model-model akad Transaksi syariah
27. Konsep Profit Distribusi dan Margin
28. Konsep Bagi Hasil
29. Profit Sharing vs Suku Bunga
30. Perhitungan Profit Distribusi dan Margin
31. Studi Kasus
32. Manajemen Keuangan Syariah
33. Sumber pendapatan
34. Pengeluaran
35. Stabilisasi
36. Zakat dan Distribusi Pendapatan
37. Sistem Moneter Islam
38. Konsep Uang dalam Islam
39. Permintaan Uang dalam Islam
40. Kebijakan Moneter Islam
41. Penerapan Instrumen Moneter Islam di Beberapa Negara Muslim
42. **Mekanisme ujian**

Mekanisme ujian komprehensif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran di FEBI sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
2. Tim/Panitia Ujian Komprehensif melakukan validasi persyaratan yang telah diajukan oleh mahasiswa
3. Tim/Panitia Ujian Komprehensif berkoordinasi para Kajur dan Wakil Dekan Bidang Akademik untuk menetapkan Dosen Penguji Komprehensif, meliputi tiga materi: Keinstitusian, Kefakultasan, dan Kejurusanan/ Program Studi yang akan ditindaklanjuti dengan penetapan jadwal ujian komprehensif.
4. Tim/Panitia Ujian Komprehensif membuat dan memberikan Surat Tugas dan jadwal beserta lampiran nama-nama peserta ujian komprehensif kepada masing-masing dosen penguji
5. Mahasiswa mengambil kartu kendali yang sudah disiapkan oleh Tim/Panitia Ujian Komprehensif di fakultas dan menghadap kepada penguji materi komprehensif masing-masing untuk melaksanakan ujian materi komprehensif.
6. Jika terdapat salah satu atau lebih materi ujian komprehensif yang tidak lulus, mahasiswa harus melakukan ujian ulang komprehensif sesuai dengan kesepakatan waktu dengan dosen penguji materi komprehensif tersebut.
7. Setelah mahasiswa dinyatakan lulus semua materi ujian komprehensif, maka kartu kendali ujian komprehensif diserahkan kepada Tim/Panitia Ujian Komprehensif.
8. Nilai ujian komprehensif diumumkan kepada mahasiswa di papan pengumuman dan mahasiswa peserta ujian komprehensif yang telah dinyatakan lulus diberikan surat keterangan Lulus Ujian Komprehensif.
9. **Penutup**

Demikianlah pedoman pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semoga dapat menjadi panduan bagi semua pihak yang berkepentingan.

**Lampiran**

**KEMENTERIAN AGAMA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656

Tulungagung – Jawa Timur 66221

**FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Nama : ...............................................................................

TTL : ...............................................................................

NIM : ................................................................................

Program Studi : ................................................................................

Jumlah sks yang diperoleh : .................................(.............) sks

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran Ujian Komprehensif pada:

semester : Ganjil/Genap\*)

Tahun Akademik : 20\_\_\_/20\_\_\_.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Foto Kopi Slip Regestrasi Mahasiswa Aktif
2. Foto Kopi Sertifikat KKN
3. Foto Kopi Sertifikat TOEFL & TOAFL
4. Ceklist Nilai Hasil Belajar yang disetujui/ditandatangani oleh Wali Studi dan/atau Kajur

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui,  Wali Studi  ...................................................  NIP. | Tulungagung, 20\_\_\_  Mahasiswa  .............................................  NIM |

**Lampiran**

**Kartu Kendali Ujian Komprehensif**

**MATERI KEISLAMAN**

Nama Mahasiswa :

NIM :

Dosen Penguji :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Materi | Ujian ke | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | |
| Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang | Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang | Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang |
|  | Membaca ayat Al Quran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menulis Ayat Al Quran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hafalan ayat/surat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teori dan praktik Tajwid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wudlu dan tayamum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teori dan praktik salat wajib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teori dan praktik salat sunat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teori dan praktik salat janazah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doa-doa (tentang salat dll) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Haji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiqh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isu aktual keislaman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Lampiran**

**Kartu Kendali Ujian Komprehensif**

**MATERI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Nama Mahasiswa :

NIM :

Dosen Penguji :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Materi | Ujian ke | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | |
| Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang | Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang | Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang |
|  | Pengetahuan tentang Ayat Ekonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengetahuan tentang Hadits Ekonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dasar-Dasar Ekonomi Islam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiqh Muamalah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiqh Muamalah Kontemporer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonomi Mikro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonomi Makro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonomi Mikro Islam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonomi Makro Islam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bisnis Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonomi Moneter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isu aktual ekonomi dan bisnis Islam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Lampiran**

**Kartu Kendali Ujian Komprehensif**

**MATERI PERBANKAN SYARIAH**

Nama mahasiwa :

NIM :

Dosen Penguji :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Materi | Ujian ke | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | |
| Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang | Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang | Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang |
|  | Ikhtisar Perbankan Syariah dan Produknya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jenis-jenis Transaksi yang dilarang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teori Pertukaran dan Ventura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrak di Bank Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ikhtisar Produk & Jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produk Pendanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murabahah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produk Pembiayaan Istihsna & Salam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ijarah dan IMBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produk dan Jasa Keuangan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Harga Pembiayaan Produk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pendapatan dan Bagi Hasil Untuk Pendanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isu aktual perbankan syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Lampiran**

**Kartu Kendali Ujian Komprehensif**

**MATERI EKONOMI SYARIAH**

Nama Mahasiswa :

NIM :

Dosen Penguji :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Materi | Ujian ke | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | |
| Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang | Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang | Tgl | Ttd Penguji | Lulus/ Ulang |
|  | Konsepi Dasar Ekonomi Islam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konsep Kekayaan & Kepemilikan dalam Islam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konsep Perilaku Konsumen & Maslahah dalam Islam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konsep Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konsep Riba dan Transaksi Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konsep Profit Distribusi dan Margin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manajemen Keuangan Syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem Moneter Islam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isu aktual dalam ekonomi syariah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**LAMPIRAN**

**MATERI KEISLAMAN**

**تَجْوِيْدٌ**

**(HUKUM TAJWID)**

1. **PENGERTIAN**  
   **Ilmu Tajwid**

Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.

**Tajwid**

Tajwid adalah tata cara (pengaturan) membaca Al-Qur’an beserta hukum-hukumnya dengan menggunakan 28 huruf hijaiyyah.

1. **MACAM-MACAM HUKUM TAJWID**
2. **Hukum Nun Mati (نْ   ) atau Tanwin (**ٌٍ   ً **)**
3. Idzhar

Idzhar artinya jelas.

Hurufnya ada 6, yaitu :   غ خ ح ع ﻫ أ

Idzhar adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya, maka dibacanya harus jelan nunnya.

Contohnya :

منْ أمن  , خيرٌ حسنا  , منْ خلق

1. Idgham ( إ دغام )

Idgham artinya memasukkan (huruf yang depan kepada huruf yang belakang).

Hurufnya ada 6, yaitu :يرملون  (ي رم ل و ن)

Idgham terbagi menjadi 2, yaitu :

*Idgham Bigunnah (إ دغام  بغنّة)*

Artinya : dengan dengung (menahan huruf yang masuk sebanyak 2 harkat)

Hurufnya ada 4, yaitu :(يمنو)    ي م ن و

Idgham bigunnah adalah apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya, maka dibacanya harus berdengung.

Contohnya :

من يعمل  , من نبيّن  , خيرٌمن

*Idgham Bilagunnah (إ دغام   ﺑﻼغنّة )*

Artinya : tidak dengan dengung.

Hurufnya ada 2, yaitu :         ر ل

Idgham bilagunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya, maka dibacanya tidak berdengung.

Contohnya :

غفورٌرحيم ,  خيرٌ ﻟﻪ , من رﺒﻬﻢ

Di dalam Al-Qur’an ada beberapa kata yang tidak dibaca idgham, tetapi dibaca idzhar, seperti :

ﺻﻨﻮﺍن ,  ﺒﻨﻴﺎﻦ  ,  ﺍﻠدﻨﻴﺎﺀ

Walaupun nun mati bertemu dengan huruf idgham, tetapi dalam satu kata, maka harus dibaca idzhar.

1. Ikhfa ( ﺇ ﺧﻑﺎﺀٌََََِِ

Ikhfa artinya samar-samar. (seperti bunyi ng dalam bahasa Indonesia).

Hurufnya ada 15, yaitu :

ك ق ف ظ ط ض ص ش س ز ذ د ج ث ت

Ikhfa adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya, maka dibacanya samar-samar.

Ikhfa terbagi menjadi 3, yaitu :

–         Ikhfa Ab’ad (أبعد )

Ab’ad artinya : jauh (yaitu jauh dari bunyi nun mati atau tanwin, disebut juga dengan sangat samar).

Hurufnya ada 2, yaitu :         ق ك

Contohnya :

إن کنتم  , شئ ٍقدير

–        Ikhfa Autsat (أوثت)

Autsat artinya : dekat (yaitu dekat dengan bunyi nun mati atau tanwin, samar saja)

Hurufnya ada 3, yaitu :         ت د ط

Contohnya :

إن طلق  , من دونى  , کنتم

–        Ikhfa Aqrobaa ((قربا)

Aqrobaa artinya : sedang (yaitu boleh sangat samar atau samar saja)

Hurufnya ada 10, yaitu :

ف ظ ض ص ش س ز ذ ج ث

Contohnya :

ﺍﻷﻨﺛﻰ ,  ﺻﻔﺎﺻﻔﺎ , ﻤﻦﺬﻠﻚ

1. Iqlab (  إ قلبٌ  )

Iqlab artinya mengganti (mengganti huruf nun ke huruf mim).

Hurufnya ada 1, yaitu :   ب

Iqlab adalah apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf Ba’, maka dibacanya balem.

Contohnya :

من بعد  , ﺍﻷﻨﺒﻴﺂﺀ

1. **Hukum Qolqolah ( ﻘﻠﻘﻠﺔ  )**

Qolqolah artinya : kerongkongan (huruf hijaiyyah yang mati, diceklokkan).

Hurufnya ada 5, yaitu :         ق ط د ج ب

Qolqolah dibagi menjadi 2, yaitu :

*Qolqolah Sughra ( سغرى  )*

Sughra artinya : ringan (kecil).

Qolqolah Sughra adalah apabila ada salah satu huruf qolqolah mati karena sukun, maka dibacanya diceklokkan.

Contohnya :

لقدْ , حبْل , طلق ,  أطْعمهم ,  أجْر

*Qolqolah Kubra ( قبرﻯ  )*

Kubra artinya : dahsyat (besar).

Qolqolah Kubra adalah apabila ada salah satu huruf qolqolah mati di akhir kalimat (karena waqof), maka dibacanya diceklokkan.

Contohnya :

۝ ماخلقَ  , من مسد ۝

1. **Hukum Mim Mati (  مْ  )**

Hukum mim mati dibagi menjadadi 3, yaitu :

1. Idgham Mimi ( ميمى )

Mutajanisain artinya : yang sejenis

Hurufnya ada 1, yaitu :   م

Idgham Mimi adalah apabila ada mim mati bertemu dengan mim hidup, maka dibacanya harus berdengung.

Contohnya :

عليهم مؤسدة

1. Ikhfa Safawi  (ﺷﻓﻮﻯ  ﺇ ﺧﻑﺎﺀ  )

Hurufnya ada 1, yaitu :   ب

Ikhfa Safawi adalah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf  ba’ hidup, maka dibacanya harus berdengung.

Contohnya :

ترميهم بحخارة

1. Idzhar Safawi

Hurufnya yaitu semua huruf hijaiyyah kecuali mim dan ba’.

Idzhar Safawi adalah apabila ada huruf mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyyah selain mim dan ba’, maka dibacanya tidak berdengung.

Contohnya :

هم فيها  , ألم تر

Dan lain sebagainya……

1. **Hukum Mad (  مَدٌ  )**

Mad artinya : memanjangkan bacaan, dengan menggunakan harakat.

Rumusnya :

1 alif = 2 harkat, 2 alif = 4 harkat, 2 ½ = 5 harkat, 3 alif = 6 harkat.

Harkat = bunyi ketukan.

Hukum Mad terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Mad Ashli ( ﺃﺻﻠﻰ   )

Ashli artinya : asal (asal muasal, asal mula kejadian)

Terbagi menjadi 1, yaitu :

– Mad Thobi’i ( ﻃﺒﻴﻌﻰ )

Hurufnya ada tiga, yaitu :            وْ -ُ , يْ ِ- ,ا -َ

1. Alif mati sesudah fathah
2. Ya’ mati sesudah kasroh
3. Wau mati sesudah domah

Panjangnya : 1 alif = 2 harkat.

Cara bacanya dipanjangkan, satu alif atau dua harkat.

Contohnya :       ﻨُوْﺤِﻴْﻬَﺎ

1. Mad Far’i (  ﻓﺮﻋﻰ   )

Far’i artinya : bagian atau cabang

Terbagi menjadi beberapa yaitu :

1. Mad Wajib Muttashil (ﻤﺗﺻلٌ واﺠبٌ  )

Wajib artinya : harus, Muttashil artinya : dalam satu kata.

Mad Wajib Muttashil adalah apabila ada huruf mad  bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka harus panjang 5 (lima) harkat.

Contohnya :

إذاجآء , سوء

1. Mad Jaiz Munfashil ( ﺠاﺌﺯ ﻤﻨﻓﺻل )

Jaiz artinya : boleh, Munfashil artinya : di luar kata.

Mad Jaiz Munfashil adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di lain (luar) kata, maka dibaca panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harkat.

Contohnya :

مآ أنزل  , يأيّها

1. Mad Lain ( ﻠﻴﻥ  )

Lain artinya : lemas.

Hurufnya ada 2, yaitu :         وْ -َ  , يْ ِ-َ

a.       Ya’ mati setelah fathah

b.       Wau mati setelah fathah

Cara bacanya dipanjangkan 2 harkat tapi lemas.

Jika di akhir kalimat, maka dibacanya boleh 2, 4 atau 6 harkat.

Contohnya :

عليهم  , يوم

1. Mad ‘Arid Lissukun ( ﻋاﺮﺾ ﻠﻠسّکوﻥ  )

‘Arid artinya : barulah, Lissukun artinya : di matikan.

Mad ‘Arid Lissukun adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyyah hidup pada akhir kalimat, maka cara bacanya dipanjangkan terlebih dahulu baru dimatikan.

Contohnya :

نستعين ۝, عزيزحکيم ۝

1. Mad ‘Iwad ( عوادٌ )

‘Iwad artinya : membuang tanwin.

Mad ‘Iwad adalah apabila ada fathah tain ( -ً ) bertemu dengan huruf alif atau ya’ mati di akhir kalimat, maka cara bacanya dipanjangkan 2 harkat.

Contohnya :

عليماحکيما۝, ﺛﻼﺛﺎ ﺛﻼ ﺛﺎ۝

1. Mad Badal ( بدلٌ )

Badal artinya : berdiri sendiri (sebagai pengganti huruf alif mati).

Mad Badal adalah apabila ada huruf hamzah ( أ ) bertemu huruf alif mati setelah fathah atau ya’ mati setelah kasroh, maka dibacanya panjang 2 harkat.

Contohnya :

أمنو , إيمان

1. Mad Shilah Thowwilah ( ﺻﻠﺔ ﻄﻮﻴﻠﺔ )

Mad Shilah Thowwilah adalah apabila ada huruf ha marbithoh ( ﻩ / ﻪ ) bertanda mad dan bertemu huruf hamzah, maka dibacanya boleh panjang 2, 4 atau 6 harkat.

Contohnya :

له مغفرة , به

Apabila berada di akhir kalimat, maka harus sukun (mati).

Contoh :

 غيرلّه ۚ

1. Mad Shilah Qoshirah ( ﺻﻠﺔ قصيرﺓ )

Mad Shilah Thowwilah adalah apabila ada huruf ha marbithoh (ﻩ / ﻪ  ) bertanda mad, maka dibacanya panjang 2 harkat.

Contohnya :

وله أجر

Apabila berada di akhir kalimat, maka harus sukun (mati).

Contoh :  (sama seperti Mad Shilah Thowilah)

1. Mad Lazim Kilmi Musaqol ( ﻻﺯﻢِمثقل ٌکلم )

Mad Lazim Kilmi Musaqol adalah apabila ada huruf mad bertanda ( ﺁ ) bertemu dengan huruf hijaiyyah bersiddah, maka dibacanya panjang 6 harkat.

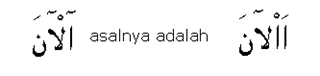
Contohnya :

ﻮﻻﺍﻠﺿﺂ لّين

1. Mad Lazim Kilmi Mukhaffaf (ﻻﺯﻢ کلم مخفف)

Mad Lazim Kilmi Mukhaffaf adalah apabila ada huruf mad bertanda ( ﺁ ) bertemu dengan huruf hijaiyyah disukun, maka dibacanya panjang 6 harkat.

Contohnya :



1. Mad Lazim Harfi Mushba (ﻻﺯمْﺤﺮﻒِﻣشبعٌ  )

Mad Lazim Harfi Mushba adalah apabila ada huruf hijaiyyah bertanda mad di awal surah dengan bunyi harkat, maka panjangnya 2 harkat.

Contohnya :

ﻃﻪ  ,  ﻴﺲ

1. Mad Lazim Harfi Musaqol (ﻻﺯمْﺤﺮﻒِمسقل )

Mad Lazim Harfi Musaqal adalah apabila ada huruf hijaiyyah bertanda mad di awal surah dengan bunyi hurufnya penuh, maka panjangnya 6 harkat.

Contohnya :

ن , ق , المٌ , کهيعص

1. Mad Tamkin ( ﺘﻣکﻴﻥ )

Mad Tamyin adalah apabila ya mati ( يْ  ) setelah ya kasrah ( يِِ  ), maka dibacanya panjang 2 harkat.

Contohnya : يحييکم

1. Mad Farq ( فرق  )

Mad Farq adalah apabila ada tanda mad pada huruf alif (ﺁ ) bertemu dengan lafadz Jalalaih, maka dibacanya panjang 6 harkat.

Contohnya : آﷲ

1. **Hukum Lafadz Jalalaih (** اﷲ **)**

Terbagi menjadi 2, yaitu :

*Tafkhim ( تفخم  )*

Tafkhim artinya : tebal.

Tafkhim adalah apabila ada lafadz Jalalih sebelum tanda fathah dan atau tanda domah, maka dibacanya harus tebal.

Contohnya :

رسول اﷲ , سقف اﷲ

*Tarqiq ( ترقيق  )*

Tarqiq artinya : tipis.

Tarqiq adalah apabila ada lafadz Jalalih sebelum tanda kasrah, maka dibacanya tipis.

Contohnya :

في سبيل ﷲ

1. **Hukum Alif Lam (   ال  )**

Terbagi menjadi 2, yaitu :

*Alif Lam Qomariyyah ( القمرﻴﺔ  )*

Al-Qomriyyah artinya : Bulan.

Hurufnya :

أ ب ج ح خ ذ ز ع غ ف ق ك م و ي

Alif Lam Qomariyyah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu hurufnya, maka dibacanya jelas.

Diibratkan apabila kita melihat bulan di malam hari, maka akan terlihat jelas.

Contohnya :

من المؤمنين  ,  مع القاعدين

*Alif Lam Syamsiyyah ( اﻠﺸﻣﺴﻴﺔ  )*

Asy-Syamsiyyah artinya : Matahari.

Hurufnya :

ت ث د ر س ش ص ض ط ظ ل ن

Alif Lam Syamsiyyah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu hurufnya, maka alif lam nya tidak terbaca.

Diibratkan apabila kita melihat matahari di siang hari, maka tidak akan terlihat jelas.

Contohnya :

من الدّنيا , والشّمس

1. **Hukum Gunnah Masydidah ( ﻏﻨﺔ ﻤﺸﺪﺩﻩ  )**

Gunnah Masydidah artinya : ditahan lama karena tasydid.

Hurufnya ada 2, yaitu :         مّ , نّ

Apabila terdapat nun siddah dan atau mim siddah sebelum huruf hijaiyyah berharkat, maka dibacanya bergunnah (ditahan sepanjang 3 harkat).

Contohnya :

ثمّ  , إنّ

1. **Hukum Idgham (  إدغامٌ  )**

Terbagi menjadi 3, yaitu :

*Idgham Muttamatsilain ( ﻤﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ  )*

Muttamasilain artinya : yang sama.

Idgham Muttamatsilain adalah apabila ada huruf hiajiyyah bertemu dengan huruf hiajiyyah yang sama, maka dimasukkan hurufnya yang di depan.

Contohnya :

إذهب بكتابى , وقد دخلوا , إذ ذهب

*Idgham Muttajanisain ( ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﻴﻦ  )*

Muttajanisain artinya : yang sejenis.

Idgham Muttajanisain adalah apabila ada huruf hiajiyyah bertemu dengan huruf hiajiyyah yang sejenis, maka dimasukkan hurufnya yang di depan.

Contohnya :

أرد تم , ودت طاﺋفة , ﺇذ ظلموا

*Idgham Muttaqoribain ( ﻤﺘﻘﺎﺮﺒﻴﻦ  )*

Muttaqoribain artinya : yang mendekati (bacaannya).

Idgham Muttaqoribain adalah apabila ada huruf hiajiyyah bertemu dengan huruf hiajiyyah yang mendekati bacaannya, maka dimasukkan hurufnya yang di depan.

Contohnya :

إركب معنا , يلهث ذلك , نحلقكم

1. **Hukum Ra’ (  ر  )**

Terbagi menjadi 2, yaitu :

*Mufakham ( مفخّم  )*

Mufakham artinya yang ditebalkan.

Bagiannya adalah :

–     ربنا

–     گفروا

–     أرسل

–     قرآن

–     طيرا

–     خير

*Muraqqaq ( مرقّق )*

Muraqqaq artinya : yang ditipiskan.

Bagiannya adalah :

–     واقربب

–     فرعون

–     خسر

1. **Penting**

Dalam Kitab suci Al-Qur’an, ada beberapa tanda baca juga yang harus diperhatika, diantaranya:

1. **Hukum Nun Washal (**نِ**)**

Washal artinya : penghubung.

Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka tanwin tersebut dibaca harkat dan diakhiri nun washal.

Contohnya :

خير الوصيّة , جزاء الحسنى

عاداالأولى , لهوا انفضّوا

1. **Shafar (** صفر **)**

Terbagi menjadi 2, yaitu :

*Shafar Mustadir ( صفر مستدر )*

Shafar Mustadir adalah apabila ada huruf mad yang tidak dibaca panjang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata.

Contohnya :

لايايئس \ لاتايئس , لشايء , وملا ئه

*Shafar Mustathir ( صفر مستطيل )*

Shafar Mustadir adalah apabila ada huruf mad yang tidak dibaca panjang, dan berada di akhir kata.

Contohnya :

   انا , لكنّا , قواريرا , الظنو نا , سلا سلا

1. ص **(Shad)**

–          Harus dibaca Sin

Apabila huruf shad bertanda domah atau bertanda sukun.

Contohnya :      ويبصط , بصطة

–          Harus dibaca Shad

Apabila huruf shad bertanda fathah bertemu dengan ya mati.

 Contohnya :بمصيطر

–          Boleh dibaca Sin atau Shad

Apabila huruf shad bertanda fathah bertemu dengan ya mati dalam satu kata sifat.

Contohnya :المصيطرون

1. **Pelajaran Waqof**
2. **Pengertian**

Waqof artinya : tempat pemberhentian.

Waqof adalah tempat berhentinya bacaan Al-Qur’an yang berada di tengah ayat maupun di akhir ayat. Biasanya digunakan untuk mengatur pernafasan si Qira’at (pembaca), dapat pula digunakan untuk menyambung bacaan dari ayat yang satu ke ayat yang lainnya (menyambung kalimat yang dipenggal oleh ayat). Biasanya berpengaruh pula terhadap tafsir dari suatu ayat tersebut.

1. **Macam-macam Waqof**
2. **Waqof Lazim ( لازم )**

Lazim artinya suatu yang dilarang.

Waqof Al-Mamnu’ adalah apabila terdapat tanda waqof لا di tengah atau di akhir ayat, maka dilarang untuk berhenti walaupun hanya sejenak.

Contoh :

انّ الذ ين ءامنو والذ ين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللهۙ اولئك يرجون رحمت الله ………

(Q.S. Al-Baqaroh : 218)

1. **Waqof Al-Mamnu’ ( الممنوع**

Al-Mamnu’ artinya biasanya, seharusnya.

Waqof lazim adalah apabila terdapat tanda م  di tengah atau di akhir ayat, maka wajib berhenti.

Contoh :

زيّن للّذ ين كفروا الحيوة الد نيا ويسخرون من الذ ين ءامنوا ۢ………

(Q.S. Al-Baqoroh : 212)

1. **Waqof Jaiz جائز**

Jaiz artinya boleh.

Waqof Jaiz adalah apabila terdapat tanda waqof ج di tengah ayat, maka boleh berhenti atau dilanjutkan.

Contoh :

قد فرض الله لكم تحلّة أيمنكمۚ ………..

 (Q.S. At-Tahriim : 2)

1. **Waqof Shola  صلى**

Adapun yang dimaksud dengan waqof shola adalah apabila terdapat tanda صلى di tengah ayat maka lebih baik dilanjutkan bacaannya.

Contoh :

يعلمون ظا هرا من الحيوة الد نيا ۖ وهم عن الاخرة هم غافلون.

(Q.S. Ar-Ruum : 7)

1. **Waqof Qola قلى**

Adapun yang dimaksud dengan waqof shola adalah apabila terdapat tanda قلى di tengah ayat maka lebih baik berhenti daripada dilanjutkan. bacaannya.

Contoh :

وكذ لك نجزي من أسرف ولم يؤمن با يا ت ربه ۗ………..

(Q.S. Thaha :127)

1. **Waqof Saktah سكته**

Saktah artinya berhenti sejenak.

Waqof Saktah adalah apabila terdapat tanda سكته atau س di tengah atau di akhir ayat, maka haruslah berhenti dengan tidak bernafas lalu melanjutkan kepada kalimat atau ayat berikutnya.

Contoh : قالواياولنامن بعشنامن مرقد نا سكتههذا…

(Q.S. Yasin : 59)

1. **Waqof Ta’anaq  تعانق الوقف**

Ta’anaq artinya kembar.

Waqof ta’anaq adalah apabila terdapat tanda titik tiga (**:.**) dalam satu ayat, maka diperbolehkan untuk berhenti pada salah satu ta’anaqoh tersebut. Biasanya titik tiga tersebut ada dua di dalam satu ayat.

Contoh : ذالك الكتاب لا ريب  فيه   …………

**MATERI MENGHAFAL DAN MENULIS SURAT PENDEK**

Materi Menghafal dan Menulis Surat Pendek Mulai Surat al-Fatihah sampai dengan ad-Dhuha

1. Surat al-Fatihah

1. Surat an-Nas

1. Surat al-Falaq

1. Surat al-Ikhlas

1. Surat al-Lahab

1. Surat al-Nashr

1. Surat al-Kafirun

1. Surat al-Kautsar

1. Surat al-Ma’un

1. Surat al-Quraisy

1. Surat al-Fiil

1. Surat al-Humazah

1. Surat al-‘Ashr

1. Surat al-Takatsur

1. Surat al-Qari’ah

1. Surat al-‘Adiyat

1. Surat al-Zalzalah

1. Surat al-Bayyinah

1. Surat al-Qadr

1. Surat al-‘Alaq

1. Surat al-Tin

1. Surat Alam Nasyrah

1. Surat al-Dhuha

**MATERI THAHARAH**

1. **PENGERTIAN *THAHARAH***

Thaharah berasal dari kata *thahara-yathhuru-thaharan* yang secara bahasa mempunyai arti suci atau bersih, juga ada yang mengartikan “membersihkan atau menyucikan” dari kotoran, baik kotoran yang bersifat inderawi (dapat dirasa, dan dibau) ataupun kotoran yang bersifat maknawi (kotoran yang bersifat rohani),[[1]](#footnote-1) sebagaimana sabda Rasulallah Saw:

**عن ابن عباس رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال: "لابأس, طهور إن شاء الله", والطهور كفطور, المطهر من الذنوب فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرض مطهر من الذنوب"**

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibn Abas r.a.: “Sesungguhnya Rasulallah jika beliau menjenguk orang yang sakit dengan berkata: “Tidak apa-apa, atas izin Allah mudah-mudahan dia menjadi suci. Dan suci itu ibarat bersih/fitrah menyucikan dari dosa-dosa, sebagaimana Rasulallah Saw. Bersabda: “Sesungguhnya sakit itu dapat membersihkan dosa-dosa”.

Adapun arti thaharah secara istilah mempunyai beberapa pengertian, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama madzhab:

1. Menurut ulama Hanafiyah:

الطهارة شرعا النظا فة عن حدث أو خبث

“Bersih dari hadats dan najis (kotoran)”.

1. Menurut ulama Syafi’iyah

الطهارة شرعا على معنيين: أحدهما فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة

“Thaharah secara syar’i mempunyai dua makna, salah satunya yaitu mengerjakan sesuatu yang berupa wudhu, mandi, tayamum ataupun menghilangkan najis sehingga (karena perbuatan tersebut) diperbolehkan mengerjakan sholat”.

1. Menurut ulama Hanabilah

الطهارة في الشرع هي إرتفاع الحد ث وما في معناه, وزوال النجس

“Menghilangkan hadats atau yang sejenisnya dan menghilangkan najis”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud thaharah adalah:

الطهارة شرعا صفة اعتبارية قدّرها الشارع شرطا لصحة صلاة, وجواز إستعمال الانية والأطعمة وغير ذللك

“sifat yang telah ditetapkan oleh syari’ sebagai syarat sahnya shalat, bolehnya menggunakan tempat (wadah) dan makan dan lain sebagainya”.[[2]](#footnote-2)

Atau dengan definisi yang lain thaharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain, dari najis dan hadats dengan alat bersuci yang berupa air atau debu dengan tata cara tertentu.

1. **LANDASAN HUKUM**

...

“...sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri”. (Q.S. al-Baqarah: 222)

النّظا فة من الإيمان

“Kebersihan itu sebagian dari iman”

1. **PERBEDAAN ANTARA NAJIS DENGAN HADATS**

Dari pengertian thaharah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dalam konteks kajian fiqh mencakup dua hal, yaitu thaharah dari najis (*hubuts*) dan thaharah dari hadats. Yang dinamakan najis adalah benda kotor yang wajib atas orang Islam untuk mensucikannya dan membasuhnya jika tertimpa olehnya,[[3]](#footnote-3) misalnya air kencing, darah, dan lain-lain. Hadats menurut bahasa yaitu “sesuatu yang baru, kotoran, tidak suci”. Sedangkan menurut pengertian yaitu “keadaan yang tidak suci bagi seeorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah”. Atau dengan bahasa lain *hadats* adalah sifat yang abstrak (tidak terlihat), dimana syara’ menyifatinya ketika sebagian atau seluruh badan dalam keadaan *jinabah* (hadats besar), atau karena sebab batal wudhu, misalnya karena buang air kecil (kencing), kentut dan lain-lain.[[4]](#footnote-4)

Suci dari hadats dan najis, merupakan tuntutan bagi seorang muslim yang akan mengerjakan ibadah shalat ataupun haji, karena itu dia harus dalam keadaan bersih baik dari najis maupun hadats. Bersih dari najis dalam arti bahwa baik badan maupun pakaiannya harus bersih dari najis, demikian juga kondisi badannya juga harus bersih dari hadats.

1. **BENDA-BENDA YANG SUCI DAN BENDA-BENDA YANG NAJIS**

Telah disebutkan di atas, bahwa bersuci itu dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadats. Dalam konteks ini perlu dibahas yang termasuk benda-benda najis dan benda yang suci.

1. **Benda-Benda Yang Suci dalam perspektif hukum fiqh**

Dalam pandangan Islam, bahwa seluruh benda yang ada di dunia ini dianggap suci, kecuali terdapat dalil yang menerangkan bahwa ia termasuk benda najis. Sebagaimana kaidah di bawah ini:

الأ صل في الأشياء الطهارة مالم تثبت نجاستها بد ليل

“Asal dari semua benda adalah suci, kecuali ada dalil yang menetapkan kenajisannya”.[[5]](#footnote-5)

Adapun benda-benda suci yang ada dunia ini dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:[[6]](#footnote-6) *Pertama* adalah manusia. Manusia dianggap sebagai benda yang suci, baik dia dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal (mayat). Sebagaimana firman Allah;

ولقد كرّمنا بني اد م.....

Tetapi dalam ayat lain disebutkan bahwa orang musyrik dianggap najis, seperti dalam firman Allah;

إنما المشركون نجس....

Istilah najis yang disematkan kepada kepada orang musyrik, bukanlah najis yang bersifat *dzatiyah*, seperti najisnya anjing, tetapi ia dikategorikan najis yang bersifat *maknawiyah. Kedua*, benda padat (*al-jamad*), yaitu setiap benda hidup yang dihalalkan ketika hidupnya bagiannya masih bersatu dengan badannya.

1. **Benda-Benda yang Najis dalam perspektif hukum fiqh**
2. Bangkai

Secara umum yang dinamakan bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau tanpa disembelih, dan termasuk bagian yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Sebagaimana diterangkan dari hadits Nabi Saw;

عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حيّةٌ فهو ميتة (رواه أبو داود والترمذى)

حرمت عليكم الميتة (المائدة:

Di antara semua bangkai yang hukumnya najis, ada beberapa jenis bangkai yang dikecualikan dan dihukumi suci, yaitu;

1. Bangkai ikan dan bangkai belalang dihukumi suci sebagaimana disebutkan dalam hadits;

احلت لنا ميتتان ود مان: السمك والجرد والكبد والطحال (رواه ابن ماجه)

1. Bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, misalnya semut, tawon, lalat dan lain-lain. Hewan-hewan tersebut dihukumi suci, dan jika mati maka tidak najis, kecuali menurut Imam Syafi’i yang menghukumi hewan-hewan tersebut najis. Jika hewan hewan tersebut jatuh pada wadah yang ada airnya dan sifat air tersebut tidak berubah, maka hukumnya dima’afkan (*ma’fu*).[[7]](#footnote-7)
2. Tulang, tanduk, kuku, bulu, dan kulit bangkai binatang yang suci. Menurut Sayyid Sabiq, hukum asal dari hewan-hewan tersebut adalah suci, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Menurut al-Zuhry, tulang bangkai gajah adalah suci, demikian juga hewan yang semisal lainnya.[[8]](#footnote-8) Adapun dalil yang digunakan sebagai dasar adalah hadits Nabi Saw:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: تصدق على مولاه لميمونة بشاة فمات، فمرّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا أخدتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنّها ميتة، فقال: إنّما حرم أكلها

Sedangkan bangkai manusia dihukumi suci sebagaimana.

1. Nanah; baik yang kental maupun yang cair. Nanah merupakan darah yang sudah membusuk
2. Anjing dan Babi

**طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنّ بالتراب (رواه مسلم)**

Adapun Najisnya babi karena dianalogkan dengan najisnya anjing

1. Darah yang mengalir (*masfuhan*) karena akibat penyembelihan ataupun darah haid (menstruasi). Adapun darah yang masih tersisa di daging ataupun di ruas tulang dari hewan yang disembelih hukumnya halal (tidak najis), karena yang diharamkan adalah darah yang mengalir.

(Kecuali hati dan limpa)

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (المائدة:3 )

احلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجرد والكبد والطحال (رواه ابن ماجه)

1. Segala benda (padat/cair) yang keluar dari dua jalan (kecuali mani/sperma)
2. Bagian binatang yang diambil/dipotong selagi masih hidup
3. Khamr (minuman keras), kecuali jika ia sudah menjadi cuka.
4. Jalalah: Binatang (sapi, ayam, ikan lele dll) yang memakan kotorannya sendiri atau memakan makanan yang kotor dan najis, dapat menjadi halal jika sifatnya kembali (dinetralkan kepada sifat semula)
5. **TEORI AIR (MACAM-MACAM AIR)**

Dalam pembagian air terjadi perbedaan perspektif di antara para ulama. Meskipun perbedaan tersebut bukan pada tataran substansinya. Misalnya menurut al-Jaziri membagi air menjadi empat macam dengan istilah, yaitu *thahur* dan *thahir*, *ghair* *thahur*, dan *mutanajis*.[[9]](#footnote-9) Sedangkan menurut Sayyid Sabiq juga membagi air menjadi empat macam yaitu *air mutlaq*, *air musta’mal,* *air yang tercampur dengan benda suci*, dan *air yang tercampur dengan benda najis*.[[10]](#footnote-10)

* Air *thahuur dan thahir*.

Air thahuur (الماء الطهور) adalah semua air yang turun dari langit dan memancar dari dalam bumi selama air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya dari tiga sifat yang ada yaitu warna, rasa, dan baunya sehingga air tersebut sifat sucinya tidak hilang.[[11]](#footnote-11) Istilah air thahur dan thahir ini, oleh Sayyid Sabiq disebut dengan *air mutlak*.[[12]](#footnote-12)

Adapun perbedaan antara air *thahuur* dan air *thaahir* adalah bahwa air thahuur air yang digunakan (dimanfaatkan) dalam hal ibadah dan kebutuhan sehari-hari, seperti digunakan untuk berwudhu, mandi besar karena *jinabah* dan haid, ataupun air tersebut boleh digunakan untuk membersihkan najis atau membersihkan badan dan pakaian dari kotoran, dan lain sebagainya. Sementara air *thaahir* mempunyai pengertian yang berbeda dengan air *thahuur*. Air *thahir* adalah air yang tidak dapat (syah) digunakan untuk hal ibadah seperti mandi besar atau wudhu, demikian juga air ini tidak dapat digunakan untuk membersihkan najis, namun air ini hanya dapat digunakan dalam kebutuhan sehari-hari misalnya untuk minum atau untuk keperluan mencuci badan, pakaian dan juga membuat adonan tepung dan lain sebagainya.[[13]](#footnote-13)

Adapun empat macam pembagian air menurut Sayyid Sabiq adalah:[[14]](#footnote-14)

1. Air Mutlaq

Air mutlaq adalah air sifatnya suci (*tha>hir*) dan mensucikan (*thahu>r*). Suci (*tha>hir*) maksudnya adalah air tersebut suci dalam dirinya, mensucikan (*thahu>r*) artinya air tersebut dapat mensucikan (membersihkan) benda lain. Air mutlaq ini ada beberapa macam, yaitu;

1. Air hujan (*al-mathr*), air salju (es) (*al-tsalj*), dan air embun (*al-bard*). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Anfal: 11 dan Q.S. al-Furqan: 28.

... ...

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كبّر فى الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهمّ باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب، اللهمّ نقني من خطاياي كما ينقّى الثوب الأبيض من الدّ نس، اللهمّ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد (رواه الجماعة إلا الترمذي)

1. Air laut

Air laut itu dihukumi suci berdasarkan dalil dari hadits Rasulallah Saw.

سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته

1. Air zam-zam (air sumber)
2. Air yang berubah karena telah lama tergenang.
3. Air Musta’mal atau air yang sudah dipakai untuk bersuci pada saat wudhu ataupun mandi. Hukum air musta’mal ini adalah sama dengan air mutlaq, yaitu suci mensucikan (menurut madzhab hanafi), sedangkan menurut madzhab syafi’i hukum air musta’mal suci tetapi tidak mensucikan.
4. Air yang bercampur dengan barang suci, misalnya sabun, minyak za’faran, tepung dan lain-lain. Air seperti ini dapat dihukumi suci, jika sifat air ini masih tetap (sama) seperti sifat air mutlaq, namun jika sifatnya sudah tidak sama dengan sifat air mutlaq, maka air seperti ini masuk kategori air suci (thahir) tidak mensucikan.
5. Air yang kejatuhan (terkena) benda najis

Air yang terkena najis dibagi dalam dua macam;

1. Jika najis tersebut mengubah sifat air baik dari segi rasa, warna maupun baunya, maka jenis air seperti ini tidak dapat mensucikan atau dihukumi air najis.
2. Jika air tersebut masih tetap menunjukkan sifat air yang mutlaq, dan salah satu sifatnya (rasa, warna maupun bau) tidak berubah, maka air tersebut dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan.[[15]](#footnote-15)
3. **CARA MENGHILANGKAN NAJIS DAN HADATS**

Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat salat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan salat diwajibkan suci dari hadast dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis.

Bersuci ada dua bagian yaitu:

1. **Bersuci dari najis.**

Yang dimaksud bersuci dari najis ini adalah dengan membersihkan badan, tempat, atau wadah dari segala najis atau kotoran yang dapat menghalangi sahnya seorang muslim dari mengerjakan ibadah dengan menggunakan media air yang suci atau dengan benda-benda lain yang dibolehkan oleh syara’. Berdasarkan cara membersihkannya para ulama membagi najis menjadi tiga macam:

1. *Mukhafafah*

إنّ أم قيس جائت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبا ل عليه

فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (رواه الشيخان)

1. *Mutawasithah*

يغسل من بول الجا رية ويرشّ من بول الغلام (رواه الترمذي)

1. *Mughaladhah*

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنّ بالتراب (رواه مسلم)

Adapun jika dalam keadaan darurat (tidak ada air ataupun dalam kondisi sakit), maka diperbolehkan seseorang membersihkan kotoran (najis) dengan tidak menggunakan air tetapi dengan menggunakan benda-benda yang suci dan mempunyai permukaan yang kasar, contohnya batu. Bersuci dengan benda kasar disebut dengan *istinja’.*

1. **Bersuci dari hadats**, bagian ini berlaku pada badan, tidak pada pakaian, dan tempat.[[16]](#footnote-16)

Bersuci dari hadats adalah membersihkan anggota badan atau seluruh badan dengan cara berwudhu, mandi besar, ataupun tayamum. Hadats dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hadats kecil dan hadats besar.

1. Hadas kecil dan tata caranya membersihkannya

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa yang disebut hadats kecil adalah sebuah kondisi (sifat) seseorang yang diakibatkan karena sesuatu hal yang menyebabkan dia wajib wudhu ataupun tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mengalami kondisi hadats kecil adalah;

1. Keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu dubur dan qubul (kecuali yang keluar itu berupa sperma, darah menstruasi, nifas)
2. Hilang akal seperti mabuk, pingsan, gila dan tidur kecuali jika tidurnya dengan duduk bersila.
3. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa memakai alas (pendapat ini menurut madhhab Syafi’i)
4. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan

Cara bersuci dari hadats kecil adalah dengan berwudhu dan tayamum

**Pertama adalah wudhu**

1. Pengertian Wudhu

Secara bahasa *wudhu* mempunyai arti bagus (*al-hasan*) dan bersih/suci (*an-nadhafah*).[[17]](#footnote-17) Kata wudhu merupakan kata benda abstrak (*isim mashdar*) yang berasal dari fi’il (kata kerja) “*tawadhdha’a* (توضأ) yang isim mashdarnya menjadi at-tawadhdhu’u (التوضوء) dan *wadhu’a* (وضؤ) isim mashdarnya al-widha’ah (الوضاءة) yang mempunyai arti bagus dan suci.[[18]](#footnote-18) Adapun secara istilah menurut al-Jaziri adalah;

إستعمال الماء في أعضاء مخصوصة وهي الوجه واليد ين الخ...بكيفية مخصوصة

“Menggunakan air (untuk membasuh) anggota (badan) tertentu, misalnya wajah dan kedua tangan dan seterusnya...dengan tata cara tertentu pula”.[[19]](#footnote-19)

Wudhu secara istilah, menurut Sayyid Sabiq adalah;

طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين

“Bersuci dengan menggunakan air yang berkaitan dengan (membasuh) wajah, kedua tangan, kepala dan dua kaki”.[[20]](#footnote-20)

1. Dasar Hukum Wudhu
2. Dalam Q.S. al-Maidah: 6

...

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepala dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki....”.*

1. Dalam as-Hadits

روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه و سلّم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (رواه الشيخان وأبوداود والترمذي)

1. Ijma’ ulama

Para ulama telah bersepakat atas disyari’atkannya wudhu sejak masa Rasulallah sampai sekarang, dan merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus diketahui.

Syari’ah Islam telah menetapkan bahwa wudhu dapat menghilangkan (membersihkan) hadats. Adapun hukum mengerjakannya dapat bersifat wajib (jika wudhu tersebut merupakan syarat dari ibadah yang akan dilakukan) dan juga sunnah (jika wudhu tersebut bukan merupakan syarat dari ibadah yang akan dilakukan) dalam rangka untuk mengerjakan shalat, sujud tilawah, sujud syukur ataupun mengerjakan thawaf fardhu ataupun thawaf sunnah saat haji.[[21]](#footnote-21) Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulallah Saw.

الطواف حول البيت مثل الصلاة، الاّ أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير (رواه الترمذي)

“Thawaf di sekitar ka’bah seperti shalat, kecuali kamu (dibolehkan) berbicara di dalamnya (saat melakukan thawaf), maka barang siapa yang berbicara saat thawaf janganlah berbicara kecuali dalam hal kebaikan”.[[22]](#footnote-22)

Demikian juga wudhu merupakan syarat yang harus (wajib) dilakukan oleh seseorang yang mau menyentuh ataupun membawa mushaf al-Qur’an, meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu para ulama membolehkan untuk menyentuh atau membawanya meskipun tidak dalam keadaan berwudhu (dalam kondisi batal). Misalnya menurut pendapat ulama Malikiyah, boleh menyentuh atau membawa al-Qur’an dalam keadaan batal (tidak suci) tetapi dengan syarat; (1) mushaf al-Qur’an tersebut tidak ditulis dengan bahasa Arab atau ditulis dengan selain bahasa Arab; (2) ayat al-Qur’an terukir/tercetak dalam mata uang (dinar/dirham);(3)jika mushaf tersebut tersimpan dalam kotak/tempat penyimpanan,[[23]](#footnote-23) atau diangkut dengan menggunakan alat transportasi.

Menurut ulama Hanabilah, boleh menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudhu jika ia di dalam sampul yang terpisah, ataupun yang tertempel dalam dompet, karung dsb.[[24]](#footnote-24)

Menurut ulama Hanafiyah, boleh menyentuh mushaf ataupun bagiannya; (1) jika dalam keadaan darurat, misalnya mushaf tersebut akan terbakar jika tidak segera diambil;(2) jika bagian mushaf tersebut berupa sampul/bungkus yang terpisah dari mushafnya, misalnya jika dijadikan merk dalam bungkus barang;(3) jika umur orang yang menyentuh mushaf tersebut belum baligh; (3) dia harus muslim.[[25]](#footnote-25)

Menurut ulama Syafi’iyah tidak boleh menyentuh mushaf kecuali; (1)jika ia dalam kotak penyimpanan; (2)jika ia tertulis dalam mata uang (dirham) jika bagian al-Qur’an tersebut tertulis dalam buku ilmu pengetahuan;(3)jika sebagaian ayat al-Qur’an ditulis dalam baju/pakaian, contohnya dalam kiswah (pakaian) ka’bah;(4)jika menyentuhnya betul-betul dalam rangka untuk belajar.[[26]](#footnote-26)

**Syarat-syarat dan Rukun wudhu;**

1. **Syarat:** sesuatu yang dilakukan sebelum mengerjakan ibadah (sesuatu itu bersifat eksternal/di luar dari ibadah yang dilakukan)
2. **Rukun:** sesuatu yang dilakukan ketika melakukan ibadah (sesuatu itu bersifat internal/di dalam dari ibadah yang dilakukan

**Syarat wudhu ini menurut al-Jaziri dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu; syarat wajib, syarat syah, serta syarat wajib dan syah sekaligus.[[27]](#footnote-27)**

1. Syarat wajib
2. Baligh (dewasa); taklif (tanggung jawab)
3. Sudah masuk waktu shalat
4. Mampu untuk mengerjakan wudhu.[[28]](#footnote-28)
5. Syarat syah
6. Memakai air yang suci
7. Mumayyiz (mampu membedakan antara yang benar dan salah)
8. Tidak ada benda yang menghalangi sampainya air pada anggota yang wajib dibasuh dalam berwudhu
9. Ketika sedang berwudhu tidak menjumpai hal-hal yang membatalkan wudhu, misalnya ketika membasuh muka tiba-tiba berhadats dan lain sebagainya.[[29]](#footnote-29)
10. Syarat wajib dan syah
11. Berakal
12. Bagi wanita suci dari haid dan nifas
13. Beragama Islam
14. Sudah baligh.[[30]](#footnote-30)
15. Rukun wudhu

Unsur-unsur yang paling pokok atau yang disebut dengan *rukun wudhu* adalah:

1. **Niat**. Niat menurut syara’ adalah kehendak sengaja melakukan pekerjaan atau amal karena tunduk kepada Allah Swt. Dalam konteks berwudhu ini, seseorang hendaknya berniat (menyengaja) menghilangkan hadats (kecil) atau menyengaja melakukan wudhu. Lafadz niat wudhu adalah:

**نويتُ الوضوء لرفع الحدث الأصغر فرضا لله تعالى**

Artinya:

*“Saya berniat (menyengaja) berwudhu untuk menghilangkan hadats yang kecil (hal ini dilakukan semata-mata) karena Allah Swt”.*

1. **Membasuh Muka**

Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah. Lintangnya (batas sampingnya) dari telinga ke telinga. Seluruh batas muka yang disebutkan di atas wajib dibasuh, tidak boleh tertinggal sedikit pun, bahkan wajib dilebihkan sedikit, agar yakin semuanya (muka) telah terbasuh.

1. **Membasuh kedua tangan sampai ke siku**. Siku ialah tempat persambungan antara tulang hasta (lengan bawah) dengan lengan atas. Sebagian ulama berkata bahwa siku masuk bagian yang harus dibasuh ketika membasuh kedua tangan dan ada yang berpendapat tidak masuk. Perselisihan mereka karena berbeda tentang makna *"ila"* dalam ayat Al Maidah di atas, apakah maknanya "sampai ke siku" yang berarti bersamaan, bukan sebagai batas. Sebagian ulama (pengikut mahzab Imam Malik) berpendapat bahwa *"ila"* bermakna batas yang berarti siku tidak termasuk yang wajib dibasuh. Sedangkan para ulama yang terbanyak (jumhur ulama) berpendapat bahwa *"ila"* dalam ayat wudlu bermakna *"ma'a"* artinya bersama, jadi siku termasuk anggota wudlu yang wajib dibasuh.
2. **Mengusap sebagian kepala**.

Para ulama berbeda pendapat tentang ”mengusap sebagian kepala”. Imam Malik mengharuskan mengusap seluruh rambut kepala dalam wudhu. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah usapan kepala yang wajib adalah sekedar usapan dengan menggunakan tiga jari. Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan minimal yang diusap adalah seperempat bagian dari rambut kepala dan jika seseorang mengusap kepalanya hanya dengan menggunakan dua jari atau satu jari maka usapannya tersebut tidak sah. Sufyan ats-Tsauri berpendapat bahwa mengusap sebagian kepala itu sah meski hanya satu helai rambut saja. Demikian pula sah hukumnya mengusap dengan hanya menggunakan satu jari ataupun kurang dari satu jari. Sedangkan batasan minimal usapan kepala yang ditetapkan oleh Syafiiyyah (pengikut Imam Syafi’i) adalah dua helai rambut kepala dan sah hukumnya mengusap kepala hanya dengan menggunakan satu jari atau pun kurang dari satu jari. Akan tetapi yang lebih disukai oleh Imam Syafii adalah mengusap seluruh kepala sebanyak tiga kali. Adapun Imam Ahmad berpendapat bahwa sah hukumnya bagi wanita jika dia hanya mengusap bagian depan kepalanya saja. Sedangkan Daud azh-Zhahiri berpendapat bahwa minimal usapan kepala yang sah adalah yang bisa disebut usapan baik yang alat yang digunakan untuk mengusap adalah satu jari atau kurang dari satu jari ataupun lebih dari satu jari (yang penting asalkan masih bisa disebut mengusap). Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena makna *”bi”* (yang dimaknai dengan ”sebagian”: peny.) pada surat al-Maidah ayat 6 di atas.

1. **Membasuh kaki hingga mata kaki**.

Ketika mencuci kaki ini, kedua mata kaki ikut disertakan dalam pencucian sebagaimana Allah ta’ala berfirman: *“dan kedua kakimu hingga dua mata kaki.”*(al-Maidah: 6)*.* Batasan yang dimaksud dengan mata kaki adalah benjolan yang ada di sebelah bawah betis. Kedua mata kaki tersebut wajib dicuci bersamaan dangan kaki. Orang yg tangan atau kakinya terpotong maka ia mencuci bagian yg tersisa yang wajib dicuci. Apabila tangan atau kakinya itu terpotong semua maka cukup mencuci bagian ujungnya saja.

1. **Tertib dan berturut-turut**. Setiap tahapan tata cara di atas harus dilakukan secara berurutan mulai dari niat, membasuh muka sampai membasuh kaki.

Selain rukun wudhu yang telah diterangkan di atas ada beberapa amalan lain yang **bersifat sunnah** untuk dilakukan, antara lain:

1. Membaca basmalah pada permulaan wudhu.
2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebelum berkumur-kumur.
3. Berkumur-kumur.
4. Memasukkan air ke hidung (*al-insiqaq*).
5. Menyapu (mengusap) seluruh kepala.
6. Menyapu (mengusap) kedua telinga luar dan dalam.
7. Menyilang-nyilangi jari-jari kedua tangan dengan cara berpanca dan menyilang-nyilangi jari-jari kaki dengan kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan, disudahi pada kelingking kaki kiri. Sunnah menyilangi jari-jari, kalau air dapat sampai di antara jari-jari dengan tidak disilangi, tetapi jika air tidak sampai di antara jari-jari kecuali dengan menyilangi, maka menyilangi jari-jari itu hukumnya menjadi wajib, bukan sunnah lagi.
8. Mendahulukan anggota kanan daripada kiri.
9. Sunah-sunah wudlu
10. Membaca basmalah di permulaan wudhu
11. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan
12. Berkumur

لو لا أن أسق على أمتي لأمرته عند كل صلاة بالسواق

1. Membasuh atau menghisap air ke dalam hidung (insiqoq)
2. Mengusap seluruh kepala
3. Mengusap kedua daun telinga (bagian luar dan dalam)
4. Membasuh tiap-tiap anggota wudhu sebanyak tiga kali
5. Menyela-nyela jari tangan dan jari kaki
6. Mendahulukan yang kanan
7. Tanpa meminta bantuan orang lain
8. Tertib
9. Berdoa sesudah berwudlu

Teks hadits yang menerangkan mengenai kebaikan seseorang yang telah mengerjakan wudhu:

**حدثنا جعفربن عمران الثعلبي الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي ادريس الخولاني وأبي عثمان عن عمربن الخطاب قال رسولالله صلى الله عليه وسلم مَنْ تَوَضَّّأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء**

Artinya:

*“Rasulallah SAW bersabda: “Barang siapa yang berwudhu dengan cara yang bagus kemudian membaca “aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku tergolong orang-orang yang bersuci,” maka dia akan dipersilahkan untuk memilih pintu dari 8 pintu surga yang dibukakan”*

**Kedua adalah Tayamum**

Pengertian tayamum secara bahasa adalah sengaja/menyengaja (*al-qashdu*), sebagaimana terdapat dalam firman Allah;

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

Makna “tayammamu” dalam ayat di atas adalah menyengaja (tuqshidhu).

Adapun pengertian tayamum secara istilah adalah;

مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص

“Mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan tata cara tertentu”[[31]](#footnote-31)

Mengusap wajah dalam pengertian ini bukan berarti melumurkan debu ke muka ataupun kedua tangan, namun tujuan dari tayamum ini hanya sekedar meletakkan tangan di atas debu, batu yang suci ataupun benda-benda yang lainnya. Tayamum ini dapat dilakukan dengan syarat jika seseorang tidak menemukan air ataupun terhalang karena disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu, misalnya sakit ataupun dalam kendaraan yang tidak memungkinkan seseorang turun untuk mendapatkan air.

Dasar Hukum tayamum dalam Q.S. al-Maidah: 6

...

**Rukun Tayamum**

* Niat; waktu niat saat meletakkan tangan ketika tayamum
* Mengusap semua permukaan muka (wajah) dengan debu, meskipun hanya dengan satu tangan. Mengusap muka ini meliputi mengusap jenggot meskipun panjang
* Mengusap kedua tangan hingga siku dengan debu dengan mencopot semua atribut (sesuatu) yang dapat menghalangi usapan debu pada anggota tubuh yang wajib diusap.
* Tertib

**Syarat Tayamum**

1. Sudah masuk waktu shalat
2. Sudah diusahakan mencari air namun tidak ditemukan
3. Dengan tanah yang suci dan (benda) yang berdebu
4. Menghilangkan najis. Dilakukan sebelum melakukan tayamum

Makna “*sho’idan thayyiba*” (bagian tanah/bumi yang meninggi yang baik)[[32]](#footnote-32) terdapat perbedaan pendapat antara ulama madzhab

1. Ulama Syafi’iyyah: bahwa makna *sho’idan* *thayyiba* adalah tanah yang berdebu (*at-thurab alladzi lahu ghabar*).[[33]](#footnote-33) Misalnya kerikil/pasir yang berdebu. Jika tanah tersebut tidak berdebu, maka tidak syah digunakan sebagai alat tayamum.
2. Ulama Hanabilah: yang dimaksud dengan *sho’idan* adalah tanah yang suci saja, dan berdebu hanya sebagai syarat mubah.
3. Ulama Hanafiyah: yang dimaksud *sho’idan* *thayyiba* adalah semua benda yang merupakan bagian dari bumi, misalnya tanah, pasir, kerikil, batu meskipun licin.
4. Ulama Malikiyah: yang dimaksud *sho’idan* adalah segala sesuatu yang menyembul/menonjol di permukaan bumi, maka ia mengandung debu

**Sunnah tayyamum**

1. Membaca basmalah ketika memulai tayyamum
2. Menghembus (meniup) debu yang ada ditelapak tangan, supaya debu yang menempel menjadi tipis
3. Membaca dua kalimat syahadat

**Hal-hal yang membatalkan tayyamum**

1. Setiap hal yang membatalkan wudhu
2. Ada air ketika seseorang belum sempat melaksanakan shalat. Hal ini berlaku bagi orang melakukan tayyamum karena ketiadaan air, bukan karena sakit.
3. **Bersuci dari hadats besar**

Hadats besar adalah sebuah kondisi (sifat) seseorang yang diakibatkan karena sesuatu hal yang menyebabkan dia wajib mandi wajib (mandi *jinabat*).

Hal-hal yang dapat menyebabkan hadats besar ada enam, tiga biasanya terjadi pada laki-laki dan perempuan dan tiga lainnya terjadi pada perempuan saja;

1. Bersetubuh baik keluar sperma maupun tidak.
2. Keluar sperma, baik keluarnya karena akibat mimpi, ataupun sebab yang lain, baik disengaja ataupun tidak.
3. Meninggal dunia, kecuali mati syahid.
4. Menstruasi (haid).
5. Nifas (darah yang keluar dari kemaluan wanita sesudah melahirkan anak).
6. Melahirkan, baik sudah cukup umur maupun belum (*prematur*).

**Rukun Mandi Wajib**

1. Niat. Seseorang ketika akan mandi berniat untuk menghilangkan hadats besarnya
2. Mengalirkan air ke seluruh tubuh secara merata

**Sunah-Sunnah Mandi Wajib**

1. Membaca *basmalah* pada permulaan mandi
2. Berwudhu sebelum mandi
3. Menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan
4. Mendahulukan yang kanan dari pada yang kiri
5. Berturut-turut

**MATERI TENTANG SHALAT**

Dalam Islam shalat merupakan ibadah yang paling utama.

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيا مة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسد ت فسد سائر عمله (رواه الطبراني)

Dianggap utama karena

1. Shalat merupakan ibadah yang tidak dapat ditinggalkan dalam keadaan “apapun”.
2. Diantara ibadah yang lain, hanya perintah shalat yang diberikan secara langsung oleh Allah kepada Rasulallah ketika peristiwa isra’ mi’raj.

1. **Pengertian Sholat**

Asal mula makna *shalat* menurut bahasa arab adalah “*ad*-*do’a*”. Adapun arti shalat secara istilah adalah “ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan”.

1. **Dasar** Shalat
2. Al-Qur’an; ayat-ayat al-Qur’an banyak yang berbicara tentang perintah melaksanakan shalat.
3. Al-Hadits; demikian hadits Nabi Saw, baik yang berupa hadits qauli dan fi’li

Tujuan sholat:

1. Untuk mengingat Allah

أقم الصلاة لذكري

1. Untuk mencegah manusia dari perbuatan tercela.
2. Sebagai sarana komunikasi atau cara untuk mengadu kapada Allah

أعبد الله كأنك تراه وإن لم تراه فإنه يراك

1. Sebagai kafarat atas dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu.
2. Tata cara mengingat Allah secara khusus
3. Disiplin waktu
4. Untuk menyelamatkan manusia dari neraka.[[34]](#footnote-34)

Firman Allah swt.

“…dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar… (al-ankabut: 45)

**Macam-Macam Shalat**

1. Shalat Fardhu (wajib)

Adalah shalat yang diwajibkan atas setiap muslim mukallaf dan dilarang untuk meninggalkannya. Contohnya shalat lima waktu; subuh, dhuhur (shalat jum’at), ashar, maghrib, dan isya’.

1. Shalat Sunnah
2. **Shalat sunnah mu’akkad** (shalat yang pelaksanakannya amat sangat dianjurkan)
   * + 1. Shalat sunnah *mu’akkad rawatib* (shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu), contohnya; shalat qabliyah subuh, qabliyah dan ba’diyah dhuhur, qabliyah ashar, ba’diyah maghrib, qabliyah dan ba’diyah isya’.
       2. Shalat sunnah *mu’akkad ghairu rawatib* (shalat sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk mengerjakannya terutama pada waktu-waktu mustajabah, yaitu sepertiga malam akhir dan dalam waktu-waktu tertentu); contohnya shalat tahajud, shalat tasbih, shalat dhuha, shalat ‘idain (fitri dan adha)
3. **Shalat sunnah ghairu mu’akkad** (shalat sunnah yang dianjurkan untuk mengerjakannya); contoh shalat sunnah mutlak (shalat sunnah yang dapat dikerjakan kapan saja, asalkan bukan pada waktu yang diharamkan untuk mengerjakan shalat)

**Shalat fardhu (sholat lima waktu)**

Sholat yang diwajibkan bagi tiap-tiap orang dewasa dan berakal ialah lima kali sehari semalam, mula-mula turunnya perintah wajib salat itu ialah pada malam isra’, setahun sebelum tahun hijriyah.

1. Syarat-syarat wajib shalat lima waktu
   1. Islam

Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakanya di dunia hingga ia masuk Islam. Karena meskipun dikerjakanya tetap tidak syah.

* 1. Suci dari haid (kotoran) dan nifas.

Telah di jelaskan bahwa nifas adalah kotoran yang terkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil.

* 1. Berakal

Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan sholat.

* 1. Baligh (dewasa) telah sampai dakwah.

Tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki: keluar mani, mimpi bersetubuh dan keluar mani

Tanda-tanda baligh bagi perempuan: haid (menstruasi).

* 1. Terjaga (dalam keadaan sadar).
  2. Orang yang tertidur sebelum masuk waktu shalat tidak diwajibkan sholat begitu juga orang yang lupa.

1. Syarat-syarat sah shalat wajib lima waktu
   1. Suci dari hadats besar dan hadast kecil
   2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis
   3. Menutup aurat.
   4. Mengetahui masuknya waktu sholat.
   5. Menghadap ke kiblat.
2. Hal-hal sunat yang dilakukan sebelum shalat

* Adzan

Asal makna adzan adalah “pemberitahuan”.yang dimaksud disini ialah “memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dengan lafalt yang ditentukan oleh syara”. Dalam lafalt adzan terdapat beberapa maksud yang penting, yaitu sebagai aqidah, seperti adanya alloh yang maha esa, tidak ada sekutu baginya, serta menerangkan bahwa nabi muhammad saw, adalah utusan alloh yang cerdik dan bijaksana untuk menerima wahyu dari alloh.

* Iqamah

Yaitu memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk shalat.

Adzan dan iqomah itu hukumya sunnat menurut kebanyakan para ulama, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa adzan dan iqomah itu hukumnya adalah fardhu kifayah karena keduanya menjadi syiar islam.

1. Membatasi tempat sholat

diantara hal-hal yang dilakukan sebelum sholat adalah membatasi tempat sholat dengan dinding, dengan tongkat, dengan menghamparkan sajadah, atau dengan garis, supaya orang tidak lewat didepan orang yang sedang mengerjakan sholat, karena lewat di depan orang sholat itu hukumnya haram.

**ARAH QIBLAT DALAM MELAKSANAKAN SHALAT**

Shalat harus dilakukan dengan menghadap qiblat (ka’bah), jika seseorang berada dalam kondisi normal (biasa). Namun jika seseorang dalam kondisi tidak normal boleh baginya untuk mengerjakan shalat meskipun dengan cara tidak menghadap qiblat, misalnya saat dalam kendaraan. Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama madhhab terkait kewajiban menghadap qiblat dalam shalat yang dilakukan di atas kendaraan. Pendapat-pendapat tersebut antara lain:

1. Jika seseorang naik kendaraan yang sedang berjalan, misalnya bus, kereta api maupun kapal terbang yang memungkinkan dia tidak dapat turun dari kendaraan dikarenakan ada kekhawatiran (bahaya) yang akan menimpa dirinya ataupun harta (barang) yang dibawanya, ataupun khawatir akan terpisah dari rombongan ataupun ketinggalan dari kendaraan yang dinaikinya, maka dia dapat melaksanakan shalat fardhu di atas kendaraan tersebut mengikuti arah kendaraan tersebut berjalan. Adapun gerakan rukun shalat, misalnya ruku’ mapun sujud tidak dapat dilakukan secara sempurna, maka rukun yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tersebut dianggap gugur (dilakukan semampunya). Dan dia tidak perlu mengulangi shalatnya di lain waktu.[[35]](#footnote-35)
2. Adapun jika seseorang berada dalam kendaraan bus, kereta api maupun kapal terbang dalam keadaan berhenti, maka dia wajib melaksanakan shalat secara normal, artinya gerakan-gerakan rukun dalam shalat harus dilakukan secara sempurna, sebagaimana melaksanakan shalat di atas tanah. Karena itu dia harus menghadap qiblat. Meskipun kendaraan tersebut berjalan dan seseorang dimungkinkan dapat melaksanakan shalat secara sempurna, maka hal tersebut dianggap lebih baik.
3. Bagi seseorang yang melaksanakan shalat dalam kapal laut, maka dia wajib menghadap qiblat. Jika kapal laut tersebut ternyata berputar saat dia melaksanakan shalat, maka baginya juga harus memutar badannya untuk menghadap qiblat, namun jika hal tersebut tidak memungkinkan (tidak dapat dilakukan) maka diperbolehkan menghadap ke mana saja sesuai arah kapal laut, karena dikhawatirkan akan kehabisan waktu shalat sebelum kapal laut, kereta api ataupun pesawat udara sampai tempat tujuan. Dan seseorang tidak perlu untuk mengulangi shalatnya di lain waktu.[[36]](#footnote-36)

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama madhhab terkait dengan kewajiban mengulang shalat bagi seseorang yang tidak dapat melaksanakan shalat secara sempurna seperti dalam kondisi di atas. Menurut ulama Malikiyah, bahwa perasaan takut (*khauf*) semata pada bahaya belum tertentu terjadi, tidak dapat dijadikan sebagai alasan sahnya melakukan shalat di atas kendaraan dengan gerakan isyarat. Mereka mengatakan bahwa standar bahaya yang diperbolehkan shalat di atas kendaraan misalnya ketika dalam perang memerangi orang kafir, menghadapi pencuri (hartanya takut dicuri), takut ancaman binatang buas, mengalami sakit yang menyebabkan seseorang tidak dapat turun dari kendaraan, ataupun takut waktunya habis. Dalam kondisi di atas seseorang dapat melaksanakan shalat di atas kendaraan meskipun tidak dapat menghadap qiblat. Dan seandainya dia sudah dalam situasi normal, maka disunnatkan untuk mengulangi shalatnya.[[37]](#footnote-37)

Hanafiyah berpendapat bahwa melaksanakan shalat di atas kendaraan hukumnya tidak syah jika tanpa ada alasan darurat (udzur), meskipun shalat tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna.

**Rukun Shalat**

*Rukun* adalah sesuatu (niat), tempat bergantungnya sesuatu yang lain (shalat), dan ia (niat) merupakan bagian (di dalam/inheren) dari sesuatu tersebut (sholat).

*Syarat* adalah sesuatu (wudhu), tempat bergantungnya sesuatu yang lain (shalat), dan ia (wudhu) berada di luar dari sesuatu tersebut (sholat).

1. **Niat** (*qashdu ’ala syai’*) dengan khusu’. Menurut Imam Nawawi, niat shalat harus mencakup tiga hal, yaitu: *Qasdhul fi’li* (menyengaja melaksanakan shalat, misalnya: “Saya niat shalat dhuhur”); *Ta’yin* (menentukan waktu shalat, seperti dhuhur, ashar, maghrib, dan lain-lain; *Fardhiyah*, yaitu menentukan jenis kefardhuan shalat, seperti ucapan fardhu.

**أصلى فرض الظهر أربع ركعات مستقبل القبلة أداء لله تعالى**

Artinya:

*“Aku berniat shalat fardhu dhuhur, empat rekaat dengan menghadap qiblah (saya melakukan ini) karena Allah ta’ala”.*

1. **Berdiri bagi seseorang yang mampu berdiri**. Jika tidak mampu berdiri diperbolehkan shalat dengan duduk, jika tidak mampu duduk dengan berbaring dengan gerakan anggota tubuh. Jika hanya mampu berbaring dan sudah tidak mampu menggerakkan anggota tubuh, maka gerakan shalat dilakukan dengan isyarat mata.
2. **Takbiratul ihram.**
3. **Membaca surat al-Fatehah pada setiap rekaat**
4. **Ruku’ dengan tuma’ninah**
5. **I’tidal dengan tuma’ninah**
6. **Sujud dua kali dengan tuma’ninah (sujud yang kedua dilakukan setelah duduk iftiras)**
7. **Duduk iftiras dengan tuma’ninah**
8. **Duduk tasyahud/tahiyat akhir**
9. **Membaca do’a tasyahud**
10. **Membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw pada tasyahud akhir**
11. **Menoleh salam ke kanan**
12. **Tertib atau berurutan (gerakan atau bacaan di atas dilakukan secara berurutan, tidak boleh meloncat-loncat, misalnya membaca al-fatehah dulu kemudian melakukan takbiratul ikram dll).**

**Bacaan dan Cara-Cara Mengerjakan Sholat:**

* 1. Berdiri tegak menghadap *qiblah* dan sambil niat mengerjakan shalat. Niat shalat sesuai dengan shalat yang sedang dikerjakan. Misalnya shalat dhuhur atau maghrib dan sebagainya. Niat dibaca di dalam hati (dengan lafadz niat sebagaimana telah disebutkan di atas).
  2. Kemudian takbiratul ihram (mengangkat kedua tangan sambil membaca):

**الله اكبر**

Artinya:

*“Allah Maha Besar”*

* 1. Kemudian kedua belah tangannya disedakapkan pada dada, lalu membaca do’a iftitah:

**اللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُلِلَّهِ كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذالك أمرت وأنا من المسلمين**

Artinya:

*“Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaran-Nya, segala puji bagi-Nya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, matiku semata hanya untuk Allah seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan bagi-Nya. Dan aku dari golongan orang muslimin”.*

Adapun do’a iftitah versi yang lain:

**اللهم باعد بينى وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياي بالماء والثلج والبرد**

Artinya:

“*Ya Allah, jauhkanlah saya dari pada kesalahanku dan dosa sejauh antara jarak timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan dosa bagaikan bersihnya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air, dan air salju yang sejuk”.*

* 1. Setelah membaca iftitah, kemudian membaca surat al-Fatehah

ِ**بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)**

Artinya:

*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Tujukkilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat”.*

Setelah membaca al-fatehah, disunnatkan untuk membaca surat pendek yang dihafal atau ayat-ayat al-Qur’an lainnya. Misalnya membaca surat al-ihlas:

**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)**

Artinya:

*“Katakanlah (hai Muhammad), bahwa Allah itu Maha Esa. Allah tempat bergantung (segala sesuatu). Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”.*

* 1. Ruku’

Selesai membaca surat, lalu kedua tangan diangkat setinggi telinga dan membaca takbir (Allah Akbar), lalu badannya membungkuk, kedua tangan memegang lutut lalu ditekan. Dalam posisi rukuk ini, usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah sempurna posisi ruku’, kemudian membaca tasbih sebanyak tiga kali, sebagai berikut:

**سبحان ربي العظيم وبحمده**

Artinya:

*“Maha Suci Tuhan yang Maha Agung serta aku memuji kepada-Nya”.*

* 1. I’tidal

Selesai ruku’ lalu bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga, sambil membaca:

**سمع الله لمن حمده**

Artinya:

*“Allah mendengar orang yang memuji-Nya”.*

Setelah berdiri tegak lalu membaca:

**ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ماشئت من شيئ بعد**

Artinya:

*“Ya Allah, Tuhan kami bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah ini”.*

* 1. Sujud

Setelah selesai i’tidal lalu sujud, dengan meletakkan dahi di atas alas shalat (sajadah). Ketika turun, yaitu dari berdiri ke sujud sambil membaca “Allah Akbar”. Dan saat sujud membaca tasbih sebanyak tiga kali sebagai berikut.

**سبحان ربي الأعلى وبحمده**

Artinya:

*“Maha Suci Tuhan Dzat yang paling Tinggi, serta aku memuji kepada-Nya”.*

* 1. **Duduk di antara dua sujud**

Setelah sujud lalu duduk sambil membaca “Allah Akbar” dan setelah posisi duduknya sempurna, kemudian membaca:

**رب اغفرلى وارحمنى واجبرنى وارفعنى وارزقنى واهدنى وعا فنى واعف عنى**

Artinya:

“*Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku dan angkatlah derajatku dan berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan bagiku dan berilah ampunan kepadaku”.*

* 1. Sujud kedua

Sujud kedua dikerjakan seperti sujud yang pertama, baik caranya maupun bacaannya.

* 1. Setelah sujud, lalu berdiri lagi dengan posisi seperti pada rekaat pertama (tangan disedekapkan pada dada), kemudian membaca surat al-fatehah, surat pendek. Kemudian ruku’, sujud dan gerakan-gerakan lainnya seperti sebelumnya.
  2. Duduk tasyahud/ tahiyat awal.

Pada rekaat yang kedua, kalau shalat kita tiga atau empat rekaat, maka kita duduk untuk membaca tasyahud awal, dengan sikap telapak kaki kanan tegak dan kaki kiri diduduki. Ketika posisi duduk ini kita membaca do’a sebagai berikut:

**التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايهاالنبى ورحمة الله وبركاته .السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين .اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسولالله اللهم صل على محمد**

Artinya:

*“Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Salam, rahmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad).Salam (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh-shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah! Limpahkanlah rahmad kepada Nabi Muhammad”.*

* 1. Setelah tasyahud awal, kemudian berdiri sebagaimana pada rekaat pertama.
  2. Tasyahud / tahiyyat akhir

Cara duduk pada tasyahud akhir/tahiyat akhir akhir adalah sebagai berikut:

1. Usahakan pantat menempel di alas sembahyang, dan kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan.
2. Jari-jari kaki kanan tetap menekan ke alas sembahyang. Bacaan tashahud akhir sama dengan bacaan tashahud awal, hanya saja ada penambahan bacaan shalawat atas keluarga Nabi Muhammad dan disunnatkan membaca shalawat Ibrahimiyah (shalawat atas Nabi Ibrahim a.s.)

**التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايهاالنبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسولالله اللهم صل على محمد و على ال محمد**

**كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد**

Artinya:

*“Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Salam, rahmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad).*

*Salam (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh-shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah! Limpahkanlah rahmad kepada Nabi Muhammad dan limpahkanlah rahmad kepada keluarga Muhammad.*

*Sebagaimana Engkau telah memberi rahmad kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta engkaulah yang terpuji, dan Maha Mulia”.*

* 1. Salam dengan menoleh ke kanan

Selesai membaca tahiyat akhir, kemudian mengucap salam dengan menoleh ke kanan. Salam menoleh ke kanan merupakan rukun shalat, sementara untuk salam yang ke kiri hukumnya sunnah. Adapun bacaan salam, sebagai berikut:

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته**

Artinya:

*“Keselamatan, rahmad dan berkah Allah semoga tetap terlimpah atas kamu semuanya”.*

**Hal-hal yang Membatalkan Shalat**

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat
2. Meninggalkan salah satu syarat shalat
3. Sengaja berbicara
4. Banyak bergerak yang tidak termasuk dalam gerakan shalat
5. Makan dan minum
6. Semua yang membatalkan wudhu.

**MATERI TENTANG ZAKAT**

* + 1. **Pengertian zakat**

Zakat secara bahasa mempunyai arti menyucikan (*at-tathhir*), dan tumbuh (*an-nama’*). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt:

قد أفلح من زكها

Artinya:

“Sungguh beruntung bagi orang yang membersihkan…..”

Arti ”*zaka*” dalam ayat tersebut dimaknai dengan ”membersihkan dari dosa-dosa.” Arti ”an-nama” sebagaimana dalam ungkapan “*zaka al-zar’u idza nama wa zada*” artinya ”tanaman tersebut tumbuh dan bertambah”.

Adapun zakat menurut istilah adalah:

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوص

Artinya:

“memiliki kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat tertentu pula (jika sudah mencapai nishab dan haul)”.

Nishab adalah ukuran atau takaran (kadar harta) tertentu sesuai dengan ketentuan syara’, sedangkan haul adalah batas waktu (lamanya) harta tersebut dimiliki oleh seseorang selama satu tahun. Tetapi haul ini dapat juga dimaksudkan untuk setiap kali panen, contohnya haul pada zakat hasil pertanian.

Dari definisi di atas dapat dipahami, bahwa jika seseorang mempunyai harta yang telah mencapai satu nishab, maka wajib baginya memberikan sebagian dari hartanya tersebut kepada fakir-miskin beserta keluarganya.

103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Hukumnya: zakat adalah salah satu rukun islam, ‘fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.

* + 1. **Syarat bagi muzaki**

1. Islam
2. Baligh
3. Milku tamm
   * 1. **Benda yang wajib dizakati**
4. Binatang ternak

Jenis binatang yang hanya wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta ,sapi, kerbau dan kambing. (Bagaimana dengan ayam, gurami, lele, bebek dll)

1. Emas dan perak

Barang tambang yang lain tidak wajib dizakati? (Emas: 93,6 gram, Perak: 624 gram)

1. Biji makanan yang mengenyangkan

Seperti beras, jagung, gandum, adas, dan sebagainya. (Adapun biji yang tidak mengeyangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, tanaman muda, dan sebagainya tidak dizakati.)

1. Buah-buahan

Yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja.sedangkan buah-buah yang lain tidak.

1. Harta perniagaan

Harta perniagaan wajib dizakati, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan pada zakat mas dan perak.

* + 1. **Delapan golongan (*mustahiq zakat*) yang berhak mendapatkan zakat:**

1. Fuqara’ (orang-orang fakir)
2. Masakin (orang-orang miskin)
3. Amil (pengurus zakat)
4. Muallaf *qulubuhum* (orang yang ditundukkan hatinya)
5. Riqab
6. Gharim (orang yang berutang)
7. Fi sabulillah (kepentingan agama)
8. Ibnu sabil (musafir)
   * 1. **Macam**-**Macam Zakat**

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Zakat jiwa (*zakat nafs*), nama lain dari jenis zakat ini adalah zakat fitrah (*zakat al-fitr*), yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri.
2. Zakat harta (zakat mal) adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta yang dimilikinya baik yang berasal dari pengembangan usahanya maupun dari harta temuan jika telah mencapai nishab, haul dan syarat lainnya. Yang termasuk harta yang wajib dizakati dalam zakat mal di sini adalah seperti emas, perak, binatang ternak, hasil pertanian (biji-bijian dan buah-buahan), harta perniagaan, barang temuan dan lain-lain.
   * 1. **Zakat Fitrah, Dalil, dan Hikmahnya**
3. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki maupun wanita, budak belian ataupun merdeka.

Pengertian fitrah menurut bahasa yaitu: ciptaan, atau asal kejadian. Dalam al-Qur’an lafadz fitrah ini disebutkan sebanyak.....diantaranya adalah

30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui[1168],

[1168] Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantara pengaruh lingkungan.

Fitrah Allah yang dimaksud dalam ayat di atas yaitu ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Karena itu, jika ada seseorang yang tidak beragama tauhid, berarti dia telah menyimpang dari fitrah yang telah Allah ciptakan. Penyimpangan tersebut terjadi mungkin karena adanya pengaruh lingkungan di mana dia berada. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Rasulallah Saw:

كلّ مولد يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه

**PEMBAHASAN TENTANG PUASA**

1. Pengertian Puasa

Puasa (*al-shaum*) menurut bahasa arab adalah “menahan (*al-imsak*) dari segala sesuatu”, seperti menahan dari makan, minum, nafsu, atau menahan berbicara yang tidak manfaat dan sebagainya.

Pengertian puasa menurut istilah yaitu “menahan diri dari sesuatu yang membatalkanya, satu hari lamanya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari”.

1. Puasa ada empat macam
2. Puasa wajib yaitu puasa pada bulan ramadhan, puasa *kafarat* dan puasa *nadzar*.
3. Puasa sunnat; senin-kamis, 6 hari di bulan syawal, 9 dzulhijjah, 10 muharam, bulan rajab.
4. Puasa makruh; puasa pada hari jum’at tanpa ada alasan syar’i.
5. Puasa haram yaitu puasa pada hari raya idul fitri, hari raya haji, dan tiga hari sesudah hari raya haji, yaitu tanggal: 11-12 dan 13 dzulhijjah.

Puasa ramadhan diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf dengan salah satu dari ketentuana-ketentuan berikut ini:

1. Ru’yah: Dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri.
2. Dengan mencukupkan bulan sya’ban tiga puluh hari, maksudnya bulan sya’ban itu dilihat.
3. Dengan adanya melihat (ru’yah) yang dipersaksikan oleh seorang yang adil di muka hakim.
4. Dengan kabar mutawatir.
5. Percaya kepada orang yang melihat.
6. Dengan ilmu hisab atau kabar dari orang ahli hisab.
7. Syarat-syarat wajib puasa
8. Berakal
9. Baligh
10. Kuat berpuasa
11. Syarat-syarat sah puasa
12. Islam
13. Mumazis
14. Suci dari darah haid
15. Dalam waktu yang dibolehkan puasa padanya.
16. Rukun-rukun puasa
17. Niat pada malamnya
18. Menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari
19. Hal-hal yang Membatalkan Puasa
20. Makan dan minum secara sengaja.
21. Muntah yang disengaja
22. Bersetubuh
23. Keluar darah haid (kotoran) atau nifas.
24. Gila
25. Keluar mani dengan sengaja (karena bersentuhan engan perempuan atau lainya)
26. Orang-Orang yang Boleh Berbuka Puasa
27. Orang yang sakit apabila tidak kuasa puasa
28. Orang yang dalam perjalanan jauh
29. Orang tua yang sudah lemah
30. Orang hamil dan orang yang sedang menyusui anak.
31. Hikmah dan nilai puasa:

Puasa yang dijalankan sebagai ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT mengandung pula nilai dan hikmah bagi jiwa manusia yang menjalankanya dengan baik. Nilai dan hikmah ini merupakan efek langsung yang diterima setiap hambaNya yang menjalankan ibadah puasa. Jadi nilai dan hikmah ini bukanlah tujuan dari pada puasa.

Secara garis besar sesuai dengan unsur manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani yang masing-masing memerlukan santapan dan pembinaan, maka nilai dan hikmah puasa dapat dibedakan atas nilai rohani dan jasmani.

**PEMBAHASAN TENTANG HAJI**

* + 1. **Pengertian haji**

Haji asal maknanya adalah ”*menyengaja sesuatu*” . Haji yang dimaksud disini menurut syara’ adalah sengaja mengunjungi ka’bah (rumah suci) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang tertentu’. Sebagaimana yang akan di terangkan dibawah ini.

Dasar disyari’atkan ibadah Haji

“…padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim[215]; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

[215] Ialah: tempat Nabi Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah.

[216] Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalananpun aman.

* Permulaan wajib haji

Pendapat ulama dalam hal menentukan permulaan wajib haji ini tidak sama, sebagian mengatakan pada tahun ke enam hijriyah, yang lain mengatakan pada tahun ke sembilan hijriyah.

Ibadah haji itu wajib segera dikerjakan .artinya, apabila orang-orang tersebut telah memenui syarat-syaratnya , tetapi masih dilalaikanya juga (tidak dikerjakanya pada tahun itu). Maka ia berdosa karena kelalaianya itu.

* + 1. **Syarat-syarat wajib haji**

1. Islam
2. Berakal
3. Baligh
4. Kuasa
   * 1. **Rukun haji**
5. *Ihram* (berniat mulai mengerjakan haji atau umrah).

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi[122], Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats[123], berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa[124] dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.

[122] Ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah.

[123] Rafats artinya mengeluarkan Perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.

[124] Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji.

1. Wukuf (Hadir) dipadang arafah pada waktu yang ditentukan
2. Tawaf (berkeliling ka’bah).
3. Sa’i (berlari lari kecil di antara bukit safa dan marwah).
4. Mencukur atau menggunting rambut.
5. Menertibkan rukun-rukun itu (mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu.
   * 1. **Beberapa wajib haji**
6. Ihram dan miqat (tempat yang di tentukan dan masa tertentu)
7. Berhenti di muzdalifah sesudah tengah malam.
8. Melontar jumratul aqabah pada hari raya haji.
9. Melontar tiga jumrah
10. Bermalam di mina
11. Tawaf wada’(tawaf sewaktu akan meninggalkan makkah).
12. Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan.
    * 1. **Beberapa Sunat Haji**
13. Ifrad.
14. Membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan hendaklah diucapkan sekedar terdengar oleh telinganya sendiri.
15. Berdoa setelah membaca talbiyah
16. Membaca dzikir sewaktu tawaf.
17. Sholat dua rakaat sesudah tawaf.
18. Masuk ke dalam ka’bah (rumah suci).
    * 1. **Beberapa Larangan Ketika Ihram.**

Hal hal yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang dalam ihram haji dan umrah ada yang terlarang bagi laki-laki saja, ada yang terlarang bagi perempuan saja, dan pula yang terlarang bagi keduanya.

1. Yang terlarang bagi laki-laki
2. Dilarang memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa maupun yang bersulam.
3. Dilarang menutup kepala, kecuali karena suatu keperluan, maka diperbolehkan, tetapi ia wajib membayar denda (dam).
4. Yang terlarang bagi perempuan

Dilarang meutup muka dan dua tapak tangan, kecuali maka ia boleh menutup muka dan dua tapak tanganya, tetapi diwajibkan membayar fidyah.

1. Yang dilarang bagi keduanya
2. Dilarang memakai wangi-wangian.
3. Dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, begitu juga berminyak rambut.
4. Dilarang memotong kuku.
5. Dilarang mengakatkan nikah
6. Dilarang bersetubuh dan pendahuluanya.
7. Dilarang berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan.

Sunah-sunah haji ada 15 diantaranya mandi untuk umrah, untuk masuk ke mekah, untuk wukuf di arafah, untuk mabit di muzdalifah, untuk melempar jumrah, untuk tawaf ziarah dan tawaf wada’, kemudian tawaf khudum, ramal (berlari kecil), sai, menyentuh dua rukun, mencium hajar aswad, berjalan menaiki safa dan marwa, mabit di Mina 3 hari, wukuf di Masyaril Haram, wukuf pada saat melempar jumrah.

* + 1. **Cara Mengerjakan Haji atau Umrah Ada Tiga Macam:**

1. *Ifrad*: yaitu mendahulukan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu dari pada ibadah umrah. Inilah cara yang dianggap lebih baik di antara dua cara yang lain.
2. *Tamattu’*: yaitu mendahulukan umrah dari pada ibadah haji. Caranya ihram mula-mula untuk umrah dari miqat negerinya, diselesaikan semua urusan umrah, kemudian ihram lagi dari Mekkah untuk melaksanakan haji.
3. *Qiran*: yaitu antara ibadah haji dan umrah dikerjakan secara bersama-sama. Caranya, seseorang melakukan ihram untuk keduanya pada waktu ihram haji, dan sekalian urusan haji. Urusan umrah dengan sendirinya termasuk dalam pekerjaan ibadah haji.

**PENGERTIAN USHUL FIQH DAN FIQH**

1. **Ushul Fiqh berasal dari kata Arab *Ushul al-Fiqh* yang terdiri dari dua kata, yaitu *al-ushul* dan *al-fiqh*.**
2. **al-Ushul**

Kata al-ushul adalah bentuk jama’ (plural) dari kata *al-ashl* yang secara bahasa berarti

ما بني عليه غيره

“*Landasan (tempat) untuk membangun sesuatu*”.

Adapun menurut Wahbah az-Zuhaili, makna *al-ashl* mempunyai beberapa pengertian:

1. Bermakna *dalil* seperti dalam ungkapan:

الاصل في وجوب الصلاة الكتابة والسنة

"*Dalil wajib shalat adalah al-Qur’an dan as-sunnah*"

1. Bermakna *kaidah umum* yaitu satu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku pada seluruh cakupannya, seperti dalam contoh:

بني الاسلام علي خمسة اصول

"*Islam dibangun di atas lima kaidah umum*".

1. Bermakna *al-rajih* (yang lebih kuat dari beberapa kemungkinan) seperti dalam contoh:

الأصل فى الكلام الحقيقة

"*Pengertian yang lebih kuat dari suatu perkataan adalah pengertian hakikatnya*"

1. Bermakna asal tempat menganalogkan sesuatu yang merupakan salah satu dari rukun qiyas. Misalnya, *khamr* sebagai tempat menganalogkan (mengkiyaskan) narkotika.
2. Bermakna sesuatu yang diyakini bilamana terjadi keraguan dalam satu masalah. Misalnya seseorang yang meyakini bahwa dia telah berwudhu, beberapa saat kemudian timbul keraguan bahwa dia sudah bathal atau belum. Maka dalam hal ini ketetapan fiqh mengatakan bahwa *al-ashl at-thaharah* (yang diyakini adalah keadaan dia sudah berwudhu). Dalam hal ini, maka seseorang tetap berpegang pada hal yang diyakini, yaitu berwudhu (dalam keadaan suci).

Dari beberapa pengertian *al-ashl* di atas, maka dalam konteks pembahasan ushul al-fiqh ini, makna yang dianggap tepat adalah makna sebagaimana yang disebutkan dalam item (a), yaitu *dalil*. Sehingga pengertian ushul al-fiqh berarti adalah *dalil-dalil* *fiqh*, seperti al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’, qiyas dan lain-lain.

1. **al-Fiqh**

Kata al-fiqh secara bahasa adalah pemahaman (al-fahm), sebagaimana dalam firman Allah:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ **مَا نَفْقَهُ** كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا…

*"Mereka berkata: Hai Syu’aib,* ***kami tidak banyak mengerti*** *tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami….."* (Q.S. Hud: 91).

Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulallah tatkala beliau mendoakan Ibn Abbas:

اللهم فقهه فى الدين وعلمته فى التاويل

"*Ya Allah berikanlah dia pemahaman dalam ilmu-ilmu agama dan ajarkanlah dia ilmu ta’wil*".

**Ada beberapa makana fiqh:**

1. Menurut definisi dari Abu Hanifah:

معرفة النفس ما لها وما عليها

"*Pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi kewajibannya*". Atau dengan kata lain pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan.

1. Ibn. Subki dari kalangan Syafi’iyah:

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصلية

"*Pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci*".

Maksud dari “*al-muktasab*” berarti diusahakan yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dari penarikannya dari al-Qur’an dan sunnah Rasulallah. Karena itu pengetahuan yang tidak dicampuri oleh akal pikiran manusia dalam ushul fiqh tidak disebut sebagai fiqh. Misalnya kewajiban tentang melaksanakan lima **waktu, zakat dan haji**. Karena hukum-hukum tersebut sudah diketahui secara *pasti/qath’y*.

Dari beberapa pengertian di atas yang dimaksud dengan makna “*al-ashl*” dalam konteks ini adalah makna “*dalil*”. Atas dasar makna tersebut, istilah ushul fiqh berarti *dalil-dalil fiqh*, yaitu al-Qur’an, Sunah, ijma’ qiyas dan lain-lain. Namun pengertian ini tidak begitu populer dipakai dalam kajian ushul fiqh.

1. **Definisi Ushul Fiqh sebagai Satu Disiplin Ilmu**

Sebagaimana bagi satu disiplin ilmu, ushul fiqh dipandang sebagai satu kesatuan, tanpa melihat kepada pengertian satu-persatu dari dua kata yang membentuknya. Dalam mendefinisikannya terdapat berbagai redaksi di kalangan para ahlinya.

1. Abdullah bin ‘Umar al-Baidawi ahli ushul fiqh dari kalangan syafi’iyah mendefinisikannya:

معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفاد منها وحال المستفيد

*"Pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara global, cara mengistinbathkan (menarik) hukum dari dalil-dalil itu, dan tentang hal ihwal pelaku istinbath".*

1. Menurut Abdullah Wahab Khallaf:

العلم بالقواعد والبحوث التى يتوصل بها الى استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصلية

*"Ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang menjadi sarana untuk memperoleh hukum syara’ amaliyah diambil dari dalil-dalil yang terperinci".*

1. **Pengertian "Dalil-Dalil Fiqh" Secara Global**

Kata *al-dalil* secara etimologi berarti “*sesuatu yang memberi petunjuk kepada suatu hal yang lain*”.

مايمكن بصحيح النظرفيه الى مطلوب خبرى

"*Sesuatu yang bilamana dipikirkan secara benar akan menyampaikan seseorang kepada kesimpulan yang dicari*".

Misalnya, alam semesta ini bila dipikirkan secara benar tentang eksistensi dan sifat-sifatnya yang selalu berubah, dapat diketahui bahwa alam itu baru, dan hal itu akan menyampaikan seseorang kepada sebuah kesimpulan bahwa alam yang baru ini pasti ada penciptanya, sehingga kesimpulannya berbunyi: “*Alam ini baru, setiap yang baru ada penciptanya*, kesimpulan akhirnya berbunyi: “*Alam ada penciptanya*”.

Dalil dapat dibagi menjadi dua macam: *dalil ijmali* (global) dan *dalil tafshili* (terinci). Kemudian istilah dalil ijmali dan dalil tafshili, masing-masing populer dalam dua pengertian:

***Pertama***: Pengertian dalil *ijmali* dalam konteks ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an dari segi terperinci dan tidak terperincinya. Ayat-ayat al-Qur’an dalam menjelaskan hukum ada yang secara global tanpa merincinya dan ada pula yang secara rinci menjelaskan hukumnya. Ayat-ayat yang menjelaskan hukum secara global itu disebut ayat-ayat mujmal (global). Misalnya, ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu, zakat, haji. Ayat-ayat tersebut tanpa **memerinci teknis pelaksanaannya**. Sebaliknya ayat-ayat yang secara rinci menjelaskan tentang sesuatu hukum, disebut dalil-dalil tafshili. Misalnya, ayat-ayat yang menjelaskan **masalah pembagian harta warisan**, dan ayat yang menjelaskan **kewajiban membayar denda kifarat** **atas pelanggaran sumpah dan kifarat zihar**.

***Kedua*:** Pengertian dalil *ijmali* dalam konteks pembicaraan tentang kaidah-kaidah umum ushul fiqh seperti yang dimaksud dengan istilah dalil ijmali dalam definisi ushul fiqh tersebut di atas. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan dalil ijmali adalah dalil atau kaidah yang bersifat umum yang tidak menunjukkan sesuatu hukum pada masalah tertentu secara langsung. Contohnya kaidah yang mengatakan, al-Qur’an adalah sumber hukum pertama dan utama, dan hadits adalah sumber hukum kedua, dan “kata perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi lain yang menunjukkan pengertian selain itu” disebut sebagai kaidah atau dalil-dalil ijmali (global). Dalam konteks ini yang menjadi lawannya adalah dalil tafshili dalam pengertian dalil-dalil yang langsung menunjukkan hukum tertentu. Misalnya, ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan shalat, zakat, haji dan pembagian harta warisan.

***Kajian*** ushul fiqh membahas dalil-dalil yang bersifat global seperti yang tersebut pada bagian dua di atas, bukan dalil terperinci. Dalil terperinci menjadi lapangan ilmu fiqh.

1. **Definisi ushul fiqh yang dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah sebagaimana yang disimpulkan oleh Wahbah al-Zuhaili, berikut ini:**

القواعد التى يوصل البحث فيها إلى إستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية

*"Kaidah-kaidah yang akan digunakan seorang mujtahid untuk menyimpulkan hukum fiqh dari satu per satu dalilnya"*

Yang dimaksud dengan "kaidah-kaidah" dalam definisi tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi mujtahid untuk memahami hokum-hukum lebih rinci yang tercakup di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Di antara "kaidah-kaidah" tersebut ada yang berhubungan dengan keabsahan suatu dalil, misalnya keabsahan hadits Rasulallah untuk dijadikan sumber hokum, dan ada pula yang berhubungan dengan metode *istinbath*. Metode istinbath dapat mencakup:

* 1. Segi kebahasaan (seperti kaidah yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang tegas/qath'i menunjukkan hukum, wajib diamalkan seadanya dan bukan merupakan lapangan ijtihad). Disamping itu al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang dalam memahaminya memerlukan seperangkat aturan. Menurut ulama ushul bahwa ayat al-Qur'an menunjukkan hukum dari berbagai bentuk, sifat dan dari berbagai sisi. Ada bentuk perintah (*amar*), ada berbentuk larangan (*nahi*), dan ada yang memberi pilihan (*takhyir*). Ada yang ayat yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, muthlaq dan muqayyad, ada yang mantuq (tersurat) ada yang mafhum (tersirat).
  2. Segi substansi / tujuan hukum (*maqashid* *syari'ah*), karena disamping ayat-ayat al-Qur'an atau teks al-Hadits menunjukkan hukum melalui pengertian bahasanya, juga melalui tujuan hukumnya. Islam diturunkan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Ushul fiqh menjelaskan dalam konteks di atas melalui metode, seperti menetapkan hukum dengan cara *qiyas, istihsan, atau istishlah* (*maslahah mursalah*).
  3. Metode *tarjih* yaitu metode untuk mengetahui mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang kelihatan bertentangan di mata seoarang mujtahid. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan akal pikiran manusia manusia dalam menangkap maksud dari suatu dalil, bias jadi suatu dalil dianggap bertentangan dengan maksud dalil yang lainnya.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari ushul fiqh adalah *metode atau kaidah-kaidah yang dipakai untuk mengistinbathkan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah* atau *satu ilmu yang menjelaskan metode mengistinbathkan hokum dari dalil-dalilnya".*

1. **OBJEK KAJIAN USHUL FIQH**

Objek kajian/bahasan ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang dibahas dalam ilmu tersebut tentang sifat-sifat yang berhubungan atau dapat dihubungkan dengan sesuatu tersebut. Objek kajian ini bertujuan untuk mendalami sebuah disiplin ilmu dari berbagai dimensi/sisi dari objek bahasan tersebut akan dikaji.

1. **MANFAAT MEMPELAJARI ILMU USHUL FIQH**
2. Dengan mempelajari ushul fiqh akan memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujtahid masa silam dalam membentuk pendapat fiqhnya.
3. Dengan mempelajari ushul fiqh seseorang akan memperoleh kemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan hadits-hadits dalam sunnah Rasullallah, kemudian mengistinbathkan hukum dari dua sumber tersebut.
4. Dengan mendalami ushul fiqh seseorang akan mampu secara benar dan lebih baik melakukan *muqaranah al-madzahib al-fiqhiyah,* studi komparatif antar pendapat ulama fiqh dari berbagai madzhab, sebab ushul fiqh merupakan alat untuk melakukan perbandingan madzhab fiqh.

**MATERI UJIAN KOMPREHENSIF KEFAKULTASAN**

**EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

1. **Pengertian Ilmu Ekonomi Islam**

Ilmu ekonomi pada dasarnya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara orang memenuhi keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas melalui sumber-sumber yang terbatas agar dapat menjalankan hidupnya dengan baik sesuai keinginannya. Dalam menjalani kehidupannya itu mereka mempunyai cara yang berbeda satu dengan lainnya. Cara yang berbeda itu dilakukan mereka rawan terjadi benturan karena secara alamiyah mereka mempunyai karakter keinginan yang tidak terbatas. Sementara alat pemuas keinginan atau sumber daya yang ada sangat terbatas. Oleh karena itu, cara orang bekerja dan berusaha mencari nafkah ini sangat tergantung dengan nilai-nilai budaya, ideologis dan cara pandang terhadap dunia yang melekat dalam diri mereka. Mereka yang beridiologis kapitalisme atau sosialisme akan menggunakan cara-cara berekonomi yang diajarkan oleh ideologi tersebut. Demikian juga jika mereka seorang muslim/muslimah, mereka akan mendasarkan nilai-nilai dan ajaran syariah dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Oleh karena itu, pengertian ilmu ekonomi dari perspektif Islam tidak berorientasi pada cara, karena caranya sudah jelas menggunakan prinsip Islam (syariah), tetapi lebih menekankan pada fungsi. Menurut M. A Mannan, ilmu ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[[38]](#footnote-38) Hampir senada dengan itu, menurut Khursyid Ahmad ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematik yang mencoba memahami problem ekonomi dan prilaku manusia dalam hubungannya dengan problem itu dari perspektif Islam.[[39]](#footnote-39) Sementara M. Nejatullah Shiddiqi mengatakannya ekonomi Islam adalah “para pemikir muslim” yang merespon tantangan-tantangan ekonomi pada masanya, yang dalam usahanya itu mereka dibantu oleh al-Qur’an, Sunah, dan juga penalaran dan pengalaman.[[40]](#footnote-40) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan sosial yang dirancang secara sistematik oleh para ahli ekonomi muslim yang berusaha memahami problem ekonomi dan perilaku masyarakat yang didasarkan pada realitas yang terjadi dengan diilhami oleh nilai-nilai Islam yang terkandung dalam al-Qur’an, Hadis/Sunah dan hasil ijtihad para ulama.

1. **Tujuan Mempelajari Ilmu Ekonomi Islam**

Tujuan mempelajari ilmu ekonomi Islam adalah agar seseorang dapat: (a) mengatur kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, (b) meningkatkan taraf hidup masyarakat secara material maupun spiritual, (c) melatih seseorang agar berjiwa sosial tinggi, teliti, cermat, dan ekonomis, (d) mengelola sumber daya individual maupun sosial dengan baik, (e) dengan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan dari keperluan yang lebih maslahah terlebih dahulu, (f) melatih seseorang agar dapat mandiri dalam berwirausaha dan mengelola kebutuhanya, (g) membuat seseorang berperilaku adil dalam bekerja, (h) menunjukkan seseorang tentang ajaran Islam dalam bidang ekonomi sehingga apa yang dilakukannya bermuatan pahala, (i) memberikan arahan menuju cara-cara berusaha yang dapat mengantarkan pada falah, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, (j) menghindari seseorang dari sesuatu atau cara yang tidak diperkenankan dalam syariah sehingga seseoang bisa dengan tenang menjalankan usahanya, dan (k) membuat seseorang penuh dengan rasa optimis dalam bekerja karena kepasrahan mereka yang mereka seragkan kepada Tuhan sebagai zat yang mengatur segalanya.

1. **Perbandingan Sistem Ekonomi**

Memposisikan sistem ekonomi Islam dalam dua kutub sistem ekonomi kapitalis dan sosialis memunculkan dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam termasuk dalam sistem ekonomi campuran (*mixed economy*). Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa sistem ekonomi yang berkembang di masyarakat tidak lepas dari adanya dua kutub sistem ekonomi, yaitu kapitalis dan sosialis. Dalam perkembangannya kemudian dua kutub ini melahirkan kutub yang ketiga yaitu sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran ini umumnya merupakan evaluasi dari kedua sistem ekonomi besar tersebut. Sistem ekonomi kerakyatan, Pancasila, welfare nation, fasisme, sosialisme pasar dan sebagainya merupakan sistem ekonomi yang merupakan penggabungan dari kedua sistem ekonomi besar tersebut. Sistem ekonomi Islam dianggap oleh kelompok ini masuk di dalamnya.

Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam telah ada sebelum kedua sistem ekonomi tersebut lahir. Sistem ekonomi Islam lahir sejak Nabi Muhammad menerima risalah keislaman, termasuk risalah tentang ekonomi. Posisi sistem ekonomi Islam dalam dua kutub tidak berada diantara keduanya, atau cenderung ke kanan atau ke kiri, tetapi posisinya berada di luar dua kutub tersebut. Pendapat ini didasarkan pada bahwa risalah Islam tentang ekonomi itu telah melekat dalam kehidupan Nabi SAW sebagai pembumian atas nilai-nilai dan prinsip ekonomi yang memang banyak disebutkan dalam al-Quran. Tema-tema tentang pola konsumsi, distribusi dan distribusi serta pola hidup yang berkeadilan banyak disebutkan dalam al-Quran. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam bukan merupakan penggabungan dari kedua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam ya sistem ekonomi Islam dengan karakternya yang khas. Perbandingan sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam, oleh karenanya didasarkan pada pendapat yang kedua ini.

Sebelum membahas perbandingan antara sistem ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. Terlebih dulu akan dipaparkan hakikat, prinsip dasar dan ciri-ciri dari ketiga sistem ekonomi tersebut.

1. Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan.

Sistem sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.

Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis adalah (a) pemilikan harta oleh negara, (b) kesamaan ekonomi, (c) disiplin politik. Sedangkan ciri-cirinya adalah (a) lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme), (b) peran pemerintah sangat kuat, dan (c) sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalis adalah (a) pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, (b) perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, (c) manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri dan (d) paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme)

1. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah (a) berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia, (b) Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, (c) kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama, (d) ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja, (e) ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang, (f) seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti, (g) zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Dan (h) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Sedangkan ciri-ciri ekonomi Islam adalah (a) aqidah sebagai substansi (inti) yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi, (b) syari’ah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi, dan (c) akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi.

Secara lebih rinci perbedaan Sistem Ekonomi Islam (SEI) dengan Sistem Ekonomi Kapitalis (SEK) dan Sistem Ekonomi Sosialis (SES) diurai melalui tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsep | Kapitalisme | Sosialisme | Islam |
| Sumber nilai | Akal | Akal | Wahyu |
| Tokoh/perintis | Adam smith | Karl Marx | Muhammad |
| Dasar paradigma | Materialisme | Materialisme | Spiritualisme-materialisme |
| Sumber daya | Terbatas | Terbatas | Cukup untuk sekedar memberikan kesejahteraan manusia |
| Motif ekonomi | Self-interest | Social-interest | Self-social and ritual interest |
| Eksistensi manusia | Berdiri sendiri | Bagian dari masyarakat | Khalifatullah di bumi |
| Kepemilikan | Pribadi | Negara | Titipan Allah |
| Peran individu | Absolut | Terbatasi | Seimbang dan kondisional |
| Peran pemerintah | Terbatasi | Absolut | Seimbang dan kondisional |
| Interaksi ekonomi | Ditentukan oleh pasar | Ditentukan negara | Ditentukan pasar, negara dan agama |
| Skup aktivitas | Duniawi | Duniawi | Duniawi-ukhrawi |
| Tujuan ekonomi | Kepuasaan diri | Kepuasan bersama | Kesejahteraan bersama di dunia dan akhirat (falah) |
| Ukuran kesejahteraan | Banyaknya modal yang dimiliki | Banyaknya keterlibatan masyarakat | Banyaknya kemaslahatan dalam masyarakat |

Sumber nilai kebenaran bagi SEK dan SES adalah akal sedangkan bagi SEI adalah wahyu. SEI meyakini bahwa wahyu adalah sumber kebenaran karena wahyu itu dari Tuhan zat yang maha abadi. Oleh karenanya kadar kebenarannya bersifat mutlak. Sementara kebenaran yang lahir dari akal tidaklah mutlak dan abadi. Dia hanya bersifat sementara, temporer dan lokalitas. Kebenaran ini juga akan punah seiring dengan fananya manusia.

Perintis atau tokoh dari SEK adalah Adam Smith melalui bukunya *The Wealth of Nation*. Sedangkan SES perintisnya adalah Karl Marx melalui bukunya *Das Capital*. Sementara SEI perintisnya adalah Muhammad, seorang rasul yang diperintahkan Tuhan untuk memperbaiki moral manusia, melawan penindasan kaum bangsawan, hartawan, terhadap kaum lemah, perempuan dan anak-anak. Perjuangannya jauh lebih luas dan masif dalam merubah peradaban dibanding Smith yang hanya menyuruh orang untuk sejahtera dan Marx yang hanya membela kaum buruh.

Dasar paradigma yang dibangun SEK dan SES adalah murni materialisme, berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi, sehingga kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat kondisi kejiwaan seperti kasih sayang, kerinduan, ketidakberdayaan. Sedangkan SEI tidak hanya materialisme tapi juga spiritualisme. SEI berusaha menyeimbangkan kebutuhan manusia yang bersifat materi dan kebutuhan manusia akan kondisi kejiwaan. Dengan ini, Islam sangat meyakini adanya zat ghaib yang menguasai manusia yang mengendalikan kehidupan manusia.

Sumber daya dalam SEK dan SES bersifat terbatas sehingga muncul adanya konsep *scarcity* (kelangkaan), sedangkan dalam SEI sumber daya itu bersifat cukup jika hanya untuk memberikan kesejahteraan manusia. Tidak ada sumberdaya yang dicipta Tuhan secara sia-sia. Problem terjadinya kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan bukan disebabkan karena adanya kelangkaan tapi lebih disebabkan karena adanya kerakusan manusia dan *mal distribution* atau kesalahan distribusi sumber daya.

Motif ekonomi dalam SEK adalah *self interest* (kepentingan pribadi), sedangkan dalam SES *social interest*. Sedangkan dalam SEI motif ekonomi adalah *Self-social and ritual interset*. Individu, masyarakat dan Tuhan tidak bisa dipisahkan sehingga ketiga unsur tersebut menjadi pertimbangan penting dalam beraktivitas ekonomi.

Eksistensi manusia dalam SEK adalah individu-individu yang terpisah sedangkan dalam SES adalah masyarakat yang tidak mengakui individu-individu. Sedangkan dalam SEI eksistensi manusia itu adalah khalifah Allah yang mendapat mandat dari pencipta jagat untuk mengatur, melestarikan dan menjaga keseimbangannya.

Kepemilikan akan harta dalam SEK sepenuhnya milik pribadi. Dalam SES harta kekayaan dimiliki oleh negara. Sedangkan dalam SEI pemilik harta itu adalah Allah, manusia hanya penerima titipan. Manusia hanya memiliki hak pakai bukan hak memiliki. Oleh karena itu jika Tuhan memerintahkan untuk bersedekah, maka manusia harus mentaatinya.

Peran individu dalam SEK dibebaskan untuk melakukan apa saja, hampir tidak ada intervensi negara. Sementara dalam SES peran individu dibatasi dan diintervensi negara. Sedangkan dalam SEI peran individu dan negara seimbang, proporsional dan kondisional, sehingga kebutuhan vital dikuasai negara, selain itu individu dibebaskan.

Interaksi ekonomi dalam SEK ditentukan oleh mekanisme pasar, sementara dalam SES ditentukan oleh negara. Sedangkan dalam SEI ditentukan oleh ketiga unsur; pasar, negara dan agama. seseorang dapat melakukan bisnis sesuai dengan keinginan pasar tanpa harus merugikan negara serta dalam berbisnis itu mendasarkan pada prinsip dan nilai-nilai agama.

Skup aktivitas ekonomi dalam SEK dan SES hanya pada lingkup kehidupan di dunia saja, sedangkan dalam SEI lebih luas yaitu dunia dan akhirat. Dengan adanya horizon yang lebih luas semua tindakan yang baik atau buruk akan mendapatkan balasannya pada kehidupan sesungguhnya setelah kehidupan di dunia.

Tujuan ekonomi dalam SEK adalah kepuasan individu dan dalam SES kepuasan bersama. Sedangkan dalam SEI tujuan ekonomi itu adalah kesejahteraan bersama di dunia dan akhirat (falah).

Ukuran kesejahteraan dalam SEK adalah banyaknya modal yang dimiliki dan dalam SES diukur dari banyaknya keterlibatan masyarakat. sedangkan dalam SEI diukur dari banyaknya kemaslahatan dalam masyarakat, yang artinya banyaknya orang berbuat baik dalam kehidupan.

1. **Akad-akad Syariah dalam Bisnis**

Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad syariah dalam bisnis pada dasarnya terbagi menjadi dua, akad *tabarru’* (sosial) dan akad *tijaroh* (bisnis).

* 1. Akad *Tabarru’*

Akad *tabarru’* adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang tujuannya bernuansa sosial, tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru’*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan dan mengharapkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, Pada hakekatnya, akad *tabarru’* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.

Dilihat dari obyek yang diberikan atau dipinjamkan, akad *tabarru’* terbagi menjadi 3, yaitu; pemberian barang, pemberian jasa dan pemberian sesuatu.

1. Dalam bentuk meminjamkan uang. Ada tiga jenis akad dalam bentuk meminjamkan uang yakni: (1) *qard*, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut. (2) *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, dan (3) *Hiwalah*, merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga.
2. Dalam bentuk meminjamkan Jasa. Ada tiga jenis akad dalam meminjamkan jasa yakni: (1) *Wakalah*, merupakan akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dapat  dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu bentuknya jasa, keahlian, ketrampilan atau lainya yang kita lakukan atas nama orang lain. (2) *Wadi’ah*, dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sebuah jasa untuk sebuah penitipan atau pemeliharaan yang kita lakukan sebagai ganti orang lain yang mempunyai tanggungan. *Wadi’ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.[[41]](#footnote-41) dan (3) *Kafalah*, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.
3. Dalam bentuk memberikan sesuatu. Yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad: *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, *hadiah*, dll. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya  dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu sebagai aset *wakaf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.
   1. Akad *Tijaroh*

Akad *tijarah* adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang tujuannya berorientasi pada keuntungan bisnis (komersial). Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Dilihat dari tingkat kepastian hasil yang diperoleh, akad *tijaroh* hterbagi menjadi 2, yaitu; *Natural Certainty Contrats* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC).

1. *Natural Certainty Contracts* (NCC). NCC adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yangbertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak *bai’* (jual-beli)[[42]](#footnote-42), *ujroh* (upah-mengupah), *ijaraoh* (sewa-menyewa)[[43]](#footnote-43), dll.
2. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). NUC adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini tidak menawarkan keuntungan yang tetap dan pasti. Contoh akad yang bersifat NUC ini adalah (a) akad   
   *Musyarakah*. Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[[44]](#footnote-44) (b) *Muzara’ah*, akad *syirkah* di bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian tanaman setahun. (c) *Musaqah*, akad *syirkah* di bidang pertanian dimana digunakan untuk pertanian tanaman tahunan. (d) *Mukharabah*, akad *muzara’ah* dimana bibitnya berasal dari pemilik tanah.
3. **Asas Transaksi Syariah**

Transaksi syariah berasaskan pada lima prinsip: (1) persaudaraan (ukhuwah), (2) keadilan (‘adalah), (3) kemaslahatan (maslahah), (4) keseimbangan (tawazun), dan (5) universalisme (syumuliyah).

* 1. **Prinsip persaudaraan (**ukhuwah**),** esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).
  2. **Prinsip keadilan (‘**adalah**)** esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: (a) riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhl), (b) kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan), (c) maysir (unsur judi dan sikap spekulatif ), (d) gharar (unsur ketidakjelasan), dan (e) haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait). Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antarbarang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (money exchange) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai. Esensi kezaliman (dzulm) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudaratan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi. Esensi maysir adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (gambling). Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain: (a) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada, (b) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual, (c) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa, (d) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran, (e) tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad, (f ) kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi, (g) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan. Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Alquran dan As-sunnah.
  3. **Prinsip kemaslahatan (**mashlahah**)** esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap: (a) akidah, keimanan dan ketakwaan (dien), (b) intelek (‘aql), (c) keturunan (nasl), (d) jiwa dan keselamatan (nafs), dan (e) harta benda (mal).
  4. **Prinsip keseimbangan (**tawazun**)** esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.
  5. **Prinsip universalisme (**syumuliyah**)**, esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

1. **Ekonomi Makro dan Mikro**

Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak rumah tangga (*household*), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut: (a) Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut *full employment*. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan *under employment* atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh? (b) Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung naik dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya jika nilai uang cenderung turun berarti terjadi deflasi? Dan (c) Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat *trade off* maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk?

Untuk menggambarkan bentuk ekonomi makro ini berikut dijelaskan kasus inflasi. Inflasi adalah masalah yang dihadapi oleh tiap negara, masalah ini dikaitkan dengan adanya kenaikan harga, karena harga adalah indikator awal penentu inflasi. Inflasi sendiri adalah keadaan dimana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Maka bila di masyarakat terjadi kenaikan harga satu atau beberapa barang secara sementara, maka hal itu tidak dapat digolongkan sebagai inflasi, meskipun inflasi tidak secara langsung menurunkan standar hidup tapi hal ini tetap menjadi masalah karena 3 alasan yaitu; (a) mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat, (b) menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi, dan (c) menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat.

Dalam menghadapi kasus inflasi ini pemerintah biasanya melakukan kebijakan yang strategis dengan menaikkan suku bunga di bank agar orang mau menyimpan uang di bank. Hal ini diharap dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menurunkan inflasi. Dampak inflasi yang sangat jelas kita rasakan adalah kenaikan harga secara terus menerus yang ada di pasar.

Sedangkan ilmu ekonomi mikro atau mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut memengaruhi penawaran dan permintan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu lainnya di pasar, akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro; dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama (*ceteris paribus*).

Untuk menggambarkan bentuk ekonomi mikro berikut dijelaskan masalah investasi. investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Perilaku yang dapat digolongkan sebagai investasi meliputi: (a) pembelian berbagai jenis barang modal, (b) pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan, dll, (c) pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi antara lain; (a) keuntungan yang akan diperoleh, (b) tingkat suku bunga, (c) ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, (d) kemajuan teknologi, dan (e) tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, dan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan.

Hubungan ekonomi makro dan mikrosaling terkait. Karena perubahan ekonomi yang terjadi secara makro (menyeluruh) berdampak pada perubahan individu-individu yang berjuta-juta akan merasakan dan melakukan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, perubahan yang ada pada ekonomi makro, merupakan hasil dari perubahan yang terjadi dalam ekonomi mikro.

Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro antara lain:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aspek | Ekonomi Mikro | Ekonomi Makro |
| Harga | Harga adalah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja) | Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan/menyeluruh) |
| Unit Analisis | Perubahan kegiatan ekonomi secara erorangan/individual, contohnya permintaan dan penawaran konsumen, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan | Kegiatan ekonomi yang membahas secara menyeluruh. Contohnya Pendapatan nasional, Investasi, Kesempatan kerja, Inflasi , Neraca pembayaran |
| Tujuan Analisis | Terkonsentrasi  mengenai cara dalam mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat | Terkonsentrasi pada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh |

1. **Lembaga Perekonomian Umat**

Lembaga perekonomian umat adalah lembaga yang mengurusi dan melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Islam, baik dalam penerimaan, penyimpanan maupun penyaluran dana yang didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahterannya dan juga menyelesaikan problem-problemnya. Lembaga ini ada yang bersifat sosial keagamaan, ada juga yang bersifat bisnis. Lembaga perekonomian umat yang mengurusi keuangan masyarakat disebut dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua, lembaga keuangan bersifat bank dan non bank. Lembaga keuangan yang bersifat non bank antara lain; Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Amil Zakat, Badan Perwakafan Nasional, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sedangkan lembaga keuangan syariah yang bersifat bank terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank telah mendapatkan payung hukum kuat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang itu, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang menjauhkan diri dari praktik *maisir*, *gharar* dan *riba* (maghrib).

Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di samping BUS dan BPRS terdapat bentuk lain yaitu Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Adanya perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah yang telah menjadi BUS antara lain; Bank Syariah Mandiri, Bank Central Asia, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dan sebagainya.

Sedangkan lembaga keuangan berbentuk non bank banyak jenisnya. Beberapa di antaranya adalah:

1. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah merupakan sebuah lembaga keagaamaan yang beregerak dalam bidang perekonomian yang salah satu tugas pokoknya adalah mengentaskan masyarakat khususnya umat Islam dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Pembentukan lembaga ini adalah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat diharuskan dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar potensi umat Islam dalam bentuk zakat, infaq dan shodaqah dapat diberdayakan secara maksimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini dirasa sangat penting sebab zakat, infaq dan shodaqah adalah merupkan potensi umat Islam yang dapat komplementer dengan pembangunan nasional, sebab potensi zakat, infaq dan shodaqah apabila dapat diberdayakan secara maksimal, maka akan mendatangkan dana yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara.

Dalam undang-undnag itu disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: (a) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, (b) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagaman dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, (c) meningkatnya hasil guna dan daya guna Zakat.

1. Badan Perwakafan Nasional

Wakaf adalah merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang cukup dikenal di Indonesia, namun satu hal yang sangat disayangkan lembaga ini belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberlangsungan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan karena wakaf sebagai aset berharga umat Islam dan sangat potensial, belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum menghasilkan secara optimal. Potensi wakaf yang sangat besar tersebut kalaupun telah dikelola sebahagiannya, namun pengelolaan tersebut belum bersifat produktif, sehingga dengan demikian maka jadilah harta-harta wakaf itu dalam bentuk lahan tidur yang tidak dapat menghasilkan secara ekonomis.

Mengingat bahwa wakaf adalah merupakan aset umat Islam yang sangat potensial sebagaimana halnya zakat maka pemerintah membuat landasan hukum tentang wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang ini wakaf tidak saja pada benda-benda tidak bergerak, akan tetapi termasuk di dalamnya benda bergerak seperti logam, uang, surat berharga, kenderaan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Ini semua dimaksudkan agar potensi harta wakaf bisa tergali secara maksimal sehingga bisa memberdayakan masyarakat.

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan keuangan umat Islam. Wilayah kerja BMT terdiri atas dua bagian, wilayah kerja yang berfungsi menerima zakat, infak dan sedekah masyarakat yang memposisikan lembaga ini sebagai Baitul Mal dan wilayah kerja yang berfungsi melayani penyimpanan dan pembiayaan yang memposisikan lembaga sebagai Baitut Tamwil. Dalam posisinya sebagai Baitul Mal, lembaga ini berorientasi pada dimensi sosial dan non profit, sedangkan dalam posisinya sebagai Baitut Tamwil, lembaga ini berorientasi pada bisnis dan keuntungan material.

Payung hukum BMT menggunakan dasar hukum koperasi. Karena BMT memang berjenis koperasi, lahir dari inisiatif masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk masyarakat.

1. Asuransi Syariah

Asuransi syariah, berdasarkan fatwa DSN Nomor 21 Tahun 2001, didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Pembayaran premi dalam asuransi syariah mengguankan dua akad, *tijaroh* dan *tabarru’*. Akad ***tijarah*** adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial sedangkan akad ***tabarru’*** adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-­menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Asuransi syariah juga disebut asuransi takaful. Kata *takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafalu*, yang artinya saling menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling memikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong (*ta’awun*) dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana sukarela (*tabarru’*) yang ditujukan untuk menanggung risiko.[[45]](#footnote-45) Dalam konteks kelembagaan, asuransi takaful merujuk pada pandangan Islam tentang kerjasama saling menjamin yang mana setiap kelompok anggota masyarakat menarik dana mereka bersama-sama untuk menghadapi kemungkinan kerugian tertentu.

1. Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi syariah adalah suatu kontrak perjanjian tertulis yang bersifat jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu tertentu seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan tertentu yang sesuai syariah serta membayar sejumlah manfaat secara priodik menurut akad. Bentuk obligasi syariah atau sukuk ini adalah surat berharga.

Perbedaan mendasar antara obligasi syariah dan obligasi konvensional adalah terletak pada penetapan bunga yang besarnya sudah ditentukan di awal transaksi jual beli, sedangkan pada obligasi syariah saat perjanjian jual beli tidak ditentukan besarnya bunga, yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa mendatang.

Obligasi syariah sebagaimana tersebut di atas dapat dibagi kepada jenis-jenis obligasi syariah antara lain; (a) obligasi *mudharabah*, yaitu obligasi yang menggunakan akad *mudharabah* (akad kerjasama antara pemilik modal, *sahohibul maal*, investor yang menyediakan dana penuh 100 % dan tidak boleh aktif dalam pengelolaan usaha dan pengelola, *mudhorib* atau emiten mengelola harta secara penuh dan mandiri dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan (b) obligasi *ijarah*, yaitu obligasi berdasarkan akad *ijarah* (suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian) artinya pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan obyek dengan manfaat tertentu dan membayar imbalan kepada pemilik obyek. Dalam akad *ijarah* disertai adanya perpindahan manfaat tetapi tidak perpindahan kepemilikan.

1. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah suatu badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas untuk menyelesaikan perkara perbankan di luar pengadilan umum. Basyarnas sebagaimana tersebut di atas memiliki tujuan sebagai berikut: (a) menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau *islah*, (b) meneyelasaikan sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam, (c) menyelesaikan kemungkinan adanya sengketa di antara bank-bank syariah, dan (d) memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, jasa, industri dan lain sebagainya.

1. **Kajian Ayat dan Hadis Ekonomi**

Untuk materi kajian ayat dan hadis ekonomi mahasiswa diberi keleluasaan mencari materi ujiannya. Materinya harus berhubungan dengan aktivitas ekonomi, seperti ayat dan hadis tentang perdagangan, pertanian, perindustrian, perbankan, akuntansi, manajemen, etika bisnis, dan sebagainya.

Masing-masing mahasiswa harus menghafal minimal 10 ayat dan 10 hadis tentang tema-tema di atas disertai dengan arti dan maksudnya.

**MATERI JURUSAN/PROGRAM STUDI**

**PERBANKAN SYARIAH**

**ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH**

**1.1. Pengantar**

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Rasulullah SAW yang dikenal julukan *al Amin*, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayyidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya1. dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh2.

Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak3.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di jaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untukmembayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir4.

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar5.

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di jaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (English: *credit*; Romawi : *credo*) yang diambil dari istilah *qard* (Arab). *Credit* dalam bahasa inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (English: *Check*; France : *Cheque*) yang diambil dari istilah *saq* (*suquq*). *Suquq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.

**1.2. Perbankan di Jaman Bani Abbasiyah**

Istilah bank memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Yang dikenal adalah istilah *jihbiz*. Kata *Jihbiz* berasal dari bahasa Persia yang berarti *penagih pajak*. Istilah jihbiz mulai dikenal di jaman Mu’awiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah.

Di jaman Bani Abbasiyah, *jihbiz* populer sebagai suatu profesi penukaran uang. Pada jaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Dengan munculnya fulus, timbul kecenderungan di kalangan para gubernur untuk mencetak fulusnya masing-masing, sehingga beredar banyak jenis fulus dengan nilai yang berbeda-beda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya profesi baru yaitu penukaran uang. Di jaman itu, *jihbiz* tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Bila di jaman Rasulullah SAW satu fungsi perbankan dilaksanakan oleh satu individu, maka di jaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi utama perbankan dilakukan oleh satu individu *jihbiz*.

**1.3. Bolehkah Praktek Perbankan atau Jihbiz ?**

Dalam urusan muamalat**, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya**. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul di mana belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadist yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit.

Begitu pula Islam menyikapi perbankan atau *jihbiz*. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Nah, dalam praktek perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktek bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Dari definisi riba, sebab (*illat*) dan tujuan (*hikmah*) pelarangan riba, maka dapat diidentifikasi bahwa praktek perbankan konvensional tergolong riba. Riba *fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. Riba *nasi’ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan/deposito/giro. Riba jahiliyah dapat ditemui dalam transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.

Jelaslah bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah :

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*)
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*)
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiah*).

**1.4. Jenis-jenis Riba di Perbankan**

Dalam ilmu fiqh dikenal tiga jenis riba yaitu:

1. Riba *Fadl*

Riba *Fadl* disebut juga riba *buyu* yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

Contoh berikut ini akan memperjelas adanya *gharar*. Ketika kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar, maka harta mereka diambil sebagai rampasan perang (ghanimah), termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya hidup kaum muslimin yang sederhana. Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasannya yang terbuat dari emas tersebut, yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas (dinar) dan uang yang terbuat dari perak (dirham). Jadi se-benarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, namun pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak .

Perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham (1 *uqiya*h) dijual oleh kaum muslimin kepada kaum Yahudi seharga dua atau tiga dirham, padahal nilai perhiasan perak seberat 1 uqiyah jauh lebih tinggi dari sekedar 2-3 dirham. Jadi muncul ketidakjelasan (*gharar*) akan nilai perhiasan perak dan nilai uang perak (dirham).

Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW mencegahnya dan bersabda: “Dari Abu Said al-Khdri ra, Rasul SAW bersabda: Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; korma dengan korma harus sama takaran,timbangan dan tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan (tunai) kelebihannya adalah riba.” (Riwayat Muslim)

Di luar keenam jenis barang ini dibolehkan asalkan dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Rasul SAW bersabda:

"*Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham; satu sha dengan dua sha karena aku khawatir akan terjadinya riba (al-rama). Seorang bertanya : wahai Rasul: bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab N*abi *SAW "Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung*)."(HR Ahmad dan Thabra­ni).

Dalam perbankan, *riba fadl* dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).

b. Riba *Nasi’ah*

Riba *Nasi’ah* disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, ha­nya karena berjalannya waktu. *Nasi’ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba Nasi’ah* mun­cul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan an­tara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi *al ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya resiko (*al ghurmi*), hasil usaha (*al kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al ghunmu* dan *al kharaj* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada ke­mungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman (QS AI Hasyr, 18 dan QS Luqman, 34). Pertukaran kewajiban menanggung beban (exchange of liability) ini, dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain. Pendapat Imam Sarakhzi akan memperjelas hal ini.

*"Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut"* (Imam Sarakhsi dalam al-Mabsut, juz. Xll., hal. 109).

Dalam perbankan konvensional, riba nasi’ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro.

c. Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* adalah hutang yang dibayar melebihi dari po­kok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembali­kan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan6. Riba Ja­hiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah "*Kullu Qardin Jarra Manfa’ah Fahuwa Riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahan­nya, riba jahiliyah tergolong Riba Nasi ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong Riba Fadl. Tafsir Qurtuby menjelaskan:

*"Pada Zaman Jahiliyah para kreditur, apabila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur : "Lunaskan hu­tang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan” "Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewa­jiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru. "* (Tafsir Qurtubi, 2/1157).

Dalam perbankan konvensional, riba *jahiliyah* dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.

**1.5. Sesuai Syariahkah *Murabahah* Perbankan Syariah?**

*Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah me­mang tidak sama persis dengan definisi *murabahah* yang dike­nal dalam kitab-kitab fiqih. *Murabahah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi tsaman ajil / muajjal*).

Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *murabahah* yang melibatkan tiga pihak. Murabahah pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan penjual barang. *Murabaha*h kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi murabahah ini. Rukun murabahah pertama terpenuhi sempurna (ada penjual - ada pembeli, ada barang yang diperjual-belikan, ada ijab-kabul) demikian pula rukun murabahah kedua. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akad murabahah ini sah.

**1.6. Sesuai Syariahkah *Ijarah* Perbankan Syariah?**

*Ijarah* yang dilakukan oleh perbankan syariah memang tidak sama persis dengan definisi *ijarah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. *Ijarah* yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau cicilan (*bi tsaman ajil / muajjal*).

Sedangkan dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad *ijarah* yang melibatkan tiga pihak. *Ijarah* pertama di­lakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. *Ijarah* kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi ijarah ini. Rukun *ijarah* pertama terpenuhi sempurna (ada penyewa - ada yang menyewakan, ada jasa yang disewa­kan, ada ijab-kabul) demikian pula rukun ijarah kedua. Dengan demikian dapat dikatakan kedua akad ijarah ini sah.

**1.7. Sesuai Syariahkah *Mudharabah* Perbankan Syariah?**

*Mudharabah* yang dilakukan oleh perbankan syariah sama persis dengan definisi *mudharabah* yang dikenal dalam kitab-ki­tab fiqih. Bank bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul mal*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana terse­but digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang dise­pakati. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* - ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada *nisbah*, ada ijab-kabul). Dengan demikian dapat dikatakan akad mudharabah ini sah.

**MEKANISME DAN SISTEM OPERASI BANK SYARIAH**

**•Pertanyaan:**

Apakah nasabah investor (deposan) Bank Syariah mendapat imbalan bunga?

**• Jawab:**

Tidak, karena bank syariah tidak beroperasi berdasarkan sis­tem bunga.

**•Pertanyaan:**

Kalau begitu tidak memperoleh imbalan apa-apa?

**• Jawab:**

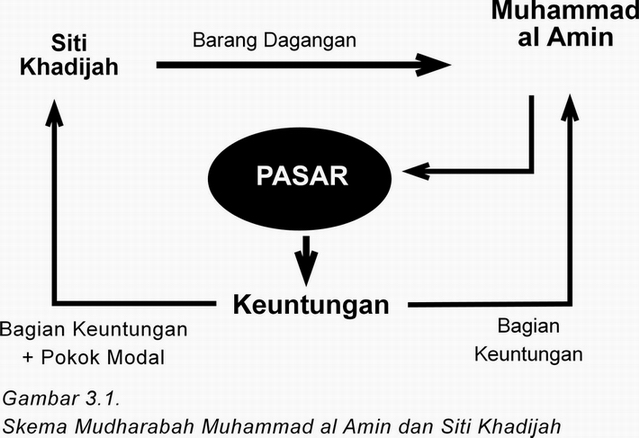
Dapat imbalan berupa bagi hasil.

**•Pertanyaan:**

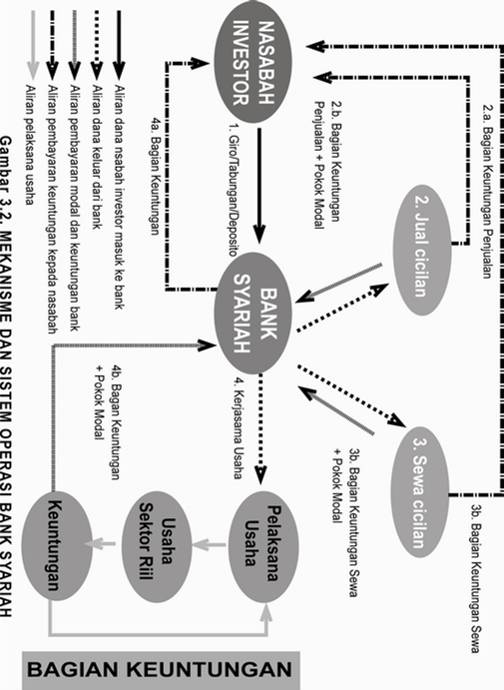
Apakah bagi hasil itu ? Bagaimana nasabah investor bisa memperoleh bagi hasil?

**• Jawab:**

Dulu Muhammad al Amin bermitra dengan Siti Khadijah r.a. dalam suatu usaha perdagangan seperti tertera dalam skema be­rikut ini:



Waktu itu Siti Khadijah r.a. menyer­ahkan modal berupa barang dagan­gan kepada Muhammad al Amin bin Abdullah. Oleh Muhammad al Amin barang-barang tersebut di­perjualbelikan di pasar. Keuntungan dari hasil usaha tersebut kemudian dibagi untuk Siti Khadijah ra dan Muhammad al Amin. Be­sarnya bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Inilah yang disebut dengan ba­gi hasil. Cara kerja tersebut ditiru oleh bank syariah.



**Keterangan gambar :**

1. Nasabah *investor* menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola
2. Bank melakukan penjualan cicilan
   1. Bank memberikan bagian keuntungan penjualan kepada nasabah
   2. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank
3. Bank melakukan sewa cicilan
   1. Bank memberikan bagian keuntungan penyewaan kepada nasabah
   2. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank
4. Bank melakukan kerjasama usaha
   1. Bank memberikan bagian keuntungan kerjasama usaha kepada nasabah
   2. Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank

Sistem ini memungkinkan nasabah *investor*, untuk mengawasi kinerja bank syariah secara langsung. Bila jumlah keuntung­an yang dihasilkan bank dari pembiayaan semakin besar, maka bagi hasil untuk nasabah *investor* juga semakin besar.

Sebaliknya jika bagi hasil yang diterima nasabah *investor* semakin kecil, maka hal itu disebabkan oleh menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Mengecilnya bagi hasil untuk nasabah *investor* dalam waktu yang cukup lama merupakan pertanda bahwa bank syariah yang bersangkutan semakin tidak efisien. Ini merupakan peringatan dini *(early warning system)* bagi nasabah *investor* secara transparan akan kinerja bank syariah yang dipercayainya mengelola da­na.

Pada bank dengan sistem bunga, nasabah deposan tidak dapat mengetahui kinerja keuangan bank dari indikasi bunga yang diperoleh karena tiap bulan memperoleh bunga yang besarnya tetap. Jadi dalam perbankan konvensional, nasabah tidak dapat mengetahui secara dini dan transparan kinerja bank.

**Pertanyaan:**

Apakah ada kemungkinan bagi hasil untuk nasabah investor negatif?

**Jawab:**

Pengelolaan yang buruk akan menyebabkan bank syariah mengalami kerugian. Dalam hal bank syariah mengalami kerugian, maka dapat terjadi dua hal. Pertama, bila dalam akad disepakati yang dibagihasilkan adalah *profit* (pendapatan dikurangi biaya), maka secara teoritis ada kemungkinan terjadi bagi hasil negatif. Kedua, bila dalam akad disepakati yang dibagihasilkan adalah pendapatan, maka tidak mungkin terjadi bagi hasil negatif. Paling buruk hanyalah bagi hasil nol. Itu pun hanya terjadi bila pendapatan bank nol.

**Pertanyaan:**

Nasabah suatu bank syariah jumlahnya ribuan, bahkan mungkin jutaan. Nilai nominal tiap rekening juga ber-beda-beda dan berfluktuasi. Lalu bagaimana bagi hasil didistribusikan ke dalam tiap rekening tersebut

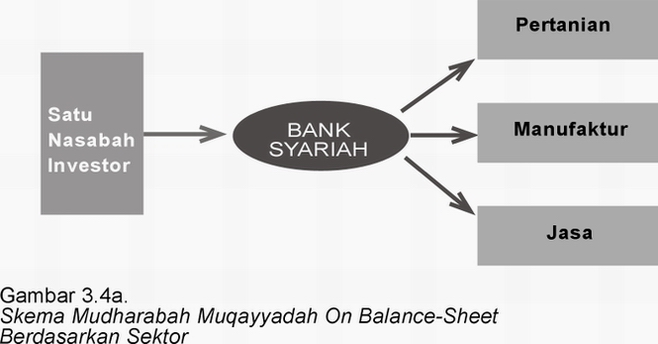
**Jawab:**

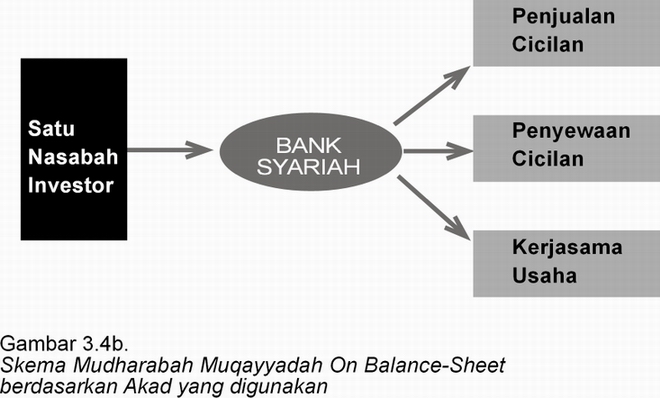
Terdapat tiga skema aliran dana dari nasabah *investor* kepada bank. Pertama, dari satu nasabah *investor* kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut *debitur*). Dalam skema ini bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara *off balance sheet*. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah *investor* dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah *investor* dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini dikenal dengan nama *mudharabah-muqayyadah off balance-sheet.* Disebut *mudharabah* karena skemanya bagi hasil, *muqayyadah* karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan *off balance-sheet* karena tidak dicatat dalam neraca bank, hanya dicatat dalam rekening administratif saja. Hal ini digam­barkan pada gambar 3.



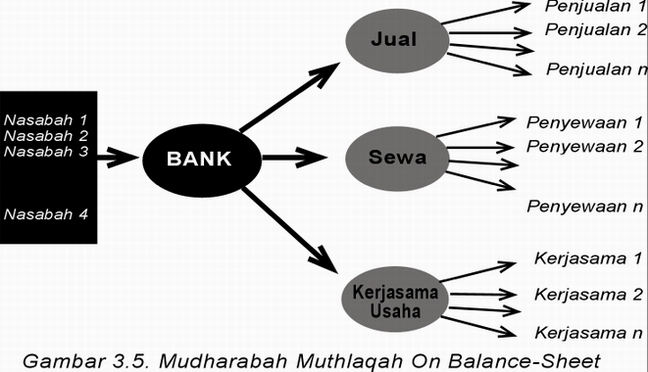
**Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance-Sheet**

Kedua; aliran dana dapat terjadi dari satu nasabah *investor* ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terba­tas, misalnya: pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah *invest­or* lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah *investor* dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan; misal­nya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja; atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini membuat bank terlibat dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet.* Disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank. Skema bagi hasilnya mengikuti Gambar 4a. Nisbah bagi hasil disepakati antara nasabah *investor* dan bank.





Ketiga, dari seluruh nasabah *investor* kepada bank tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan. Nasabah *investor* memberikan kebe­basan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur se­luruh aliran dana; termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor. Skema ini disebut *mudhara­bah muthlaqah on balance-sheet.*

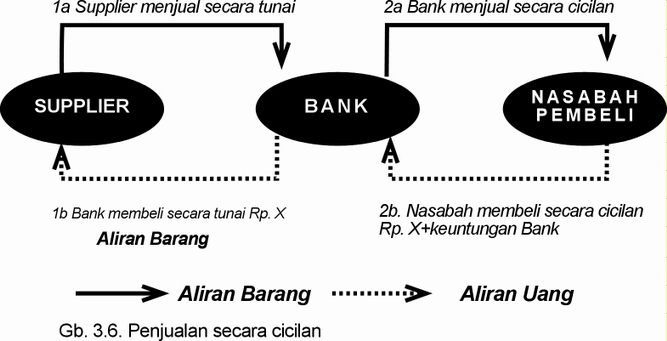
****

**Pertanyaan :**

Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi penjualan secara cicilan?

**Jawab:**

Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah pembeli secara tunai, kemudian menjualnya kepada nasabah pembeli secara cicilan. Gambar 6 ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.

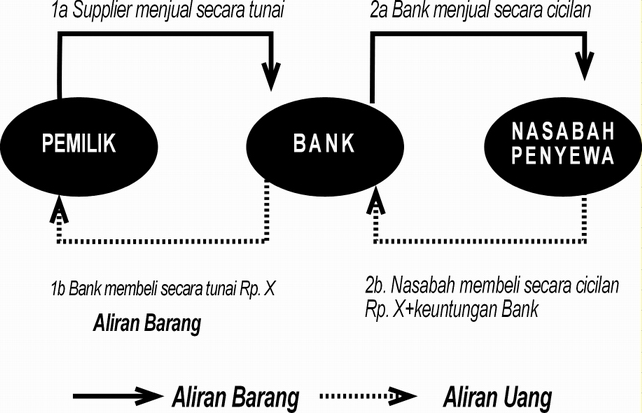


**Pertanyaan :**

Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi peyewaan secara cicilan?

**Jawab:**

Bank menyewa jasa yang diinginkan nasabah penyewa secara tunai, kemudian enyewakannya kepada nasabah penyewa secara cicilan. Gambar 7 ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.



**Pertanyaan:**

Bagaimana mekanisme bank melakukan transaksi penyewaan secara cicilan, bila kemudian nasabah penye­waan itu ingin memiliki pada akhir masa penyewaan?

**Jawab:**

Bank melakukan pembelian barang yang diinginkan nasabah pembeli secara tunai, kemudian menyewakannya kepada nasabah penyewa secara cicilan. Pada akhir masa penyewaan, bank menjual barang tersebut kepada nasabah penyewa. Penjualan ini dapat dilakukan secara tunai, atau secara cicilan. Gambar 8 ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.



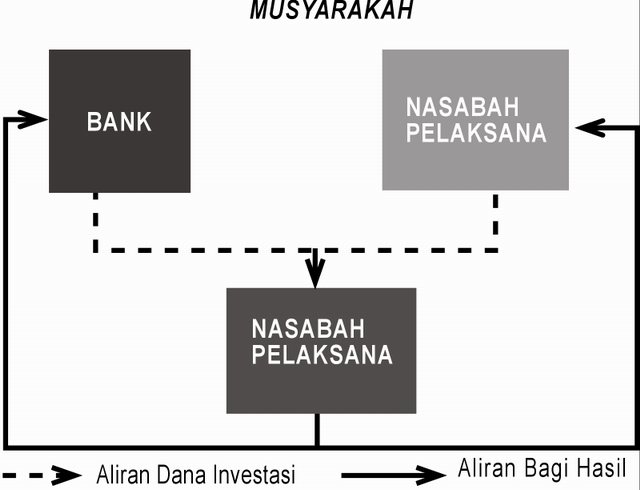
**Pertanyaan:**

Bagaimana mekanisme bank melakukan trans­aksi kerjasama usaha?

**Jawab:**

Bank melakukan penyertaan modal dalam usaha kerjasama dimaksud. Bank dan pelaksana usaha menyepakati nisbah bagi hasilnya, untuk kemudian bank dan pelaksana usaha akan ber­bagi hasil atas hasil usaha kerjasama tersebut. Gambar 9 ini dapat memperjelas mekanisme tersebut.



****

**PRODUK PERBANKAN SYARIAH**

**P**roduk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberi­kan perbankan kepada nasabahnya.

**3.1. Penyaluran Dana**

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah, salam, dan istishna* serta produk yang mengguna­kan prinsip sewa yaitu *ijarah.* Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank di­tentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prin­sip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk per­bankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adaiah *musyara­kah* dan *mudharabah.*

**3.1.1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)**

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menja­di bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:

**a. Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah bi tsaman ajil* atau lebih dikenal sebagai *muraba­hah. Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di­tambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan da­lam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

**b. *Salam***

*Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diper­jualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam trans­aksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan bar­ang harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasa­bah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjual­nya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridg­ing financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berla­kunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum *Salam*:

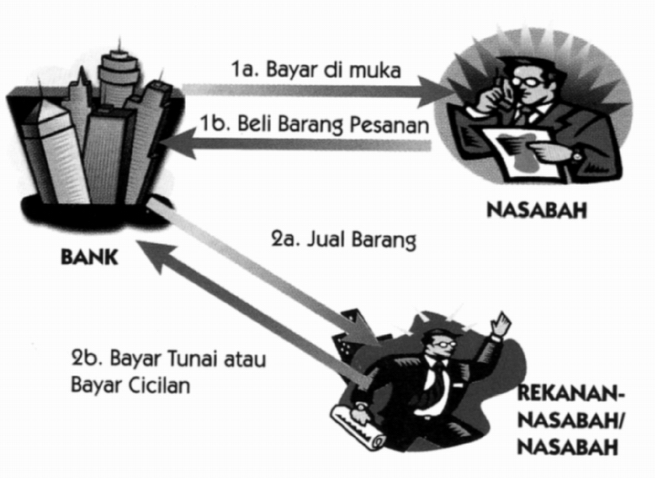
* Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
* Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
* Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau di­pesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel *salam*.

**c. *Istishna***

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (­termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syar­iah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

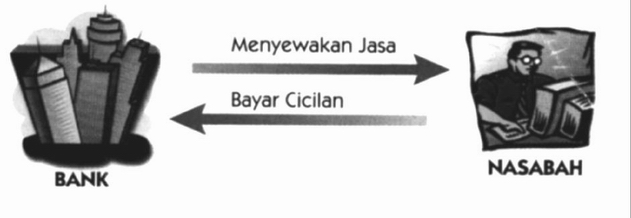
Ketentuan umum:

* Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati di­cantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah sela­ma berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pe­sanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditang­gung nasabah.

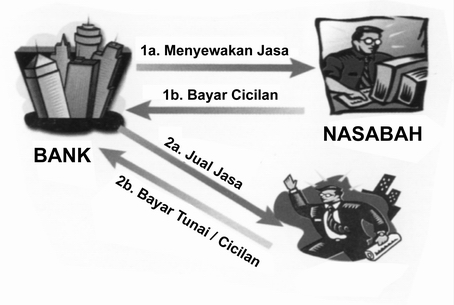


**3.1.2. Prinsip Sewa (Ijarah)**

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahaan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.



Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perban­kan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang dii­kuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.



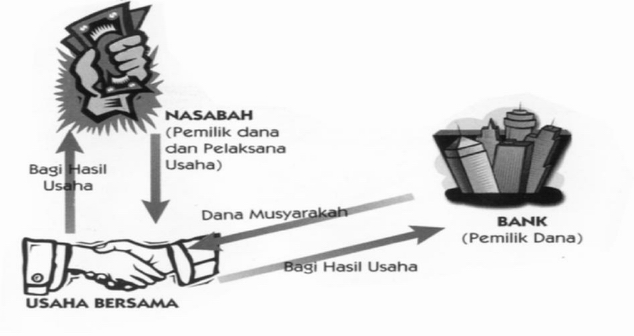
**3.1.3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)**

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:

**a. *Musyarakah***

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarika*h atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyara­kah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara ber­sama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah se­mua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dima­na mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasa­ma dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) , atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.



Ketentuan umum:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal ber­hak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindak­an seperti:

* Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
* Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
* Memberi pinjaman kepada pihak lain.
* Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau di­gantikan oleh pihak lain.
* Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:

¥ Menarik diri dari perserikatan

¥ Meninggal dunia,

¥ Menjadi tidak cakap hukum

* Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
* Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana terse­but bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

**b. *Mudharabah***

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudhara­bah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dima­na pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama de­ngan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul* *maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab un­tuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan se­bagai wakil shahibul maal dia diharapkan untuk mengelola mo­dal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah modal ha­nya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah mo­dal berasal dari dua pihak atau lebih. musyarakah dan mudhar­abah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak ha­rus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan me­rusak ajaran Islam.



Ketentuan umum

* Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
* Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:

¥ (Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)

¥ (Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)

* Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyeleweng-an, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
* Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewa­jiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

***Mudharabah Muqayyadah***

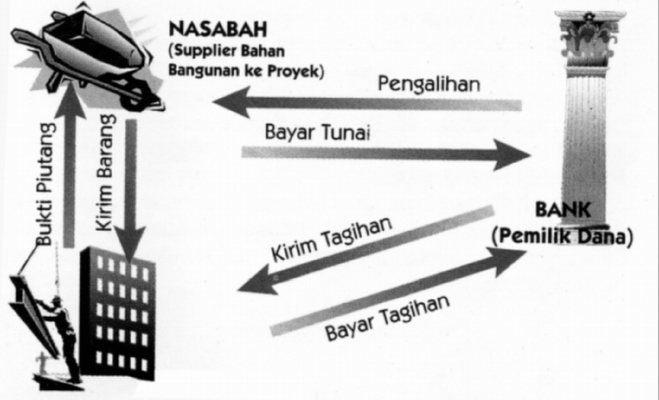
Karakteristik mudharabah *muqayadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pa­da adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan per­mintaan pemilik modal.

**3.1.4. Akad Pelengkap**

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya di­perlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mem­permudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diboleh­kan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan un­tuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini seke­dar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

**a. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)**

*Hiwalah* adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat me­lanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seo­rang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.



**b. *Rahn* (Gadai)**

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pem­bayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

* Milik nasabah sendiri.
* Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
* Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka ke­lebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi keku­rangannya.

**c. *Qardh***

*Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran. Biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum ke­berangkatannya ke haji.

Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengem­balikannya sesuai waktu yang ditentukan.

Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.

Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank me­nyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya se­cara cicilan melalui pemotongan gajinya.

**d. *Wakalah* (Perwakilan)**

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apa­bila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah,* atau *musyakarah.*

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tang­gung jawab nasabah.

Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-­masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali dengan seizin nasabah.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan ha­rus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama.

Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

**e. *Kafalah* (Garansi Bank)**

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mem­persyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana un­tuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

**3.2. Produk Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi ah* dan *mudharabah.*

**3.2.1. Prinsip *Wadiah***

Prinsip *Wadi’ah* yang diterapkan adalah *wadi ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi’ah* *dhamanah* berbeda dengan *wadi’ah amanah*. Dalam *wadi’ah* *amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi’ah* *dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

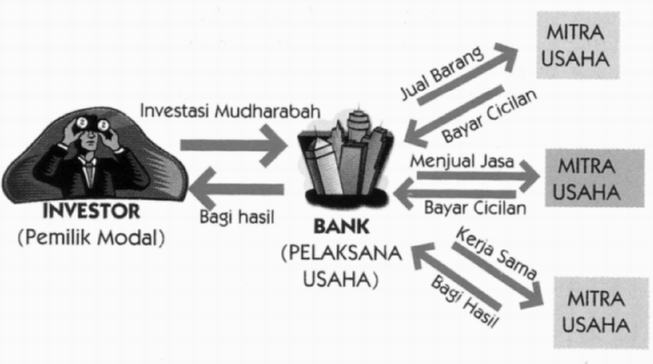
Karena *wadi’ah* yang diterapkan dalam produk giro perban­kan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak seba­gai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah SAW'.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

* Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai sua­tu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
* Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
* Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
* Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

**3.2.2. Prinsip *Mudharabah***

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut diguna­kan bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana terse­but digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudhara­bah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk mela­kukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi2. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* - ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip *mud­harabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.



Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi tiga yaitu:

**a. *Mudharabah* *mutlaqah***

Penerapan *mudharabah* *mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berda­sarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

* Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan; maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
* Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
* Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
* Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti de­posito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpan­jangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
* Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

**b. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet***

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restrict­ed investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat­-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disya­ratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digu­nakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

* Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus di­ikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyarat­an penyaluran dana simpanan khusus.
* Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
* Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
* Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

**c. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet***

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank ber­tindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan an­tara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pe­laksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

* Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
* Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
* Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.



**3.2.3. Akad Pelengkap**

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana, bia­sanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini ti­dak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan un­tuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluar­kan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

***Wakalah* (Perwakilan)**

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melaku­kan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

**3.3. Jasa Perbankan**

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

**3.3.1. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)**

Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahan­nya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

**3.3.2. *ljarah* (Sewa)**

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

**SISTEM DAN PERHITUNGAN**

**4.1 Dari Sudut Pandang Nasabah Investor**

**Pertanyaan 1. :**

Bila nasabah investor melakukan investasi dengan akad mudharabah muqayyadah off balance sheet bagaimana cara penghitungan bagi hasilnya?

**Jawab 1. :**

Dalam skema ini bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara off balance sheet. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepaka­tan antara nasabah investor dan pelaksana usaha. Bank hanya memperoleh arranger fee.

Misalnya, seorang nasabah investor ingin berinvestasi sebesar Rp 10 milyar, dan disepakati nisbah bagi hasil antara inves­tor dengan pelaksana usaha sebesar 35:65. Karena bank ha­nya bertindak sebagai arranger, maka tidak ada dana bank yang digunakan. Katakan pula, pada akhir bulan, pendapatan dari usaha yang dibiayai sebesar Rp 160 juta. Bagi hasil inves­tasi nasabah investor dapat dihitung dengan sistem berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jumlah Dana Nasabah Investor | A | 10.000.000.000 |
| Dana bank  Pembiayaan yang disalurkan = A+B  Pendapatan dari usaha yang dibiayai | B  C  D | 0  10.000.000.000  160.000.000 |
| Nisbah bagi hasil nasabah | G | 0,35 |
| Porsi bagi hasil untuk nasabah investor  **H = (D x G)** | H | 56.000.000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Data diasumsikan |  | Hasil Perhitungan |

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah/in­vestor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 56.000.000 sebelum pajak.

**Pertanyaan 2. :**

Bila nasabah investor melakukan investasi dengan akad mudharabah muqayyadah on balance sheet bagaimana cara penghitungan bagi hasilnya?

**Jawab 2. :**

Satu nasabah investor dapat menyalurkan dananya ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, mi­salnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lain­nya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor-sektor pertambangan, properti, dan per­tanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misal­nya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja.

Misalnya seorang nasabah investor ingin berinvestasi di sek­tor perdagangan sebesar Rp 100 juta. Total dana mudharabah yang ingin diinvestasikan di sektor perdagangan sebesar Rp 90 milyar. Namun tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia (GWM = giro wajib minimum). Katakanlah bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar Rp 14,5 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk sektor perdagang­an sebesar Rp 100 milyar. Katakanlah, disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah investor 50 : 50. Pada akhir bu­lan, sektor perdagangan yang dibiayai menghasilkan pendapat­an sebesar Rp 1,6 milyar. Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jumlah seluruh dana nasabah investor | A | 900.000.000.000 |
| Jumlah dana nasabah investor yang dapat disalurkan untuk pembiayaan = *A x (1-GWM)* | B | 85.500.000.000 |
| Dana bank dalam pembiayaan proyek | C | 14.500.000.000 |
| Pembiayaan yang diperlukan | D | 100.000.000.000 |
| Pendapatan dari penyaluran pembiayaan  Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor | E  F | 1.600.000.000  15,20 |
| F = |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data diasumsikan |  | Hasil Perhitungan |  |

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp 1000 dana nasabah/investor yang digunakan untuk pembiayaan. Angka ini (pada tabel tersebut sebesar Rp 15,20) ke­mudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor | F | 15,20 |
| Saldo rata-rata harian  Nisbah nasabah | G  H | 100.000.000  50,00 |
| Porsi bagi hasil untuk nasabah | I | 988,000 |
| I = F | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Data diasumsikan |  | Hasil Perhitungan |

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah/investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 760.000 sebelum pajak.

**Pertanyaan 3. :**

Bila nasabah investor melakukan investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* bagaimana cara penghitungan bagi hasilnya?

**Jawab 3. :**

Seluruh nasabah investor kepada bank tanpa ada pembatas­an tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana, termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor.

Misalnya seorang nasabah investor ingin melakukan investasi dengan cara ini sebesar Rp 100 juta, sedangkan total dana nasabah investor yang ingin investasi dengan cara ini sebesar Rp 900 milyar. Namun tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana terse­but sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia (GWM = giro wajib minimum). Katakanlah bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar Rp 145 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan dana bank untuk investasi sebesar Rp 1000 milyar. Katakanlah, disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah investor 35 : 65. Pada akhir bu­lan, investasi yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar Rp 16 milyar.

Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jumlah seluruh dana nasabah investor | A | 900.000.000.000 |
| Jumlah dana nasabah investor yang dapat disalurkan untuk pembiayaan = *A x (1-GWM)* | B | 855.000.000.000 |
| Dana bank | C | 145.000.000.000 |
| Pembiayaan yang disalurkan = B + C | D | 1.000.000.000.000 |
| Pendapatan dari penyaluran pembiayaan  Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor | E  F | 16.000.000.000  15,20 |
| F = |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data diasumsikan |  | Hasil Perhitungan |  |

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp1000 dana nasabah/investor yang digunakan untuk pembiayaan. Angka ini (pada tabel tersebut sebesar Rp 15,20) kemudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendapatan dari setiap Rp 1.000 dana nasabah/investor | F | 15,20 |
| Saldo rata-rata harian  Nisbah nasabah | G  H | 100.000.000  65,00 |
| Porsi bagi hasil untuk nasabah | I | 988,000 |
| I = F | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Data diasumsikan |  | Hasil Perhitungan |

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh nasabah/Inves­tor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp 988.000 sebelum pajak.

**4.2. Dari Sudut Pandang Bank**

**4.2.1. Perhitungan dengan Saldo Akhir Bulan**

Bagi bank, keseluruhan dana yang dikelolanya akan dipilah-­pilah sesuai jenisnya. Katakanlah bank mengelompokkannya menjadi giro, tabungan, deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Maka bank dapat menggunakan tabel ini sebagai alat bantu.

Kolom 1 adalah saldo akhir bulan masing-masing jenis dana. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia (GWM), dan biasanya bank juga memperhitungkan adanya kelebihan cadangan yang disimpannya di atas kewajibannya yang 5% tersebut, juga memperhitungkan adanya dana-dana yang ditarik-setor oleh nasabah investor (floating). Ketiga kom­ponen ini menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2. Kolom 3 adalah saldo yang benar-benar dapat diinves­tasikan oleh bank. Kolom 4 adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh bank ke dalam masing-masing jenis dana.Kolom 5 adalah nisbah nasabah investor. Dengan mengalikan kolom 4 dan kolom 5, maka didapat bagian pendapatan nasa­bah untuk masing-masing jenis dana. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil kepada tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase yaitu pada kolom 7.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis | Saldo Akhir Bulanan  1 | Bobot\*  2 | Saldo Tertimbang\*  3 = 1 x 2 | Distribusi Pendapatan Per Jenis  4 | Nisbah Nasabah  5 | Bagian Pendapatan Nasabah  6 = 4 x 5 | Rate (%) Pendapatan Nasabah |
| Giro  Tabungan  Dep. 1  Dep. 3  Dep. 6  Dep. 12 | 1A  1B  1C  1D  1E  1F | 2A  2B  2C  2D  2E  2F | 3A  3B  3C  3D  3E  3F | 4A  4B  4C  4D  4E  4F | 5A  5B  5C  5D  5E  5F | 6A  6B  6C  6D  6E  6F | 7A  7B  7C  7D  7E  7F |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*catatan :*

*\* Bobot = 1 - (GWM + Excess Reserve + Floating)*

*\*\* Dalam Bank konvensional, Saldo tertimbang dikenal sebagai loanable funds*

**5.2.2. Perhitungan dengan Saldo Rata-rata Harian**

Bank dapat pula menghitung berdasarkan saldo rata-rata harian sebagai berikut.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis | Saldo Akhir Bulanan  1 | Bobot\*  2 | Saldo Tertimbang\*  3 = 1 x 2 | Distribusi Pendapatan Per Jenis  4 | Nisbah Nasabah  5 | Bagian Pendapatan Nasabah  6 = 4 x 5 | Rate (%) Pendapatan Nasabah |
| Giro  Tabungan  Dep. 1  Dep. 3  Dep. 6  Dep. 12 | 1A  1B  1C  1D  1E  1F | 2A  2B  2C  2D  2E  2F | 3A  3B  3C  3D  3E  3F | 4A  4B  4C  4D  4E  4F | 5A  5B  5C  5D  5E  5F | 6A  6B  6C  6D  6E  6F | 7A  7B  7C  7D  7E  7F |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Catatan :

“Bobot = 1 – GWM” Karena digunakan saldo rata-rata harian, maka nilai ini telah menggambarkan saldo yang mengendap. Bobot dihitung hanya dengan GWM sebagai faktor pengurang.

Kolom 1 adalah saldo rata-rata harian bulan bersangkutan masing-masing jenis dana. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia (GWM). Karena penghitung­annya telah menggunakan saldo rata-rata harian, maka nilai ini telah merefleksikan saldo yang mengendap di bank yang dapat digunakan oleh bank untuk melakukan investasi. Jadi hanya komponen GWM saja yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2. Kolom 3 adalah saldo yang be­nar-benar dapat diinvestasikan oleh bank. Kolom 4 adalah pen­distribusian pendapatan yang diperoleh oleh bank ke dalam masing-masing jenis dana. Kolom 5 adalah nisbah nasabah in­vestor. Dengan mengalikan kolom 4 dan kolom 5, maka didapat bagian pendapatan nasabah untuk masing-masing jenis dana. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil kepada tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pa­da kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase yaitu pada kolom 7¥

**MATERI JURUSAN/PROGRAM STUDI**

**EKONOMI SYARIAH**

1. **Konsep Dasar Ekonomi Islam**
   1. Defenisi Ekonomi Islam

Dalam pembahasan ekonomi Islam bahwa sesungguhnya fondasi ekonomi Islam berlandaskan kepada akidah Islam yang bermuara kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Oleh kerena itu berbagai termionologi dan subtansi ekonomi yang sudah ada (Kapitalist) harus dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islam. Berikut diutarakan beberapa pengertian ekonomi Islam beberapa pemikir ekonomi Islam, diantaranya:

* Menurut Mannan (1993) Ekonomi Islam Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
* Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat, dalam perspektif Islam (Khurshid Ahmad)
* Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah disamping alasan dan pengalaman. (N.Siddiqi))
* Hasanuz Zaman, Ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah perintah *(injuctions)* dan tata cara *(rules)* yang ditetapkan oleh syari’ah, dalam rangka mencegah ketidak-Adilan dalam penggalian dan penggunaan sumberdayamaterial guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban meraka kepada Allah dan masyarakat”.
* Sementara ilmuwan Islam kontemporer Fahim Khan (2000), ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan berdasarkan prinsip al-Qur’an dan Sunnah.
* Ilmu ekonomi ada,\_Karena manusia menghadapi keterbatasan ketersediaan sumber daya yang tersedia, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, dalam hal ini muncul *scarcity*. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip nilai al-Qur’an & hadis.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, kita dapat munculkan suatu pertanyaan apakah ilmu ekonomi Islam bersifat positif atau normatif? Sebagaimana diungkapkan Umar Chapra, bahwa Ekonomi Islam jangan terjebak pada dikotomi pendekatan positif dan normatif. Karena sesungguhnya pendekatan itu saling melengkapi dan bukan saling menafikan. Sedangkan Mannan mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ekonomi positif dan normatif. Jika ada kecenderungan beberapa ekonom yang sangat mementingkan positivisme dan sama sekali tidak mengajukan pendekatan normatif atau sebaliknya. Tentu sangat disayangkan.

* 1. Prinsip dasar Ekonomi Islam

1. Prinsip Tawheed dan Persaudaraan *(Brotherhood)*

Prinsip ekonomi Islam tentang Tawheed dan Persaudaraan, mungkin tidak akan pernah dijumpai dalam sudut pandang analisa ekonomi konvensional (kapitalist) karena semangatnya bertumpu pada materialisme, harta kekayaan dan bersifat eksploitatif.

M. A. Choudhury, melalui analisis religiusnya menyatakan bahwa Prinsip Tawhid dan Brotherhood memiliki arti bahwa ekonomi Islam bertumpu pada kepercayaan Allah SWT *Yang Gaib*. Oleh karena itu seseorang pasti merasa dilihat dan diawasi oleh *kekuatan Gaib*. Karena aktifitasnya dikontrol eleh Tuhan, maka setiap aktifitasnya sarat dengan prinsip moral. Prinsip-prinsip spritual ini, diterapkan pada urusan keduniaan, serta dengan sikap persaudaraan diantara kaum Muslimin dapat saja, membantu umat Islam melawan keterbelakangan.

Lebih lanjut Tawheed Secara harfiah berarti kesatuan unit dalam kaitan dengan ekonomi, hal ini sangat penting dari keseluruhan inti sari Ekonomi Islam, di dalamnya tersirat -memberi pengajaran kepada manusia bagaimana cara berhubungan dan berhadapan dengan sesama manusia. Serta merasakan kehadiran Tuhan tatkala aktif melakukan aktifitas ekonomi berdasar pada suatu mekanisme pertukaran yang mempertemukan para penjual dan pembeli suatu produk *(market-excange),* alokasi sumber daya, maksimalisasi kegunaan dan laba, adalah suatu pokok lebih *truth*  pada keadilan.

Di dalam Islam kapasitas untuk memahami dan membagikan keadilan ini berasal dari pengetahuan dan praktek dari prinsip yang terkandung dalam Quran itu. Dengan cara ini prinsip tawheed dan Persaudaraan menghubungkan tugas-tugas hubungan manusia dengan sesamanya *(hablun min al-nas)* dengan hubungan manusia dengan Tuhannya *(hablun min Allah)*. Di dalam terminologi yang lebih praktis, subtansi tawheed dan Persaudaraan terletak di dalam kerjasama dan persamaan. Hal ini terkandung dalam al-Quran; *“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

1. Prinsip Kerja (work) dan Produktivitas

M. A. Choudhury selanjutnya, mencantumkan *Work and Productivity* sebagai Prinsip dasar yang kedua dalam Ekonomi Islam, merupakan sebagai kompensasi dalam pembentukan kerja. Faktor Produktifitas dan Tenaga kerja adalah suatu hal yang mesti saling terkait, karena produktifitas lahir dari dari usaha manusia yaitu tenaga kerja. Negara berperan mengenai ketenaga-kerjaan dalam suatu negara, aspek upah perorangan harus disesuaikan kategori dan jumlah tenaga kerja yang dilakukan oleh dia. Jumlah tenaga kerja akan diukur di dalam tempat bekerja, katakanlah, profesi pekerjaan dan kategori tenaga kerja akan dikhususkan untuk profesi berbeda *(profesionality orientied)*.

Bekerja dengan melakukan membuka usaha sendiri *(soleproprietorship)* berarti kita melibatkan diri dalam proses produksi, yaitu proses menghasilkan barang dan jasa. Oleh karenannya, gagasan ekonomi Islam menjaga bahwa pada dasarnya semua alat-alat produksi kepunyaan Tuhan, maka inilah pijakan dasar, dan jangan sampai melewati batas dengan melakukan suatu ekploitasi dan eksploirasi yang berlebihan, yang dapat merusak lingkungan.

1. Prinsip Distributional Equity (distribusi kekayaan)

Prinsip ini yang ketiga prinsip Ekonomi Islam yang utama adalah hak masyarakat miskin untuk mendapat hak miliknya melalui institusi zakat. Sebagai bagian dari skema sosial dalam masyrakat Islam maka selayaknya institusi zakat diatur dalam lembaga negara, agar kridibel dan mempunyai force terhadap pemerataan kekayaan. Seorang kepala negara dengan pendapatan negara melalui transfer pembayaran menggunakan untuk tujuan untuk mendistribusikan kekayaan, ini diatur dalam Ekonomi Islam adalah zakah (*pajak atas kekayaan yang mencapai nisab tertentu),* shadaqah *( mendermakan harta),* ghanimah, fai, kharaj *( pajak atas negeri yang dikalahkan selama peperangan).* Ushr *(zakat tanaman).*

* 1. Tujuan Ekonomi Islam

1. Secara umum: kesejahteraan ekonomi yang mendukung kesejahteraan seluruh aspek untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Secara khusus:

* Memenuhi kebutuhan pokok: pangan, sandang, perumahan, pengobatan, dan pendidikan bagi semua manusia;
* Memastikan kesempatan yang sama bagi semua orang;
* Mencegah konsentrasi kekayaan dan mengurangi ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan;
* Memastikan setiap orang bebas untuk melakukan moral yang tinggi;
* Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang disebutkan di atas.
  1. Metodologi Ekonomi Islam
* Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dgn cara-cara tertentu secara sistematis yang disebut Metodologi.
* Dalam perkembangan ilmu ekonormi Islam selama ini, metodologi yang dikembangkan dalam ekonomi Islam pendekatan Fiqhi muamalah dan pendekatan ekonomi Islam. ekonomi Islam dikembangkan oleh para pemikir ekonomi melalui pendekatan fiqhi dan pendekatan filosofi. Sementara para pemikiran ekonomi Islam kontemporer dengan mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia berkaitan dengan produksi, distribusi, dan kunsumsi dalam masyarakat muslim. Salah satu anggapan keliru selama ini karena pembedaan antara fiqh muamalah dan ekonomi Islam merupakan anggapan keliru konsep dalam literatur ekonomi Islam.
* Dalam mengembangkan ekonomi Islam menggunakan dua macam metode: yaitu metode deduksi dan pemikiran *retrospektif*. Metode pertama dikembangkan ahli ekonomi Islam dan *fuqaha.* Metode deduktif diaplikasikan terhadap ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya berdasarkan sumber utamanya al-Qur’an dan al-Sunnah. Sementara metode *retrospektif* digunakan pemikir Muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai macam pemecahan terhadap persoalan ekonomi umat Islam dengan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujuinya dengan memperhatikan petunjuk Tuhan.
  1. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu:

 Tahapan Pertama:

Dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan kapitalis. Mereka mengundang para ekonom dan banker untuk saling bahu membahu mendirikan lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan bukan pada bunga. Yang menonjol dalam pendekatan ini adalah keyakinan yang begitu teguh haramnya bunga bank dan pengajuan alternatif. Masa ini dimulai kira-kira apada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan bank Islam lokal yang beroperasi bukan pada bunga. Sementara itu di Mesir juga didirikan lembaga keuangan yang beroperasi bukan pada bunga pada awal dasawarsa 1960-an. Lembaga keuangan ini diberi nama *Mit Ghomir Local Saving* yang berlokasi di delta sungai Nil, Mesir. Tahapan ini memang masih bersifat prematur dan coba-coba sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya.

Tahapan kedua:

Dimulai pada akhir dasa warsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, ekonom baik muslim maupun non-muslim. Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1976 yang disusul kemudian dengan konferensi internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional yang baru di London pada tahun 1977. Setelah itu digelar dua seminar yang bertajuk Ekonomi Moneter dan Fiskal dalam Islam di Makkah pada tahun 1978 dan di Islamabad pada tahun 1981. Kemudian diikuti lagi oleh konferensi tentang Perbankan Islam dan Strategi kerja sama ekonomi yang diadakan di Baden-Baden, Jerman pada tahun 1982 yang kemudian diikuti Konferensi Internasional Kedua tentang Ekonomi Islam di Islamabad pada tahun 1983. Belasan buku dan monograf telah diterbitkan semenjak konferensi dan seminar ini digelar yang berhasil memberikan gambaran yang lebih terang tentang Ekonomi Islam baik dalam teori maupun praktek. Menurut Khurshid Ahmad, kontribusi yang paling signifikan selain dari hasil-hasil konferensi dan seminar tadi adalah laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Ideologi Islam Pakistan tentang penghapusan riba dari ekonomi. Laporan ini tidak saja menjelaskan tentang hukum bunga bank yang telah ditegaskan haram oleh ijma’ para ulama masa kini, tetapi juga memberikan pedoman bagaimana menghapuskan riba dari perekonomian. Pada tahapan kedua ini muncul nama-nama ekonom muslim terkenal di seluruh dunia Islam anatara lain Prof. Dr. Khurshid Ahmad yang dinobatkan sebagai bapak ekonomi Islam, Dr. M. Umer Chapra, Dr. M. A. Mannan, Dr. Omar Zubair, Dr. Ahmad An-Najjar, Dr. M. Nejatullah Siddiqi, Dr. Fahim Khan, Dr. Munawar Iqbal, Dr. Muhammad Ariff, Dr. Anas Zarqa dan lain-lain. Mereka adalah ekonom muslim yang dididik di Barat tetapi memahami sekali bahwa Islam sebagai *way of life* yang integral dan komprehensif memiliki sistem ekonomi tersendiri dan jika diterapkan dengan baik akan mampu membawa umat Islam kepada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.

Tahapan ketiga:

Tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Bank Islam ini merupakan kerjasa sama antara negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tidak lama kemudian disusul oleh Dubai Islamic Bank. Setelah itu banyak sekali bank-bank Islam bermunculan di mayoritas negara-negara muslim termasuk di Indonesia.

Tahap keempat:

Ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan sophisticated untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Menurut Irfan Syawqy, secara faktual, pasar modal telah menjadi *financial nerve-centre* (saraf finansial dunia, Red) dunia ekonomi modern. Bahkan, perekonomian modern tidak akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan baik. Setiap hari terjadi transaksi triliunan rupiah melalui institusi ini. Sampai tahun 1970, sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal. Hal ini disebabkan karena larangan Islam pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Untuk memenuhi kepentingan pemodal yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, maka disejumlah bursa Efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

* 1. Perbandingan Sistem Ekonomi Islam, Kapitalis dan Sosialis.

Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain.

Pada saat ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi negara-negara di dunia. Meskipun demikian secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sistem-sistem yang lain seperti *welfare state, state capitalism, market socialisme, democratic sosialism* pada dasarnya bekerja pada bingkai kapitalisme dan sosialisme.

a. Sistim Ekonomi Kapitalis

1. Sejarah Kapitalisme

Sistem ekonomi kapitalis diawali dengan terbitnya buku *The Wealth of Nation* karangan Adam Smith pada tahun 1776 M. Pemikiran Adam Smith memberikan inspirasi dan pengaruh besar terhadap pemikiran para ekonom sesudahnya dan juga pengambil kebijakan negara.

Lahirnya sistem ekonomi kapitalis, sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkembangan pemikiran dan perekonomian benua Eropa pada masa sebelumnya. Pada suatu masa, di Benua Eropa pernah ada suatu zaman dimana tidak ada pengakuan terhadap hak milik manusia, melainkan yang ada hanyalah milik tuhan yang harus dipersembahkan kepada pemimpin agama sebagai wakil mutlak dari tuhan. Pada zaman tersebut yang kemudian terkenal dengan *sistem universalisme*. Sistem ini ditegakkan atas dasar keyakinan kaum agama “semua datang dari tuhan, milik tuhan dan harus dipulangkan kepada tuhan”.

Kemudian lahir pula golongan baru, yang mendekatkan dirinya pada kaum agama, yaitu kaum feodal. Mereka ini yang berkuasa di daerahnya masing-masing, lalu menguasai tanah-tanah dan memaksa rakyat menjadi hamba sahaya yang harus menggarap tanah itu. Sistem feodal hidup subur di bawah faham universalisme. Faham ini lebih terkenal dengan feodalisme. Jika kaum feodal memaksa rakyat bekerja mati-matian, maka kaum agama dengan nama Tuhan menghilangkan hak dari segala miliknya. Artinya kaum feodal yang bekerjasama dengan kaum agama, telah mempermainkan seluruh hak milik manusia untuk kepentingan mereka sendiri.

Gambaran yang dapat diperoleh dari zaman kaum agama dan feodal ialah manusia hidup seperti hewan, tidak mempunyai fikiran sendiri, tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri dan semuanya hanyalah kaum agama yang memilikinya. Inilah suatu kesalahan besar yang pernah diperbuat oleh kaum agama di benua Eropa. Dan pada gilirannya seluruh masyarakat Eropa berontak dan mengadakan perlawanan menentang kaum agama dan feodal. Pecahlah revolusi Perancis yang sudah terkenal itu.

Revolusi Perancis (1789 – 1793 M) dipandang sebagai puncak kegelisahan dari rakyat yang tertindas dan dirampas haknya. Dengan dendam dan kemarahan yang luar biasa mereka menghancurkan universalisme dan feodalisme yang mengikat mereka. Tetapi, akibatnya lebih buruk dari itu. Bukan saja mereka memusuhi kaum agama dan feodal, tetapi juga menjatuhkan nama suci dari Tuhan yang selalu dibuat kedok oleh kedua golongan di atas.

Di samping itu, berkembangnya sistem ekonomi kapitalis juga dapat diruntut dari sejak munculnya faham fisiokrat (abad 17) yang mengatakan bahwa pertanian adalah dasar dari produksi negara, sebab itu, seluruh perhatian harus ditumbuhkan kepada memperbesar hasil pertanian. Kemudian lahir pula paham merkantilisme (awal abad 18) yang mengatakan bahwa perdagangan adalah lebih penting dari pertanian, karena itu pemerintah harus memberikan perhatiannya kepada mencari perdagangan dengan negara-negara lainnya.

Pada pertengahan abad ke-18, lahirlah paham baru yang dinamakan liberalisme dari Adam Smith (1723 – 1790 M) di Inggris. Menurut dia, bukan soal pertanian atau perdagangan yang harus dipentingkan, tetapi titik beratnya diletakkan pada pekerjaan dan kepentingan diri. Jika seseorang dibebaskan untuk berusaha, dia harus dibebaskan pula untuk mengatur kepentingan dirinya. Sebab itu ajaran *laiser aller, laisser passer* (merdeka berbuat dan merdeka bertindak) menjadi pedoman bagi persaingan mereka. Selanjutnya manusia memasuki kancah individualisme yang ditandai dengan nafsu untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya yang ditimbulkan oleh persaingan yang bebas tadi. Dari paham liberalisme, timbullah kaum borjuis. Kaum borjuis ini akhirnya menimbulkan sistem ekonomi kapitalis.

 2.      Landasan Filosofi Kapitalis

Landasan filosofi sistem ekonomi kapitalis adalah materialisme dan sekularisme. Pengertian manusia sebagai *homo economicus* atau *economic man* adalah manusia yang materialis hedonis, sehingga ia selalu dianggap memiliki serakah atau rakus terhadap materi. Dalam perspektif materialisme hedonisme murni, segala kegiatan manusia dilatarbelakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang bersifat material. Manusia dianggap merasa bahagia jika segala kebutuhan materialnya terpenuhi secara melimpah. Pengertian kesejahteraan yang materialistik seperti ini seringkali menafikan atau paling tidak meminimalkan keterkaitannya dengan unsur-unsur spiritual ruhaniah.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, materi adalah sangat penting bahkan dianggap sebagai penggerak utama perekonomian. Dari sinilah sebenarnya, istilah kapitalisme berasal, yaitu paham yang menjadikan kapital (modal/material) sebagai motivator utama.

Ilmu ekonomi kapitalis sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. *Rasionality assumption* dalam ekonomi menurut Roger LeRoy Miller adalah *individuals do not intentionally make decisions that would leave them worse off*. Ini berarti bahwa rasionaliti didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (*need*) dan keinginan-keinginan (*want*) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Bahkan menurutnya, suatu aktivitas atau sikap yang terkadang nampak tidak rasional akan tetapi seringkali ia memiliki landasan rasionaliti yang kuat, misalnya orang yang berpacaran menghabiskan waktu dan uang, dan lain sebagainya.

Rasionaliti merupakan kunci utama dalam pemikiran ekonomi modern. Ia menjadi asas aksioma bahwa manusia adalah makhluk rasional. Konsep rasionaliti muncul karena adanya keinginan-keinginan konsumen untuk memaksimalkan utiliti dan produsen ingin memaksimalkan keuntungan, berasaskan pada satu set *constrain*. Yang dimaksud *constrain* dalam ekonomi kapitalis adalah terbatasnya sumber-sumber dan pendapatan yang dimiliki oleh manusia dan alam, akan tetapi keinginan manusia pada dasarnya tidak terbatas. Dalam ekonomi Islam yang dimaksud dengan *constrain* adalah terbatasnya kemampuan manusia baik dari segi fisik maupun pengetahuan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu sumber yang tidak terbatas yang telah disediakan oleh Allah SWT. Berdasarkan pernyataan di atas maka manusia perlu membuat suatu pilihan yang rasional sehingga pilihan tersebut dapat memberikan kepuasan atau keuntungan yang maksimal pada manusia.

Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri *(self interest)* pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak (*invisible hand*) yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar.

Pada sisi lain, landasan filosofi sistem ekonomi kapitalis adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material (atau agama dan dunia) secara dikotomis. Segala hal yang berkaitan dengan dunia adalah urusan manusia itu sendiri sedangkan agama hanyalah mengurusi hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Implikasi dari ini adalah menempatkan manusia sebagai sebagai pusat dari segala hal kehidupan (*antrophosentris*) yaitu manusilah yang berhak menentukan kehidupannya sendiri.

3.      Pokok Pikiran Kapitalisme

Dalam dunia nyata, kapitalisme tidak memiliki bentuk yang tunggal. Ia memiliki ragam yang tidak selalu sama di antara negara-negara yang menerapkannya, dan ia seringkali berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal, (1) ada banyak ragam pendapat dari para pemikir, (2) definisi kapitalisme selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi dan modifikasi ini telah berlangsung berabad-abad. Dengan demikian, pengertian kapitalisme sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pemikiran Adam Smith mungkin tidak lagi dijumpai secara murni. Karakteristik umum kapitalisme antara lain:

1. Kapitalisme menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan menurut preferensi individual sebagai sesuatu yang esensial bagi kesejahteraan manusia.
2. Kapitalisme menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu
3. Kapitalisme berasumsi bahwa inisiatif individu ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar yang kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumberdaya ekonomi.
4. Kapitalisme tidak menyukai pentingnya peranan pemerintah atau penilaian kolektif (oleh masyarakat), baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif.
5. Kapitalisme mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu secara otomatis akan melayani kepentingan sosial kolektif.

Adapun konsep-konsep pemikiran penting dalam sistem ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut:

1. *Rational economic man*

Ilmu ekonomi kapitalis sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Berdasarkan paham ini, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Dalam implementasinya, rasionaliti ini dianggap dapat diterapkan hanya jika individu diberikan kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga dengan sendirinya di dalamnya terkandung individualisme dan liberalisme. Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak (*invisible hand*) yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar. Oleh karena itu, kapitalisme sangat menjunjung tinggi pasar yang bebas dan menganggap tidak perlu ada campur tangan pemerintah.

b. Positivisme

Kapitalisme berusaha mewujudkan suatu ilmu ekonomi yang bersifat objektif, bebas dari petimbangan moralitas dan nilai, dan karenanya berlaku universal. Ilmu ekonomi telah dideklarasikan sebagai kenetralan yang maksimal di antara hasil akhir dan independensi setiap kedudukan etika atau pertimbangan normatif. Untuk mewujudkan obyektivitas ini, maka positivism telah menjadi bagian integral dari paradigma ilmu ekonomi. Positivism menjadi sebuah keyakinan bahwa setiap pernyataan ekonomi yang timbul harus mempunyai pembenaran dari fakta empiris. Paham ini secara otomatis mengabaikan peran agama dalam ekonomi, sebab dalam banyak hal, agama mengajarkan sesuatu yang bersifat normatif.

c. Hukum Keseimbangan Alamiyah

Terdapat suatu keyakinan bahwa selalu terdapat keseimbangan (*equilibrium*) yang bersifat alamiah, sebagaimana hukum keseimbangan alam dalam tradisi fisika Newtonian. Jean Babtis Say menyatakan bahwa *supply creates its own demand*, penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Ini berimplikasi pada asumsi bahwa tidak akan pernah terjadi ketidakseimbangan dalam ekonomi. Kegiatan produksi dengan sendirinya akan menciptakan permintaannya sendiri, maka tidak akan terjadi kelebihan produksi dan pengangguran. Implikasi selanjutnya, tidak perlu ada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Intervensi pemerintah dianggap justru akan mengganggu keseimbangan alamiah. Asumsi inilah yang menjadi piranti keyakinan akan kehebatan pasar dalam menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Inilah salah satu paradigma ilmu ekonomi kapitalis.

C. Sistim Ekonomi Sosialis

1. Sejarah Sosialisme

Banyak para ahli mempercayai bahwa prinsip dasar sosialisme awal merupakan derivasi dari filsafat Plato, ajaran nabi Yahudi dan beberapa ajaran dari kitab Perjanjian Baru. Akan tetapi, ideology sosialis modern secara esensial merupakan produk gabungan dari peristiwa revolusi Prancis 1789 M dan revolusi industry di Inggris. Sedang terma sosialis sendiri pertama kali muncul dalam sebuah jurnal Inggris pada tahun 1827 M. Dua revolusi ini memicu berdirinya pemerintahan demokratik Prancis dan ekspansi ekonomi besar-besaran di Inggris, serta memunculkan terjadinya konflik antar golongan masyarakat pemilik modal (*bourgeoisie*) dan berkembangnya kelas pekerja industri. Mulai saat itulah kaum sosialis berusaha untuk memperjuangkan eliminasi yang ada, atau setidaknya menengahi konflik yang terjadi di masyarakat.

Gerakan sosialis pertama kali muncul di Prancis, setelah revolusi yang dipinpin oleh Francois Babeuf, Filippo Buonarrotti, dan Louis Auguste Blanqui. Para pemikir sosialis lainnya bersama William Thompson di Inggris meyakini akan kemungkinan perdamaian dan transformasi gradual, yang menurut masyarakat sosialis dengan cara mendirikan komunitas eksperimental, akan tetapi kemudian para pemikir sosialis menyebutnya dengan label Utopia.

Utopia adalah sebuah konsepsi tentang masyarakat ideal dimana segala bentuk kejahatan ekonomi, politik dan social dapat dilenyapkan dan fungsi negara adalah menciptakan kemakmuran untuk seluruh masyarakat. Karya Plato “*Republic*” ditulis pada abad keempat secara umum mewakili sebagian karya paling awal dan paling besar dalam term ini. Pemakaian terma utopia sendiri yang berarti tidak ada tempat dalam bahasa Yunani, mendasarkan idenya pada keyakinan bahwa sebenarnya tidak sulit untuk menciptakan terbentuknya masyarakat yang ideal dengan diawali membentuk masyarakat kooperatif dalam suatu skala, sebagai pionir bagi penciptaan masyarakat yang ideal.

Dengan demikian secara historis, sosialisme mempunyai gagasan yang menuntut adanya pemerintahan yang lebih baik dan berusaha membuktikan kepada kelompok kaya dan pemilik modal bahwa eksploitasi itu tidak bermoral. Sosialisme pada awalnya sebuah reaksi minoritas terhadap pelaksanaan etika kapitalis dan pengembangan masyarakat industry.

1. Sosialisme ilmiyah (marxisme)

Pada pertengahan abad ke 19, teori-teori sosialisme berkembang dan semakin dielaborasi. Seorang pemikir sosialis berpengaruh saat itu adalah berasal dari Jerman, Karl Marx (1818 – 1883 M) mengembangkan gagasan baru sosialisme yang kemudian tumbuh menjadi doktrin sosialisme paling berpengaruh. Doktrin sosialisme Karl Marx kemudian dipopulerkan dengan istilah “Marxisme”. Istilah Marxisme sendiri adalah sebutan bagi pembakuan ajaran resmi Karl marx, dan terutama dilakukan oleh temannya Friedrich Engles (1820 – 1895 M) dan oleh tokoh teori Marxisme Karl Kautsky (1854 – 1938 M). Dalam pembakuan ini ajaran Marx yang sebenarnya sulit dimengerti disederhanakan oleh Karl Kautsky, agar cocok sebagai ideology perjuangan kaum buruh.

Pemikiran Marx muda juga dipengaruhi oleh seorang filosof idealis dan humanis Jerman, L.A. Feuerbach yang meyakini bahwa manusia – khususnya kaum pekerja- telah mengalami alienasi dalam masyarakat kapitalis modern. Ia berargumen bahwa tulisan pertamanya bahwa institusi kepemilikan privat pada akhirnya akan dikalahkan oleh masyarakat dan realitas alamiyah (*nature*). *Communist manifesto* (1848 M) merupakan dukumen Marxisme paling esensial, yang ditulis oleh Karl Marx bersama Engles, mengajukan sebuah generalisasi bahwa setiap sejarah tentang manusia pada dasarnya adalah sejarah tentang pertentangan kelas. Di sana terdapat sekelompok manusia yang berkuasa (*the rulling class*) dan kelompok tertindas (*the appressed class*). Kelompok yang berkuasa (*bourgeois*) memiliki segala factor produksi yang dicirikan oleh model produksi kapitalis dengan mendirikan industri-industri serta mengembangkan perdagangan bebas. Kecenderungan tersebut pada tahap berikutnya mengilhami munculnya pertumbuhan intensitas pertentangan akibat kesenjangan antara kapitalis dengan para pekerja (*the ploretariat*), pertentangan yang terus berlanjut pada tahap kronis akan memicu munculnya karakter revolusioner pada pihak tertindas.

1. Pokok pikiran Sosialisme

Dalam karya *Das Kapital*, Marx berpendapat bahwa untuk mendapatkan keuntungan (*surplus value*), para kapitalis mengeksploitasi dan menjerumuskan pekerja dalam perbudakan (*wage savery*). Negara-negara modern bersama pemerintah dan agen-agennya juga dianggap bagian dari organ eksekutif kelas kapitalis. Agama, filsafat, dan segala budaya telah menjadikan kelas pekerja pada posisi tersubordinasi. Pada proses dialektis berikutnya, menurut Marx, Kapitalisme akan tumbang oleh berbagai factor ekonomi, seperti berkurangnya profit, seiring dengan meningkatnya kesadaran kelas (*class consciousness*) yang memaksa kelas pekerja mengambil alih sistim yang sudah mapan digantikan kaum proletar (*dictatorship of the proletariat*). Kekuasaan tersebut akan segera mewujud dalam sistim sosialisme, dimana kepemilikan pribadi dihapuskan dan setiap orang dihargai sesuai dengan kerjanya.

Sosialisme pada tahap berikutnya diidealisasikan menjelma menjadi komunisme, sebuah masyarakat besar yang dikarakterisasikan oleh nihilnya keberadaan Negara (*state*), kelas social, politik, hokum, dan segala bentuk tekanan. Dalam kondisi ideal seperti ini, barang-barang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat komunis.

Sistem ekonomi sosialis dapat diartikan secara umum yaitu sistem ekonomi yang mengatur perekonomian secara terpusat atau terkomando yang ditujukan untuk kepentingan buruh (pekerja) secara menyeluruh.

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang hadir atas ketidak puasan terhadap sistem ekonomi kapitalis yang cenderung mengeksploitasi sesuatu untuk kepentingan pribadi dengan membabi buta. Salah satu tokoh yang berperan dalam pemikiran sosialis adalah karl marx. Dimana dia dan keluarganya menjadi salah satu pihak yang merasakan ketidakadilan dalam praktek ekonomi kapitalis. Dan beberapa Negara Negara yang pernah merasakan dan masih menganut sistem ekomomi sosialis contohnya adalah mantan negara-negara uni soviet, Yugoslavia, China, Cuba dan lain-lain.

Prinsip utama dari sistem ini adalah menasionalisasikan semua aspek-aspek yang bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak, dan diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah . seperti asset-asset yang ada di negara tersebut contohnya pertambangan, jalan, transportasi, bahkan tanah. Sehingga tidak dimungkinkan pihak swasta atau luar dapat memegang peranan di dalamnya. Dalam masyarakat sosialis hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kerbersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alakosi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.

D.    Sistim Ekonomi Islam

1.      Sejarah Ekonomi Islam

Sesungguhnya telah sepuluh abad sebelum orang-orang Eropa menyusun teori-teori tentang ekonomi, telah diturunkan oleh Allah SWT di daerah Arab sebuah analisis tentang ekonomi yang unggul, karena analisis ekonomi tersebut tidak hanya mencerminkan keadaan bangsa Arab pada waktu itu –sehingga hanya bermanfaat untuk bangsa Arab saat itu–, tetapi juga untuk seluruh dunia. Struktur ekonomi yang ada dalam firman Allah dan sudah sangat jelas aturan-aturannya tersebut, pernah dan telah dilaksanakan dengan baik oleh umat pada waktu itu. Sistem ekonomi tersebut adalah suatu susunan baru yang bersifat universal, bukan merupakan ekonomi nasional bangsa Arab. Sistem ekonomi tersebut dinamakan ekonomi Islam.

Berbagai pemikiran dari para sarjana ataupun filosof zaman dahulu mengenai ekonomi tersebut juga sudah ada. Diantaranya adalah pemikiran Abu Yusuf (731 - 798 M), Yahya Ibnu Adam (meninggal 818 M), Al Farabi (870 – 950 M), Ibnu Sina (980 – 1037 M), El-Hariri (1054 – 1122 M), Imam Al Ghozali (1058 – 1111 M), Tusi (1201 – 1274 M), Ibnu Taimiyah (1262 – 1328 M), Ibnu Khaldun (1332 – 1406 M), dan lain-lain. Sumbangan Abu Yusuf terhadap keuangan umum adalah tekanannya terhadap peranan negara, pekerjaan umum dan perkembangan pertanian yang bahkan masih berlaku sampai sekarang ini.

Gagasan Ibnu Taimiyah tentang harga ekuivalen, pengertiannya terhadap ketidaksempurnaan pasar dan pengendalian harga, tekanan terhadap peranan negara untuk menjamin dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat dan gagasannya terhadap hak milik, memberikan sejumlah petunjuk penting bagi perkembangan ekonomi dunia sekarang ini. Ibnu Khaldun telah memberikan definisi ekonomi yang lebih luas dengan menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang positif maupun normatif. Maksudnya mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan kesejahteraan individu saja. Ibnu Khaldun juga menyatakan adanya hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, etika, dan pendidikan. Dia memperkenalkan sejumlah gagasan ekonomi yang mendasar seperti pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap sumbangan kerja dalam teori nilai, teori mengenai pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan sebagainya.

Secara keseluruhan para cendekiawan tersebut pada umumnya dan Ibnu Khaldun pada khususnya dapat dianggap sebagai pelopor perdagangan fisiokrat dan klasik (misalnya Adam Smith, Ricardo, Malthus) dan neo klasik (misalnya Keynes). Tidak bisa dipungkiri, bahwa sebutan ekonomi Islam melahirkan kesan beragam. Bagi sebagian kalangan, kata ‘Islam’ memposisikan Ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif, sehingga menghilangkan nilai kefitrahannya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas spesifik yang dimiliki oleh Ekonomi Islam itu sendiri hilang.

Sebenarnya Ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya sekaligus. Dengan fitrahnya ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya – dengan segala kelebihannya — pada setiap sistem yang dimilikinya.

Ekonomi Rabbani menjadi ciri khas utama dari model Ekonomi Islam. Chapra menyebutnya dengan Ekonomi Tauhid. Tapi secara umum dapat dikatakan sebagai *divine economics*. Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya — sebab pelakunya pasti manusia — tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepadaNya (kepada aturanNya) dikembalikan segala urusan (QS 3: 109). Melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main..”*Dialah yang memberi kelapangan atau membatasi rezeki orang yang Dia kehendaki*” (QS 42: 12 dan QS 13: 26). Atas hikmah Ilahiah, untuk setiap makhluk hidup telah Dia sediakan rezekinya selama ia tidak menolak untuk mendapatkannya (QS. 11: 6). Namun Allah tak pernah menjamin kesejahteraan ekonomi tanpa manusia tadi melakukan usaha.

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam — meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi — mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif”, sebagai acuan yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Ekonomi Islam pernah tidak populer sama sekali. Kepopuleran ekonomi Islam bisa dikatakan masih belum lama. Oleh karena itu, sering muncul pertanyaan, apakah ekonomi Islam adalah baru sama sekali? Jika melihat pada sejarah dan makna yang terkandung dalam ekonomi Islam, ia bukan sistem yang baru. Argumen untuk hal ini antara lain:

1. Islam sebagai agama samawi yang paling mutakhir adalah agama yang dijamin oleh Allah kesempurnaannya, seperti ditegaskan Allah dalam surat Al-Maidah (5):3. Di sisi lain, Allah SWT juga telah menjamin kelengkapan isi Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi umat manusia yang beriman dalam menjalankan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firmannya QS Al-An’am (6):38,

ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون

1. Sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai zaman keemasan, yang tidak dapat disangkal siapapun. Dalam masa itu, sangat banyak kontribusi sarjana muslim yang tetap sangat diakui oleh semua pihak dalam berbagai bidang ilmu sampai saat ini, seperti matematika, astronomi, kimia, fisika, kedokteran, filsafat dan lain sebagainya. Sejarah juga membuktikan, bahwa sulit diterima akal sehat sebuah kemajuan umat dengan begitu banyak kontribusi dalam berbagai lapangan hidup dan bidang keilmuan tanpa didukung lebih awal dari kemajuan di lapangan ekonomi.
2. Sejarah juga mencatat banyak tokoh ekonom muslim yang hidup dan berjaya di zamannya masing-masing, seperti Tusi, Al-Farabi, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyyah, Al-Maqrizi, Syah Waliyullah, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Bahkan yang disebut terakhir (Ibnu Khaldun) diakui oleh David Jean Boulakia sebagai berikut: *“Ibn Khaldun discovered a great number of fundamental economic notions a few centuries before their official births. He discovered the virtues and the necessity of a division of labor before (Adam) Smith and the principle of labor before Ricardo. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the state in the economy before Keynes. The economist who rediscovered mechanisms that he had already found are too many to be named.” “. . . although Ibn Khaldun is the forerunner of many economist, he is an accident of history and has no consequence on the evolution of economic thought.”*

Ketiga argumen dan indikator di atas dapat dipakai sebagai pendukung yang amat meyakinkan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah hal baru sama sekali. Namun patut diakui bahwa sistem yang pernah berjaya ini pernah tenggelam dalam masa yang cukup lama, dan sempat dilupakan oleh sementara pihak, karena kuatnya dua sistem yang pernah berebut simpati dunia yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme.

**2.      Prinsip Dasar Ekonomi Islam**

Para pakar ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. Menurut M. Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah“*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*”.Menurut Khursid Ahmad, ekonomi Islam adalah *a sistematic effort to try to understand the economic problem and man’s behavior in relation to that problem from an Islamic perspective.* Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah “*the muslim thinkers’ response to the economic challenges of their times. This response is naturally inspired by the teachings of Qur’an and Sunnah as well as rooted in them*”*.*

Dari berbagai definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam). Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut  Umer Chapra adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.
2. Prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi. Ia dibekali dengan perangkat baik jasmaniah maupun rohaniah untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) persaudaraan universal, (2) sumber daya adalah amanah, (3), gaya hidup sederhana, (4) kebebasan manusia.
3. Prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, 3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.
4. Konsep Kekayaan dan Kepemilikan dalam Islam

Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan suatu konsep dengan metafora amanah (Triyuwono 1995) dimana seseorang yang memiliki suatu barang pada hakikatnya memperoleh suatu titipan yang diamanatkan kepadanya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karakteristiknya diuraikan oleh Mannan sebagai berikut :*kekhasan konsep Islam mengenai hak milik pribadi terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam, Legitimasi hak milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya, seperti juga jumlah matematika tergantung pada tanda aljabar yang dikaitkan padanya. Dalam hal ini, lagi-lagi Islam berbeda dengan kapitalisme dan komunisme, karena tidak satupun dari keduanya itu yang berhasil dalam menempatkan individu selaras dalam suatu mosaik sosial. Hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme, sedang penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran sosialisme.*

Sementara itu, nalar juga memberikan gagasan bahwa individu yang menciptakan suatu benda juga bertanggungjawab atas wujud benda itu sebagai pemiliknya; ia memiliki klaim penuh atasnya. Sebagaimana individu memiliki kebebasan bertindak berkenaan dengan dirinya, ia juga memiliki klaim yang tak terbantah atas apa saja yang diciptakannya. Atas pertimbangan ini, kepemilikan sebagai hasil kerja seseorang dan bentuknya yang disadari olehnya, dianggap sebagai hal yang natural dan logis.

Kedua konsep diatas merupakan doktrin etis Islam; yaitu Tuhan sebagai pemilik Mutlak atas segala sesuatu (QS Ali –Imran:189). Sementara manusia hanya menjadi wakilnya di bumi (QS Al-Baqarah:30). Dari premis pertama tersebut selanjutnya dapat ditarik premis kedua bahwa manusia dalam kehidupan sosial yang ada, memiliki suatu klaim kepemilikan, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Dari premis awal pula, logika menetapkan bahwa produsen suatu barang dinisbahkan sebagai pemiliknya. Atau dengan kata lain, seorang manusia yang memiliki diri otentik diamanatkan sebagai pemilik kerjanya maupun produk kerjanya. Ini merupakan salah satu asal –usul kepemilikan insaniah; yaitu pertama, kerja kreatif. Kerja kreatif dapat dianggap sebagai sumber kepemilikan, yang tercangkup oleh dan sesuai dengan nalar sedemikian hingga tidak perlu ada paradoks atau paralelisme (Bahesti 1992, 14-15). Kerja kreatif menciptakan nilai konsumsi baru dan meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai konsumsi keseluruhan yang ada. Tingkatan kepemilikan individu atas komoditas yang diproduksinya dapat diukur oleh kontribusinya dalam proses produksi tersebut. Dalam hal ini, kerja produktif yang dimaksud mencakup baik aktivitas langsung maupun tidak langsung yang memberikan tambahan bersih pada kuantitas dan kualitas barang.

Kedua; dalam konteks lainnya, ada bentuk kepemilikan yang berbeda dengan yang pertama, yaitu ketika dijumpai perolehan yang berasal dari alam tanpa perlu mengolah atau memodifikasinya. Dalam hal ini, apa yang dilakukan sesungguhnya adalah kerja konsumsi dimana tindakan itu tidak dapat disebut sebagai aktivitas ekonomi atau aktivitas produktif. Persoalan seperti ini mengharuskan bahwa selain produksi, terdapat kepemilikan lainnya yang disebut perolehan *(acquisition)*, yang dalam terminologi fiqh atau *yurisprudenci syariah* memiliki nama lain hiazat, yang ringkasnya berarti kepemilikan atas sesuatu (Bahesti 1992,19-21). Manusia memalii hiazat memiliki bagiannya atau apa yang menjadi miliknya, tidak menjadi soal apakah hiazat tersebut merupakan asal-usul kepemilikan atau mendahuli prevalensinya. Manusia dipandang sebagai pengatur alam, memiliki hak memanfaatkan atau mengeksplotasikannya, tentu saja dengan cara-cara yang baik. Seluruh manusia adalah pengatur alam, sementara masing-maasing individu memiliki “jatah” rizkinya sendiri sehingga ia berhak berpartisipasi dalam praktek hiazat guna memperoleh keuntungan dari karunia alam. Hiazat mengandung arti menjadikan sesuatu sebagai milik atau mengambil kendali atas sesuatu. Jadi hiazat adalah perolehan jatah seseorang dari asset keseluruhan.

Kepemilikan oleh individu terhadap alam ada bersama orang lain dalam bentuk kepemilikan kolektif. Sifat kepemilikan demikian disebut musya (Bahesti 1992, 21-22). Dalam hukum islam terdapat dua bentuk kepemilikan kolektif yang dipertahankan (Bahesti 1992, 22-25). Satu bentuk adalah kepemilikan masyarakat, yang melalui hiazat, kepemilikan individu dimunculkan. Sementara itu, bentuk lainnya muncul sebagai kepemilikan kolektif yang bersifat tetap. Pandangan tersebut menganggap bahwa milik masyarakat tidak sama dengan milik bersama. Yang pertama berarti kepemilikan atas kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang eksistensinya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan, sementara yang kedua adalah kepemilikan kolektif yang belum direalisasi sebagai milik individu. Dinyatakan dalam salah satu hadits: “kepemilikan manusia terbagi dalam tiga barang: api, air, dan padang rumput”. Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan hadits ini adalah bahwa dalam hal ini kepemilikan masyarakat, semua orang dapat memanfaatkannya tanpa menjadi pemilik kekayaan tersebut.

Berkaitan dengan kepemilikan individu, walaupun diperoleh melalui cara-cara yang sah, tidak begitu saja menjadi halal pula kecuali telah dikeluarkan bagian hak kolektifnya dari kepemilikan individu. Islam menempati posisi unik dalam hal ini dengan mendasarkan diri pada kerangka etis keseimbangan di mana dalam hak seseorang atas kekayaan secara bersamaan terselip pula azasi hak orang lain.(QS Al-An’am:141)

Sebagaimana dinyatakan oleh ayat diatas, zakat adalah representasi azas keseimbangan hak kepemilikan dalam islam. Substansi zakat bukan sekedar kewajiban individu terhadap masyarakat, tetapi lebih dari itu, ia merupakan hak masyarakat atas individu secara langsung. Segera ketika seseorang memperoleh sejumlah akumulasi kekayaan tertentu, bersamaan dengan itu terbit pula hak masyarakat atasnya.

Konsep demikian lebih tegas daripada konsep liberal yang menempatkan kepedulian sosial dalam kerangkan kewajiban kemanusiaan. Hal ini sekaligus juga menjawab problem penempatan hak kolektif di atas hak individu terhadap kekayaan seperti dalam sosialisme marxis. Bahwa secara natural memang akan selalu ada golongan yang lebih mampu dari golongan yang lain, namun ini tidak menyebabkan kelebihan tersebut harus disamakan, atau sebaliknya harus dibebaskan dengan pembatasan yang bersifat sekunder.

Berangkat dari kerangka ini, A.M.Saefuddin kemudian menyarikan nilai-nilai dasar kepemilkan dalam Islam (munief 1997,67-69). Nilai-nilai dasar tersebut ditambah dengan point 4 yang merupakan interpretasi penjelasan sebelumnya tentang zakat sebagai hak kolektif :

1. pemilikan terletak pada pemilikan kemanfaatanya dan bukan penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Hal ini tertuang dalam aturan-aturan syariah dalam bentuk yang ketat; seseorang yang tidak mengolah dan memproduksi manfaat dari sumber-sumber ekonomi yang diamanatkan Allah swt kepadanya akan kehilangan haknya atas sumber-sumber ekonomi tersebut.
2. Pemilikan terbatas sepanjang umur hidup seseorang. Apabila dia meninggal dunia, kepemilkan harus disitribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan syariah.
3. Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang dimaksud dalam katagori ini adalah barang tambang, minyak bumi dan kebutuhan pokok manusia pada waktu dan kondisi tertentu; termasuk di dalamnya sumber-sumber air minum, hutan, udara, dan ruang angkasa.
4. Dalam kepemilikan perorangan yang sah, masih terdapaat klaim kepemilikan kolektif dalam bagiannya itu yang dapat menjadikaannya tidak sah bila tidak terbagi. Untuk mensahkannya perlu dikeluarkan dahulu hak dari sebagian orang yang lain sesuai tata cara syariah.

Syariah sebagai hukum positif selanjutnya menetapkan dan mengatur konsep kepemilikan pribadi tersebut sebagai berikut : (Munif 1997, 73-76)

* 1. Ketentuan pertama menegaskan bahwa syariah tidak mengizinkan kepemilikan kekayaan yang tidak dimanfaatkan.
  2. Ketentuan kedua mencakup ketentuan syariah mengenai perilaku pemilik kekayaan pribadi dimana ia harus membayar zakat sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya. Bagi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya atau tidak bisa bekerja, tidak wajib mengeluarkan zakat.
  3. Ketentuan ketiga memberikan tekanan terhadap penggunaan yang berfaedah dari harta benda di jalan Allah, yang berarti semua hal yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan mendatangkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama.
  4. Ketentuan keempat terkait dengan ketentuan sebelumnya, di mana penekanannya terhadap harta benda yang berfaedah berarti pula membebankan kewajiban kepada pemilik harta benda itu untuk menggunakannya sedemikian rupa sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat.
  5. Ketentuan kelima menekankan legalitas yang mengatur perilaku pemilik harta benda. Seluruh tindakan untuk memperoleh dan memanfaatkaan harta benda tidak diperbolehkan melalui cara-cara yang melanggar syariat.
  6. Ketentuan keenam mensyaratkan pemilik harta benda untuk memanfaatkan kepemilikannya secara seimbang; dengan tidak boros maupun kikir.
  7. Ketentuan ketujuh menegaskan penggunaan harta benda dengan menjamin kemanfaatannya sesuai hak pemilik.
  8. Ketentuan terakhir merupakan ketentuan yang mengatur pengawasan dan pembagian harta karena kematian pemiliknya untuk kepentingan yang ditinggalkan melalui hukum waris.

Berangkat dari prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam Islam serta aturan-aturan syariah yang mengatur konsep kepemilikan, dalam konteks pemilikan sarana-sarana produksi, Islam menekankan pertanggungjawaban personal di antara anggota-anggota organisasi bisnis. Ini menyebabkan organisasi –organisasi bisnis yang sebenarnya. Dalam Islam, suatu organisasi bisnis dipandang sebagia kontrak dalam dua atau lebih individu bersepakat untuk memberikan baik modal maupun tenaga kerja pada suatu usaha bersama.

Konsep kepemilikan secara syariah akhirnya dapat disimpulkan merupakan satu konsep yang berusaha untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat yang secara spesifik terkait erat dengan nilai etis yang berangkat dari nilai-nilai dasar Islam. Inilah kekhasan dari paradigma kepemilikan syariah sekaligus kesulitan tersendiri dalam penerapannya. Keseimbangan yang dicita-citakan dalam konsep kepemilkan menurut paradigma Islam seringkali bersifat normatif dan ideal hingga sukar diterjemahkan dalam bentuk yang lebih material. Untuk menjamin terlaksananya nilai-nilai etis yang berlaku dalam konsep kepemilikan syariah. Sejauh institusi-institusi tersebut masih bersifat elestis; dalam arti bahwa masyarakat luas kurang memiliki akses terhadap mekanisme syura hingga dapat menghasilkan keputusan yang berpihak pada masyarakat, maka implementasi konsep kepemilikan yang seimbang tetap akan sulit terwujud. Sebagaimana teori-teori kepemilikan liberal yang memberikan legitimasi etis pada kerakusaan rezim kapitalisme; teori kepemilikan syariah dapat pula terjebak dalam posisi lebih buruk; memberikan legitimasi etis terhadap konsep kepemilikan yang diatur secara otoritier oleh negara dengan pembenaran atas nama tuhan.

Apabila pelaksanaan konsep kepemilikan syariah ternyata tidak didukung secara institusional oleh kelengkapan pranata-pranata syariah, maka dapat terjadi perwujudan nilai-nilai etis Islam dalam konsep kepemilikan hanya mengandalkan kepatuhan personal seorang muslim terhadap khaliqnya. Jika ini yang terjadi, paradigma islam tidak akan dapat dibahasakan secara komunal karena masyarakat sebagai kolektifas tidak memiliki kepanjangan tangan melalui institusi-institusi untuk mengendalikan dan memastikan bahwa aturan-aturan syariah telah ditegakkan. Secara pragmatis, doktrin-doktrin etis memang sering kali harus berhadapan dengan fakta empiris. Mengharapkan semata-mata pengawasan langsung dari Allah swt sebagai hakim yang muthlak tentu saja merupakan utopis asketis luar biasa yang dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan terhadap kemanusiaan, otomatis mengibiri keagungan Islam

1. **Konsep Perilaku Konsumen dan Maslahah dalam Islam**
   1. Perilaku Konsumsi dalam Islam

* Perilaku Konsumen *(Islamic Consumer behavior)* mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan Sumber daya *(resources)* yang dimilikinya. Motif Konsumsi adalah *Maksimazion Utilility* sedangkan motif produksi adalah *Maksimazion Profit.*
* Teori perilaku konsumen rasional dlm paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar *Utilitarianisme*. Utilitarianisme,diprakarsai oleh Bentham: menyatakan secara umum tidak seorang pun dpt mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali orang itu sendiri. Dengan demikian pembatasan terhadap kebebasan individu baik oleh individu lain maupun oleh penguasa adalah kejahatan dan harus ada alasan kuat untuk melakukannya.
* Dasar Filosofis analisis mengenai perilaku konsumen dalam teori ekonomi konvensional:

1. Kelangkaan dan terbatasnya pendapatan: adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa orang menentukan pilihan. Agar pengeluaran senantiasa berada di anggaran yang sudah ditetapkan, meningkatkan konsumsi suatu barang atau jasa harus disertai dengan pengurangan konsumsi pd barang atau jasa lain.
2. Konsumen mampu membandingkan biaya dan manfaat.
3. Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat.
4. Setiap barang dapat disubtitusi dengan barang lain. Dengan demikian konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara.
5. Konsumen tunduk kepada hukum berkurangnya tambahan kepuasan *(the law of diminishing marginal utility).* Semakin banyak barang yang dikonsumsi semakin kecil tambahan kepuasan yang dihasilkan.

* Asumsi sentral *consumer behavior* adalah konsumen berprilaku rasional; asumsi ini diperlukan agar dapat dibangun teori yang memiliki daya prediksi terhadap perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dihadapkan dengan keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya. Seperti ilustrasi dimana Kelangkaan membuat seseorang bijak dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Misalnya”seorang kepala keluarga ingin menunaikan haji bersama istrinya. Biayanya mencapai Rp 80 jt. Pada saat bersamaan anaknya diterima di fak Kedokteran UI dan dia harus membayar Rp 75 Jt untuk kuliah anaknya tsb. Karena sangbapak tidak memiliki tabungan lain, maka ia menhadapi situasi harus membuat pilihan, antara menunaikan ibadah haji atau membayar sekolah anaknya UI. Pilihan yang tdk jadi diambil disebut *Uppurtunity Cost.*
* Aktifitas dalam menggunakan suatu produk barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhannya.

- Kebutuhan Primer *(Dharuriyyat)*

- Kebutuhan Sekunder *(Hajjiyat)*

- Kebutuhan Pelengkap/tersier *(Tahsiniyyat)*

* 1. Konsep Maslahah

Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Konsep maslahah dalam kajian ini menurut al-Shatibi, maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama *(dien),* jiwa *(nafs),* intelektual *(‘aql),* keluarga/keturunan *(nasl),* dan material *(mal).* Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat.

Oleh karena itu, para pelaku ekonomi dalam seluruh aktifitas ekonominya bertujuan untuk mendapatkan utiliti maupun maslahah. Guna mendapatkan maslahah maka kegiatan para pelaku ekonomi harus diarahkan untuk mencukupi lima kebutuhan dasar tersebut.

Seluruh barang dan jasa akan mempertahankan kelima elemen ini disebut *maslahah* bagi manusia. Seluruh kebutuhan tidak sama pentingnya. Ada tiga tinkat kebutuhan:

1. Tingkatan dimana kelima elemen di atas mendasar untuk dilindungi *(essential/dharuriyyat).*
2. Tingkatan dimana kelima elemen tersebut adalah pelengkap yang menguatkan perlindungan mereka *(complementeries/ hajjiyat).*
3. Tingkatan dimana kelima elemen tersebut merupakan kesenangan atau keindahan *(amelioratories/tahsiniyat).*

Seluruh barang dan jasa yang mendorong dan berkualitas dalam memelihara kelima elemen tersebut disebut *maslaha.* Dalam ekonomi konvensional , seorang konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan *(utiliity),* maka dalam ekonomi Islam konsumen bertujuan untuk mencapai suatu *maslahah.* Pencapaian dari *maslahah* merupakan tujuan dari syariat Islam *(maqasid syariah)* yang menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. *Maslahah* digunakan dalam ekonomi Islam, penggunaan asumsi manusia bertujuan untuk mencari kepuasan *(utiliity)* maksimum tidak mampu menjelaskan apakah barang yang memuaskan akan selalu identik dengan barang yang memberikan manfaat atau berkah bagi penggunanya. Selain itu batasan seorang dalam megkonsumsi hanyalah kemampuan anggaran tanpa mempertiimbangkan aturan dan prinsip syariat.

1. **Konsep Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Lainnya**
2. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank Syariah dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha antara pemilik dana (*shahib al-Mal*) yang menyimpan uangnya di bank dengan bank selaku pengelola dana (*mudharib*), dan di sisi lain bank selaku pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana baik yang berstatus pemakai dana maupun pengelola usaha (*mudharib*).

Pada sisi pengerahan dana masyarakat (*funding*), *shahib al-Mal* berhak atas bagi hasil dari usaha bank sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahib al-Mal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha bank dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya.

Ada tiga jenis produk utama penyerahan dana masyarakat yaitu:

1. Giro *Wadiah*
2. Tabungan *Wadiah/Mudharabah*
3. Deposito *Mudharabah*

Bank selaku *mudharib* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati (*prudent*) dan memperoleh pengahsilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini, bank mempunyai empat jenis pendapatan yaitu: pendapatan bagi hasil, margin keuntungan (*mark-up* harga beli), imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta dan pengambilan biaya administrasi. Pada pendapatan bagi hasil, besar kecilnya pendapatan tergantung kepada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang dibiayai. Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada mudharib akan memotivasi *muharib* untuk lebih giat berusaha, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu porsi 50 : 50 dipandang cukup adil. Lain halnya pada pendapatan mark-up, pilihan terletak apakah ingin sekaligus untung besar pertransaksi tetapi menjadi mahal dan tidak laku, atau keuntungan pertransaksi kecil tetapi dengan volume yang besar karena murah dan laku keras. Pendapatan bank dapat dioptimalkan dengan mengambil kebijakan keuntungan kecil pertransaksi untuk memperbanyak jumlah transaksi yang dibiayai.

B. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang tidak berbasis bunga dan tidak menyalurkan dananya (pembiayaan) pada sektor-sektor yang diharamkan oleh syariah. Akan tetapi bank Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang berbasis aqidah Islam yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan pembiayaan dan menumbuh kembangkan faktor-faktor produksi. Oleh karena itu bank Syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, akan tetapi berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dapat mendorong produktifitas mereka.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari bank Syariah adalah :

1. Menumbuhkan ruh akidah islamiyah dalam mengelola harta dan kekayaan dengan cara :

* Selalu memperhatikan prinsip-prinsip Syariah dalam setiap transaksinya
* Memahami serta menerapkan fungsi-fungsi ekonomi yang berbasis syariah
* Selalu mengajak menuju jalan yang di ridhai Allah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai etika investasi dan bisnis menurut Islam.

2. Merealisasikan cita-cita dan keinginan pemilik modal, nasabah dan karyawan dengan cara:

* Memberikan keuntungan yang layak kepada pemilik modal(pemilik saham)
* Selalu memberikan dan memperlihatkan citra baik di kalangan bank serta memperluas jaringan dengan cara membuka cabang di daerah-daerah yang strategis dan menambah karyawan sesuai dengan kebutuhan
* Meningkatkan kualitas manajemen dengan memberkan pelatihan terhadap semua karyawan bank sesuai dengan skil dan jabatan mereka.

3. Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan terhadap masyarakat dengan cara:

* Meningkatkan sistem investasi yang terukur sehingga dapat merealisasikan keuntungan dengan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah
* Memberikan pembiayaan pada sektor-sektor yang layak dan tidak bertentangan dengan syariah
* Bekerja sama dengan lembaga keuangan (bank) lainnya yang tidak menganut sistem bunga.

4. Menjaga kemaslahatan dan kepercayaan masyarakat dengan cara:

* Memberikan jaminan
* Peka terhadap masalah-masalah ekonomi yang timbul di masyarakat
* Peka terhadap lingkungan

C. Jenis-jenis Pembiayaan Utama

Ada beberapa pembiayaan utama pada bank Syariah, yaitu:

1. Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Hasil usaha bersih bibagi antara bank sebagai penyandang dana (*Shahib al-Mal*) dengan pengelola usaha (*Mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan prosentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan *musyarakah* bank boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.
2. Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*Shahib al-Mal*) dengan pengelola usaha (*Mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan bagi *Mudharib* lebih besar dari pada *shahib al-Mal*. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank. Pada pembiayaan mudharabah bank tidak boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai.
3. Pembiayaan *Murabahah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh marjin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Model pengembalian talangan dana seluruhnya pada waktu jatuh tempo biasanya diberikan kepada objek pembiayaan yang tidak segera menghasilkan, misalnya untuk kebutuhan traktor petani tidak mungkin dibayar kembali sebelum tanamannya menghasilkan.
4. Pembiayaan *Bai’ Bitsaman Ajil*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli sesuatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara menyicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh marjin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Model pengembalian talangan dana secara menyicil biasanya diberikan kepada objek pembiayaan yang dapat segera menghasilkan seperti misalnya untuk kebutuhan kendaraan angkutan umum yang segera dapat meghasilkan setelah kendaraan diterima.
5. Pembiayaan *Salam*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa yang sudah wujud tetapi masih harus menunggu waktu penyerahannya, dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara menyicil atau dibayar sekaligus sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh marjin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dan nasabah.
6. Pembiayaan *Istishna*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli sesuatu barang/jasa yang belum wujud dan harus dibuat sesuai dengan sfesifikasi yang telah ditetapkan dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut secara menyicil atau dibayar sekaligus sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh marjin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah.
7. Pembiayaan *Ijarah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh marjin keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan sewa dari nasabah.
8. Pembiayaan *al-Rahn*, yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, intan, berlian, dan batu mulia, untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nasabah diwajibkan membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminannya. Bank memperoleh pendapatan berupa sewa tempat penyimpanan barang jaminan.
9. Pembiayaan *Qardh al-Hasan*, Yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan ashnaf *zakat/infaq/shadaqah* dan ingin mulai usaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan (seperti bea materai dan biaya notaris). Nasabah yang berhasil, dianjurkan membayar *zakat/infaq/shadaqah* untuk memperkuat dana *qardh al-Hasan*. Bank memperoleh pengembalian biaya administrasi dan menampung *zakat/infaq/shadaqah* dari nasabah yang berhasil usahanya.

Dari kesembilan jenis pembiayaan utama tersebut di atas, dapat dicatat beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Akses masyarakat kepada jenis pembiayaan *musyarakah* dan mudharabah ini sangat besar, karena tidak ada beban bunga dan jaminan utang yang harus diperhitungkan.
2. Pada jenis pembiayaan *murabahah*, *bai’ bi al-Tsaman al-Ajil, bai’ al-Salam, dan bai’ al-Istishna*, arus barang diperlancar sehingga secara otomatis pasokan uang selalu diimbangi dengan pasokan barang/jasa.
3. Pembiayaan *ijarah* mirip dengan *leasing* atau sewa guna usaha. Di Indonesia, usaha *leasing* memerlukan izin usaha tersendiri terlepas dari usaha perbankan. Namun demikian, *ijarah* adalah usaha yang lazimnya ada pada perbankan dengan sistem bagi hasil sehingga mungkin masih dapat ditampung dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 6. Akses masyarakat kepada pembiayaan *ijarah*pun sangat besar.
4. Pembiayaan *al-Rahn* mirip dengan pinjaman gadai. Pada awalnya di Indonesia pinjaman atas dasar hukum gadai hanya boleh dilakukan perum pegadaian. Namun dengan terbukanya Indonesia dalam kerangka globalisasi, maka kemungkinan *al-Rahn* yang merupakan usaha yang lazim, ada pada perbankan dengan sistem bagi hasil. Pelayanan untuk pembiayaan *al-Rahn* mudah dan cepat sehingga akses ke berbagai lapisan masyarakat sangat luas.
5. Pembiayaan *qardh al-Hasan* memang dirancang untuk kaum dhu’afa penerima *zakat/infaq/shadaqah (ashnaf)* yang ingin memulai usaha kecil-kecilan, sehingga pembiayaan ini dapat membantu program pengentasan kemiskinan.

D. Pelayanan-pelayanan Lain

Selain dari sembilan jenis pembiayaan utama tersebut di atas, perbankan Syariah juga menyeleggarakan pelayanan-pelayanan sebagaimana yang telah dilakukan perbankan konvensional pada umumnya. Jenis-jenis pelayanan yang lazim diseleggarakan oleh perbankan dengan sistim bagi hasil antara lain adalah:

1. *Al-Kafalah*, yaitu pemberian jaminan oleh bank sebagai pihak penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung). Atas pemberian jaminan ini bank memperoleh *fee*.
2. *Al-Hiwalah*, yaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran hutang dari seseorang yang berhutang kepada orang lain. Contoh: Tuan A karena transaksi perdagangan berhutang kepada tuan C. Tuan A mempunyai simpanan di bank, maka atas permintaan tuan A, bank dapat melakukan pemindahbukuan dana pada rekening tuan A ke rekening tuan C. Atas jasa pengalihan utang ini, bank memperoleh *fee*.
3. *Al-Jualah*, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah misalnya untuk memesan tiket pesawat atau barang dengan mempergunakan kartu kredit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank ini bank memperoleh *fee*.
4. *Al-Wakalah*, yaitu jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Untuk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tersebut, nasabah diminta untuk mendepositokan dana secukupnya. Contoh: pembukaan L/C oleh bank atas nama nasabah. Untuk mnerima kuasa mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan ini, bank memperoleh *fee*.



2. Lembaga Asuransi Syariah

Adapun Asuransi Syariah *(Ta’min, Takaful atau Tadhamun)*, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Maksud dari *Akad yang sesuai dengan syariah* adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat.

Dari pengertian di atas, sebenarnya perbedaan utama dari asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (*ta’awuni*) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (*tabaduli*). Dari aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan kepada peraturan perundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah. Dari kedua perbedaan ini muncul perbedaan yang lainnya, mengenai hubungan perusahaan dan nasabah, keuntungan, memperhatikan larangan syariah, dan pengawasan.

Di sisi lain, asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan yang sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa (*risk sharing*). Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur *ribawi*. Legalitas Asuransi Syariah

Adapun prinsip-prinsip yang mendasari legalitas Asuransi Syariah, diantaranya:

a) Perintah Allah Swt. untuk mempersiapkan hari depan.

Firman Allah Swt, *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*." (QS. An-Nisa [04]: 09)

1. Perintah saling tolong menolong

Firman Allah Swt, *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Ulama menanggapi berbeda mengenai status hukum dari kegiatan asuransi konvensional, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Adapun ulama yang membolehkan di antaranya; Syekh Abdur Rahman Isa dan Prof. Dr. Muhammad al-Bahi , guru besar Universitas Al-Azhar, Prof. Dr. Muhammad Yusuf, guru besar universitas Kairo, Syekh Abdul Wahab Khallaf, guru besar hukum Islam Universitas Kairo, Bahjah Hilmi, penasihat pengadilan tinggi Mesir, Syekh Muhammad Dasuki, Dr. Muhammad Najatullah Shiddiqi, dosen Universitas King Abdul Aziz, Syekh Muhammad Ahmad, pakar ekonomi dari Pakistan, Syekh Muhammad al-Madhani, dan Prof. Dr. Musthafa Ahmad al–Zarqa, guru besar Universitas Syiria.

Para ulama di atas umumnya beranggapan bahwa asuransi adalah kreasi praktik baru, yang sebelumnya tidak ditemukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong. Asuransi merupakan bentuk perkongsian (koperasi) yang dibenarkan dalam Islam, selama tidak mempraktikkan riba.

Selain ada yang menghalalkan, umumnya ulama mengharamkan asuransi konvensional. Ulama fikih yang dianggap pertama kali membahas dan mengharamkan asuransi adalah Ibnu ‘Abidin (1784-1836), dari kalangan Hanafiyah, dalam kitabnya Hâsyiyah Ibnu ‘Abidin (*Hâsyiyat Rad al-Muhtâr ‘ala al-Dâr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr*). Menurutnya kegiatan asuransi hukumnya harama karena alasan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, *iltizâm mâ lam yalzam*.

Ulama-ulama lain, seperti Muhammad Yusuf Qaradhawi, Syekh Abu Zahrah, Dr. Muahammad Muslehuddin, Prof. Dr. Wahbahaz-Zuhaili, Dr. Husain Hamid, mengharamkan asuransi karena adanya praktik riba, gharar, dan perjudian. Begitu juga dengan ulama Indonesia seperti Prof. Dr. KH. Ali Yafie, mengharamkannya karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kemudian Perhimpunan Ulama Fikih (*majma’ al-fiqh al-Islâmy*), pada kongresnya pada tanggal 10 Sya’ban tahun 1398 H telah bersepakat mengharamkan asuransi konvensional dengan alasan: Asuransi mengandung gharar, mempraktikkan riba, mengandung permainan lotre, dan mengakibatkan memakan harta orang lain secara tidak sah.

Kehalalan asuransi didasarkan pada pertimbangan praktiknya menjauhkan dari sistem *riba, gharar, jahalah*, dan *qimar*. Asuransi syariah menggunakan sistem persekutuan dan pertolongan (*syirkah wa ta’awuniyah*). Praktik ini dibenarkan menurut agama, bahkan didorong untuk saling menolong dalam takwa dan kebaikan.

Bentuk dan Model Asuransi Syariah

Selama mengikuti perkembangan Takaful baik di Indonesia maupun di dunia, kita mungkin lebih banyak mengenal akad mudharabah sebagai salah satu model paling populer. Akad ini memang lebih dominan dipakai oleh provider Takaful di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Namun demikian, sesungguhnya model pengelolaan dana dalam asuransi syariah tidak hanya menggunakan prinsip mudharabah.



Berikut akan kita coba lihat beberapa model Takaful yang diaplikasikan di beberapa negara dengan karakristiknya masing-masing.

1. Non-Profit Model

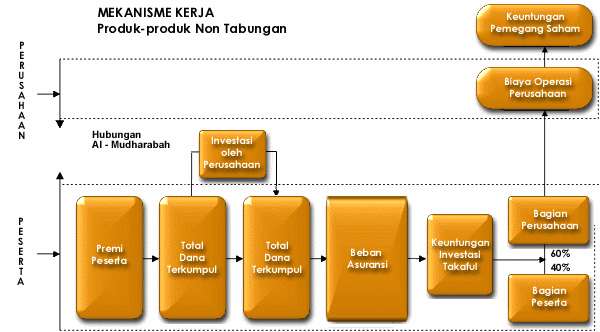
Model ini biasanya dipakai oleh perusahaan sosial milik negara atau organisasi yang dikelola secara non profit (nirlaba), contohnya Al Sheikhan Takaful Company di Sudan dimana mereka menerapkan pembayaran premi dengan 100% berupa tabarru (derma) yang digunakan untuk membantu anggota lain yang mengalami musibah. *Tabarru* sendiri merupakan perkataan Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas. Model inilah yang sesungguhnya paling mendekati konsep dasar asuransi syariah karena selaras dengan kaidah-kaidah berikut : (a) Saling bertanggung jawab. Semua peserta dalam asuransi syariah adalah satu keluarga besar yang mempunyai kewajiban saling bertanggung jawab antara satu dan lainnya. Memikul tanggung jawab dengan niat baik merupakan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, “*Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan lain seperti satu tubuh, apabila ada anggotanya yang sakit, maka akan seluruh tubuh akan ikut merasakannya*.” (HR. Bukhari Muslim). (b) Saling bekerja sama. Para peserta bersepakat untuk bekerjasama dan saling membantu diantara satu sama lain dalam unsur kebaikan (QS. Al-Maidah : 2). (c) Saling melindungi. Sabda Rasulullah SAW yang mengandung maksud ini, “*Sesungguhnya seorang yang beriman ialah siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia*.” (HR. Ibnu Majah). Peserta menyetorkan preminya dengan niat tabarru dan perusahaan asuransi syariah selaku pengelola akan mengelola dana peserta sesuai kaidah-kaidah syariah.

Dengan melihat kepada hakekat asuransi ini kita mendapati kenyataan dan tujuannya adalah saling tolong menolong untuk menghadapi mara bahaya dan musibah yang terkadang menimpa sebagian orang dengan cara menggantinya dari uang yang telah dikumpulkan dari hasil premi mereka dan bukanlah tujuannya untuk mencari keuntungan atau menjadikannya lahan untuk mencari penghasilan.

Menjadi sebuah permasalahan dilematis ketika banyak muncul pertanyaan dari nasabah asuransi syariah tentang keabsahan akad tabarru karena terdapat kontroversi antara definisi “keikhlasan” dalam berderma dengan nilai nominal tabarru yang telah ditetapkan oleh pengelola. Memang, layaknya sebuah hibah atau shadaqah, besar kecilnya tabarru semestinya tidak ditentukan pengelola namun diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Namun dalam asuransi syariah diperkenankan adanya “derma bersyarat” dimana pengelola “terpaksa” menetapkan kadar tabarru setiap peserta sesuai dengan risiko yang dibawanya agar terpenuhi unsur keadilan. Dengan demikian, jika seorang peserta membawa risiko yang besar maka kadar tabarru yang disumbangkan mestilah sepadan dengan risiko tersebut.

1. Al-Mudharabah Model

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Disini terjadi pembagian untung rugi diantara anggota (shahibul maal) dan pihak pengelola/perusahaan asuransi (mudharib). Beberapa provider yang menerapkan akad ini antara lain Syarikat Takaful Malaysia Sdn Bhd (Malaysia), Syarikat Takaful Singapore Pte Ltd (Singapura), Insurans Islam TAIB Sdn Bhd (Brunei Darussalam), dan Syarikat Takaful Indonesia (Indonesia). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 60 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40 persen dari keuntungan.



1. Wakalah

Meski sampai saat ini akad mudharabah masih mendominasi kontrak-kontrak asuransi syariah, namun beberapa ahli ekonomi Islam mulai memberi “catatan khusus” terhadap jenis akad ini. Penolakan akad mudharabah difokuskan pada beberapa hal :

* Definisi profit sharing dalam akad mudharabah adalah "tingkat pengembalian dana hasil investasi" sedangkan dalam prakteknya, yang terjadi bukan “profit sharing” tapi “surplus sharing” dimana yang dibagihasilkan adalah “hasil investasi + modal pokok” yaitu dalam kondisi apabila seluruh dana premi yang terkumpul masih tersisa setelah dikurangi beban asuransi dan biaya operasional.
* Peserta Takaful dalam akad mudharabah sebenarnya hanya bertanggung jawab atau berkontribusi terhadap suatu kerugian sebatas pada dana yang ia setorkan. Hal ini berbeda dengan asuransi dimana nasabah bertanggung jawab terhadap suatu klaim dalam jumlah yang tidak terbatas.
* Kontribusi premi yang diniatkan sebagai tabarru (derma) tidak secara otomatis dapat ditarik kembali oleh peserta dalam bentuk pengembalian premi atau “no claim discount” karena konsep dasar tabarru adalah hibah seharusnya tidak bisa dimanfaatkan kembali oleh si pemberi hibah sendiri.
* Dalam model mudharabah, seluruh peserta bertanggung jawab terhadap musibah yang dialami peserta lain, termasuk untuk membayar beban-beban asuransi lain (biaya reasuransi, medical expenses, legal fee, dll) sedangkan pengelola (operator) hanya bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran yang terkait dengan operasional dan hasil investasi sesuai kapasitasnya dalam akad mudharabah. Dalam kenyataan di beberapa model mudharabah, biaya marketing dan komisi bukan merupakan pengeluaran operator tapi dibebankan kepada Takaful fund.

Berbeda dengan akad mudharabah, yaitu akad wakalah, Takaful berfungsi sebagai wakil peserta dimana dalam menjalankan fungsinya (sebagai wakil), Takaful berhak mendapatkan biaya jasa (fee) dalam mengelola keuangan mereka. Dalam konteks yang ideal, Takaful tidak lagi mendapatkan bagi hasil karena seluruh dana beserta hasil investasinya menjadi hak penuh dari peserta. Namun demikian, pihak pengelola berhak mengenakan biaya manajemen atau biaya operasional. Contoh lembaga yang sudah menerapkan adalah ini adalah Bank Aljazira.

Konsep Pengelolaan Dana (Wakalah)

Participant’s Contribution

Personal

Investment Acc (PIA)

Personal

Investment Acc (PRIA)

Takaful Ikhlas

Ta’awuni

Acc Pool (TAP)

Investment Funds

Profits (if any)

Surplus (if any)

Investment Funds

Profits (if any)

Takaful Ikhlas will charge

A performance fee %

Takaful Ikhlas will charge

A performance fee %

Takaful Ikhlas will charge

A Surplus fee %

balance

balance

Front end charges

Front end charges

Risk ONLY Products

Risk + Investment ONLY Products

Akad dalam asuransi syariah sebenarnya memiliki variasi atau jenis yang beragam. Dan karena praktek asuransi perusahaan (*tijari*) yang berkembang dewasa ini pada dasarnya tidak dikenal di jaman Rasulullah maka menjadi tugas para ekonom muslim, terutama ahli dan praktisi asuransi syariah untuk terus melakukan kajian lebih mendalam guna mencari formula yang ideal dalam menyempurnakan sistem operasional bisnis asuransi syariah.

1. **Konsep Riba dalam Transaksi Syariah**
   1. Sumber Hukum dan Penjelasan tentang Riba

*Riba* (الربا) secara bahasa bermakna: z*iyadah* (زيادة - *tambahan*). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Mengenai hal ini Allah swt mengingatkan dalam firman-Nya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil." (Q.S. An Nisa: 29)

Dalam kaitannya dengan pengertian *al bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al Qur’an*, menjelaskan:

**والربا في اللغة هوالزيادة والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض**

“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

* 1. Identifikasi Transaksi Terlarang

Riba adalah bentuk transaksi yang terlarang seperti transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali ke-sempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi. Namun harus digarisbawahi bahwa antara riba dan invertasi terdapat perbedaan mendasar. Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan mem-bungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap.
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produk-tif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu ter-gantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekadar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

Perbedaan Hutang Uang dan Hutang Barang

Ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya, yakni hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan hutang yang terjadi karena pengadaan barang. Hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.

Hutang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk hutang pengadaan barang, bukan hutang uang.

1. **Konsep Profit Distribusi dan Margin**
   1. Konsep Bagi Hasil

Sistem transaksi syariah yang berbasis bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah. Kedua model transaksi ini adalah *“core bussinis”* perbankan syari’ah saat ini. Meskipun kenyataan di lapangan belum maksimal. Skema pembiayaan bagi hasil sangat terbatas dibanding skema pendapatan tetap, akad murabahah dan ijarah jauh lebih banyak digunakan oleh perbankan syari’ah dibandingkan dengan skema bagi hasil. Alasannya karena skema ini dari sisi pendapatan perbankan syariah lebih mendekati sistem ”bunga” yang relatif pasti dan ditentukan dimuka, sementara skema bagi hasil dianggap beresiko tinggi dan pendapatan perbankan syariah relatif tidak pasti.

Dalam tekhnis penerapan dalam akuntansi sistem bagi hasil dapat dibagi sebagai berikut:



1. Revenue Sharing

Para praktisi bank syariah di Indonesia memperdebatkan tentang distribusi keuntungan antara bank dan nasabah. Perdebatan ini muncul adalah cara bank dan nasabah membagi pemasukan *(income).* beberapa orang merujuk pada dasar pembagian keuntungan, yakni pemasaukan yang dibagikan secara langsung oelh kedua belah pihak tanpa dikurangi biaya operasional. Sementara yang lainnya menggunakan bagi hasil (sharing revenue) yakni pemasukan yang dibagikan secara langsung oleh kedua belah pihak tanpa dikurangi biaya apapun. Alasan metode ini adalah karena kenbanyakan kasus antara pihak bank dan nasabah sulit menyetujuinya satu sama lain apakah pihak nasabah atau pihak bank yang dikenakan biaya penegluaran. (Hakim, 2010: 17) lebih lanjut mana paling tepat pada pengimplementasian bank syariah bagi untung (profit sharing) atau bagi hasil (revenue sharing), hal akan berdampak signifikan bukan hanya dalam masalah keuntungan tetapi juga karena nilai-nilai syariah *(compliance syariah).*

Dua mazhab yang popular dikenal berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Kalangan ulama Hanafiyyah mendukung penggunaan bagian modal mudharib sebagai biaya, sementara Syafi’iyyah menentang pandangan tersebut. Pada kenyataannnya kedua mazhab mencari tititk temu yang saat ini dikenal keuntungan kotor dan keuntungan bersih. Bagi hasil adalah sesuatu yang lain. Dari sudut pandang akuntansi, posisinya di atas rekening pemasukan bahkan lebih tinggi dari keuntungan kotor. Sekalipun demikian dalam hal ini, pandangan Syafi’iyyah juga lebih memilih makna hasil revenue.

Menarik dicatat alasan Dewan Syariah Nasional memilih bagi hasil (revenue) sebagai metode pemasukan distributive. Sebelum fatwa diterbitkan, ada simulasi empiris yang dilakukan berdasarkan pada data pemasukan yang didistribusikan kepada tabungan pada nasabah dibeberapa bank syariah. Hasilnya ditemukan bahwa jika bagi untung digunakan sebagai pemasukan distributive, maka nilai keuntungan di bank syariah jauh lebih rendah dari nilai bunga yang diberikan bank konvensional pada tabungan. Dengan kata lain, bank-bank syariah masih kurang kompetitif dalam hal keuntungan. Karena itu bank-bank syariah mengusulkan bagi hasil menjadi metode distributive. Metode dipilih dengan syarat jika nanti dimasa depan bank syariah sudah lebih kompetitif, maka tidak ada lagi alas an untuk tidak menggunakan metode bagi untung.(Hakim, 2010: 188-189)

1. Groos Profit Sharing

Dalam hal ini yang dijadikan dasar perhitungan dalam skema *gross profit sharing* adalah laba kotor, yakni penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi. Dengan skema tersebut, pihak-pihak yang berkontrak tidak menghadapi ketidakpastian di sisi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi. Oleh karena itu resiko pada skema *gross profit sharing* tersebut lebih rendah dibandingkan pada skema *profit sharing.*  Namun tentunya potensi bagi pemilik dana untuk menikmati surplus juga lebih rendah karena tidak dapat turut menikmati hasil dari efisiensi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi, atau pun turunnya kedua jenis biaya usaha tersebut pada saat kegiatan usaha turun.(Tarsidin, 2010: 22)

1. Profit Sharing

Dalam hal ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah profit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Profit merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi. Penggunaan istilah *profit sharing* dalam hal ini merujuk pula pada istilah *profit and loss sharing,* mengingat besaran profit yang bisa bertanda positif (untung) atau negatif (rugi). Ketidakpastian (hasil dan resiko) pada penggunaan skema *profit sharing* dapat dibedakan dalam tiga area kategori, yakni: (Tarsidin, 2010: 21-22)

1. Penjualan/Pendapatan Usaha

Dalam hal ini terdapat ketidakpastian naik turunnya penjualan/pendapatan usaha, baik dalam volume maupun harganya. Hal tersebut dapat diprediksi dari data penjualan/pendapatan usaha periode sebelumnya dan analisis atas kondisi perekonomian dan industri saat ini.

1. Harga Pokok Penjualan/biaya produksi

Ketidakpastian berupa naik turunnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya *overhead,* baik yang terjadi karena naik turunnya harga maupun tingkat efisiensi dan produktivitasnya. Hal tersebut dapat diprediksi melalui analisis atas pergerakan harga dari beberapa komponen utama biaya produksi dan pengukuran tingkat efisiensi dan produktivitas enterpreneur.

1. Biaya Penjualan dan biaya umum dan Administrasi

Ketidakpastian berupa naik turunnya biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi juga dapat disebabkan oleh faktor harga dan tingkat efisiensinya.

Dengan demikian pada skema *profit sharing* terdapat tiga kategori dimana resiko kemungkinan timbul, dalam hal tersebutlah yang seringkali mendasari pemikiran bahwa skema *net profit sharing* tersebut berisiko tinggi bagi pemilik dana. Namun disisi lain, pada ketiga area kategori tersebut terdapat pula kemungkinan pemilik dana bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Misalnya, ketika volume dan harga penjualan/pendapatan usaha naik dan harga bahan baku turun, meningkatnya efisiensi dan produktivitas dalam menghasilkan produk dan turunnya biaya-biaya usaha. Dalam hal ini penurunan biaya-biaya usaha tidak hanya dapat diartikan sebagai turun dari sisi nominalnya, tetapi juga bisa berupa turunnya turun dari sisi rasionya terhadap penjualan/pendapatan usaha. Dengan demikian bisa saja dari sisi nominalnya tidak turun tapi dari sisi rasionya turun; hal tersebut menunjukkan semakin tingginya tingkat efisiensi enterpreneur. Penurunan biaya-biaya usaha biasanya juga menyertai penurunan penjualan/pendapat usaha sebagai implikasi dari turunnya kegiatan usaha.(Ibid)

Skema *profit sharing (profit and loss sharing)* merupakan skema bagi hasil yang seharusnya digunakan pada perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya, seperti pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Pada pembiayaan mudharabah paling tidak skema *gross profit sharing*.(Nienhaus, 1988; 133) Namun saat ini skema *profit sharing* tersebut tidak banyak digunakan karena sebagian bank syariah beranggapan bahwa resikomya tinggi. Disamping itu juga bank syariah masih sulit mengaplikasikan skema *profit sharing* karena kenyataannya tidak membangkitkan antusiasme yang besar pada para depositor yang takut kehilangan tabungan mereka.(Warde, 2009: 162) Dimana Bank Syariah di Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan skema *revenue sharing.*

* 1. Profit Sharing Versus Suku Bunga

Ekonomi Syariah menggunakan sistem bagi hasil sebagai tolok ukur *return* dalam perekonomian.

Pembagian nisbah yang ditetapkan diawal transaksi bersifat *fixed* tetapi nilai nominal rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti.

|  |  |
| --- | --- |
| Sistem Bunga | Sistem Bagi hasil |
| Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung | Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi |
| Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh |
| Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi | tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. |
| Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming” | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. |
| Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil |

* 1. Perhitungan Profit Distribusi dan Margin
  2. Teori Pricing

Penentuan harga dalam pembiayaan di bank syari’ah dapat menggunakan salah satu di antara lima model yaitu (1)*Mark-up Pricing* 🡪 *Biaya produksi,* (2) *Target-Return Pricing* 🡪 *ROI (Return on Investment),* (3) *Perceived-Value Pricing* 🡪 *persepsi nasabah,* (4) *Value Pricing,*dan (5) *Going Rate Pricing* 🡪 *tingkat bunga yang berlaku.*

Namun yang lazim digunakan oleh bank syari’ah saat ini adalah dengan menggunakan metode *going rate pricing,* yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (*benchmark*). Mengapa diterapkan? Karena bank syari’ah berkompetisi dengan bank konvensional. Di samping itu bank syari’ah juga berkeinginan untuk mendapatkan *customer* yang bersifat *floating customer.*

Mark-up pricing hanya tepat jika digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari Restricted Investment Account (RIA) atau *Mudharabah Muqayyadah.*

*Penerapan Target-Return Pricing dalam Pembiayaan Syari’ah*

* Bank syari’ah beroperasi dengan tidak menggunakan bunga, di dalamnya juga diklasifikasikan akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti, disebut *natural certainty contract,* dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti, disebut *natural uncertainty contract*.
* Jika pembiayaan dilakukan dengan akad *natural certainty contract,* maka metode yang digunakan adalah *required profit rate (rpr)* 
  + *rpr = n. v (n = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai; v = jumlah transaksi dalam satu periode*
* Jika pembiayaan dilakukan dengan akad *natural uncertainty contract,* maka metode yang digunakan adalah *expected profit rate (epr)*
  + *epr* diperoleh berdasarkan: (1) tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis; (2) pertumbuhan ekonomi; (3) dihitung dari nilai *rpr* yang berlaku di bank yang bersangkutan;
  + Perhitungannya:
    - *Nisbah bank = epr/actual return bisnis yang dibiayai \* 100%*
    - *Aktual return bank = nsibah bank + aktual return bisnis*

Sementara Penentuan Harga (Margin) dalam PSAK

Ketentuan tentang penentuan harga jual murabahah diatur dalam PSAK 102 sebagai berikut:

* 1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
  2. Jika aset yang telah dibeli penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan ke pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
  3. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga ( harga dalam akad ) yang digunakan.
  4. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapat diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
  5. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau aset lainnya.
  6. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka penjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakti. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian rill yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
  7. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta’zir yaitu membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
  8. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah.
  9. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi.

Penentuan Harga Jual Konvensional

Metode penentuan margin terdiri dari:

1. Mark-up Pricing

2. Target-Return Pricing

3. Perceived-Value Pricing

4. Value Pricing

Adapun penjelasan dari metode penentuan margin diatas sebagai berikut:

1. Mark-up Pricing

Mark-up pricing adalah penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya

produksi komoditas yang bersangkutan.

2. Target-Return Pricing

Target-Return Pricing adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan

tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan return on investment (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.

3. Received-Value Pricing

Received-Value Pricing adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan

variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan

kepuasan pembeli.

4. Value Pricing

Value Pricing adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan *ono rego ono rupo*, artinya: barang yang baik pasti harganya mahal.

Penetapan Harga Jual Murabahah

Perhitungan harga jual murabahah yang banyak digunakan oleh para praktisi bank syari’ah adalah

Harga jual= Harga Beli + (harga beli x % x waktu)

Ilustrasi dari dari rumus di atas adalah sebagai berikut:

Jika tuan Amir mengajukan pembiayaan pembelian mobil dengan aqad murabahah. Data yang diinformasikan adalah sebagai berikut:

Harga beli mobil di dealer = Rp. 150.000.000

Margin keuntungan = Rp. 10 %

Masa pembiayaan = Rp. 1 tahun

Maka harga jual mobil dari bank syari’ah kepada tuan Amir adalah

Harga jual bank = Rp. 150.000.000 + (150.000.000 x 10 % x 1)

= Rp. 150.000.000 + (15.000.000 x 1)

= Rp. 165.000.000

Jika tuan Amir mengajukan pembiayaan selama 2 tahun, maka:

Harga jual bank = Rp. 150.000.000 + (150.000.000 x 10 % x 2)

= Rp. 150.000.000 + (15.000.000 x 2)

= Rp. 150.000.000 + 30.000.000

=Rp. 180.000.000

Para Ahli Perbankan Syariah memberikan banyak kritikan terhadap rumus penentuan harga jual di atas. Menurut Karim (2003), dengan menggunakan rumus perhitungan di atas berarti keuntungan akan bertambah seiring dengan waktu yang berjalan. Semakin lama waktu berjalan semakin besar harga jual murabahah yang ditanggung oleh nasabah. Padahal menurut syari’ah keuntungan tidak boleh bertambah hanya karena mengikuti perjalanan waktu.

Di samping itu, juga mempertanyakan dari mana munculnya angka pada persentase (%) yang kosong itu. Apakah angkanya akan diisi sesuai dengan tingkat suku bunga? Jika penetapan margin hanya mengacu pada suku bunga, maka ini adalah cara yang sesat sekaligus menyesatkan, dan hal itu bisa merusak reputasi bank syariah.

Lebih diduga barangkali tingginya margin yang diambil oleh pihak bank syari’ah adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi. Sehingga kalau terjadi kenaikan suku bunga yang besar, maka bank syari’ah tidak mengalami kerugian secara riil, namun demikian apabila suku bunga di pasar stabil atau bahkan turun, maka margin murabahah akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional

Dengan menetapkan margin keuntungan murabahah yang tinggi ini, secara tidak langsung dan bahkan akan dapat menyebabkan inflasi yang lebih besar dari pada yang disebabkan oleh suku bunga. Oleh karena itu, perlu dicari format atau formulasi yang tepat, agar penjualan dengan murabahah tidak mengacu pada sikap mengantisipasi kenaikan suku bunga selama masa pembayaran cicilan. Karena mengkaitkan margin keuntungan murabahah dengan bunga perbankan konvensional, baik di atasnya maupun di bawahnya, tetaplah bukan cara yang baik.

Demikian beberapa kritikan yang dilontarkan terhadap teknis penentuan harga jual yang banyak digunakan oleh bank syariah saat ini. Karena itu ia mengusulkan sebuah rumus penentuan harga jual murabahah yang lebih syariah, yang tidak dikaitkan dengan suku bunga, dan kenaikan harga tidak pula dikaitkan dengan penambahan waktu pembayaran.

Rumusnya harga jual bank adalah:

Harga Jual Bank = Harga beli + (tahun x Cost Recovery) + % Keuntungan

Adapun Rumus perhitungan Cost Recovery adalah :

Proyeksi Biaya Operasi

Cost Recovery = ——————————— x estimasi biaya operasional 1 th

Target Volume Pembiayaan

Sedangkan rumus perhitungan margin dalam persentase adalah:

Cost Recovery + keuntungan

Margin Dalam Presentase = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100%

Harga beli Bank/ BMT

Dengan menggunakan rumus ini, maka kasus yang dialami Tuan Amir dapat dihitung sebagai berikut.

Data Pembiayaan

Estimasi total pembiayaan = 5 milyar

Requiredprofit rate = 10 %

Estimasi biaya operasional 1 th = 200.000.000

Masa pembiayaan = 2 tahun

Harga pokok mobil = 150.000.000

Uang muka = 30.000.000

Kekurangan bank = 120.000.000

Cost Recovery = 120 jt/5 mil x 200 jt = 4.800.000

Profit margin = 10 % x 120.000.000 = 12.000.000

Harga jual = 120.000.000 + (1 x 4.8000.000) + 12 jt

= 136.800.000

Jika menggunakan jangka waktu 2 tahun, maka

Harga jual = 120.000.000 + (2 x 4.8000.000) + 12 jt

= 141.600.000

Dari perhitungan ini terlihat jelas bahwa waktu berpengaruh pada cost recovery bukan pada margin. Sebab semakin lama waktu pembayaran, maka akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh bank syariah

Untuk mencari persentase margin, dapat menggunakan rumus:

Cost recovery + keuntungan

% margin = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100 %

Harga beli barang di dealer

4.800.000 + 12.000.000

% margin = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100 %

150.000.000

= 11,2 %

Margin /bulan = 11,2 %/12

= 0,933

Setelah angka-angka ini didapat, barulah persentase margin ini dibandingkan dengan suku bunga. Jadi suku bunga hanya dijadikan *benchmark*. Agar pembiayaan murabahah kompetitif, margin murabahah harus lebih kecil dari bunga pinjaman. Jika masih lebih besar, maka yang harus dimainkan adalah dengan memperkecil cost recovery dan keuntungan yang diharapkan.

* 1. Contoh Kasus Perhitungan Bagi Hasil

Misalnya Bank Syariah menggulirkan dengan menyalurkan pembiayaan pada nasabah usaha produktif dalam hal ini pengrajin genteng, pola ini dikembangkan oleh Bank Syariah dengan memberikan pembiayaan langsung kepada nasabahnya. Hal ini dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, terhadap kelompok masyarakat miskin yang memiliki semangat untuk melakukan usaha mikro yang bergerak di bidang usaha produksi genteng yang berbahan baku tanah liat. Pada pelaksanaannya di lapangan nasabah lebih merupakan lembaga yang sebenarnya lebih identik dengan kegiatan pemberian modal kerja dengan akad mudharabah muqayyadah.

Menentukan Komponen Biaya Operasional & Harga Jual Produksi Genteng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harga Jual dan Total Revenue | | | |
| 1. Operasional Cost | | Symbol/rumus | Jumlah Rp |
|  | Biaya tenaga kerja (btk) |  | Rp. 150 |
|  | Biaya bahan baku (bbb) |  | Rp. 100,- |
|  | Biaya over head (bop) |  | Rp. 150 |
|  | Biaya Bahan Bakar Mesin (BBBM) |  | Rp. 15,- |
|  | Kapasitas Produksi | 28000 biji/ per bulan |  |
|  | Biaya tetap per unit produk | fc = 10.000.000 : 28000 | Rp. 357,- |
|  | Biaya variabel produksinya | vc = bbb + btk + bop + BBBM  vc = 100+150+150+15 | Rp. 415,- |
| . | Biaya total produksi per unit | C = vc + fc  c = 415 + 357 | Rp. 772,- |
| 2. Keuntungan Bisnis yang Diharapkan | | M | 0.5 atau (50%) |
| 3 Harga Jual Produksi | | | |
|  | Harga jual per unit | P = vc + fc + m (vc + fc)  P = 415+357+ 0.5 (415+357)  P = 772+386 | Rp. 1158 dibulatkan Rp.1200,- |
| 4 Total Revenue (TR) | | | |
|  | Pendapatan total | TR = harga jual genteng per lembar X total produksinya  TR = 1200 x 28000 | Rp. 33.600.000,- |

Menentukan Nisbah Bagi Hasil

Skema Revenue Sharing

YRSS = 13%

Maka besarnya nisbah bagi hasil bagi penerimai pembiayaan (Nasabah) adalah:

XRSS = 100% - 13 % = 87%

Skema Groos Profit

YGPS = 21 %

Maka besarnya nisbah bagi hasil bagi pemberi pembiayaan (Bank Syariah) adalah:

XGPS = 100% - 21 % = 79%

Sehingga nisbahnya, Bank Syarikah 21% : Nasabah Ban Syariah 79%

Skema Net Profit

YNPS = 41 %

Maka besarnya nisbah bagi hasil bagi pemberi pembiayaan (Bank Syariah) adalah:

XNPS = 100% - 41 % = 59%

Sehingga nisbahnya, Bank Syariah 41% sementara Nasabah 59%

Hasil Perhitungan Tiga Skema Bagi Hasil Bank Syariah dan Pengusaha Genteng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skema Bagi Hasil/Resiko | Proporsi Nisbah (%) | | Nilai Bagi Hasil Nasabah (Rp) | |
| Bank | Nasabah | Bank | Nasabah |
| Revenue Sharing | 87 % | 13% | 29.232.000 | 4.368.000 |
| Groos Profit | 79% | 21% | 26.544.000 | 7.056.000 |
| Net Profit | 59% | 41% | 19.824.000 | 13.776.000 |

1. **Insrumen Zakat dalam Keuangan Syariah**
2. Konsep zakat dalam Ekonomi Syariah

Salah satu pembahasan penting dalam fiqh zakat, adalah menentukan sumber-sumber kekayaan (*Al-Amwal az-zakawiyyah*) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit menyebutkan 7 (tujuh) jenis kekayaan yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan. Sementara itu menurut Ibnul Qoyim al Jauzi bahwa zakat harta terbagi dalam empat kelompok besar; *pertama* kelompok tanaman dan buah-buahan, *kedua* kelompok hewan ternak, *ketiga* kelompok emas dan perak, dan *keempat* kelompok harta perdagangan. Sedangkan *rikaz* (harta temuan) sifatnya hanya insidentil atau sewaktu-waktu. Disamping hal-hal tersebut sifatnya rinci, Al-Qur'an menjelaskan pula yang wajib dikeluarkan zakat atau infaqnya, dengan kata-kata *amwaal* (segala macam harta benda, QS 9:103) dan *kasabu* (segala macam usaha yang halal, QS. 2:267).

Dengan demikian, maka segala macam harta, usaha, penghasilan dan pendapatan dari profesi apapun yang halal apabila telah memenuhi persyaratan berzakat, maka harus dikeluarkan zakatnya."

Salah satu persyaratan penting mengeluarkan zakat adalah *nishab* (harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara', sedangkan harta yang tidak sampai pada nishabnya terbebas dari zakat). Nishab zakat penghasilan dan pendapatan pada umumnya dianalogikan pada nishab harta perdagangan yaitu sebesar 85 gram emas per tahun dengan zakatnya 2,5%. Bagi yang berpenghasilan tetap, zakatnya bisa dikeluarkan setiap bulan atau bisa pula setiap tahun, tergantung pada cara termudah untuk melakukannya. Adapun jika penghasilan tidak menentu waktunya, misalnya jasa konsultan proyek ataupun penghasilan lainnya, maka pengeluaran zakatnya pada saat menerimanya.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kebutuhan pokok yang boleh dipotong terlebih dahulu (bukan keharusan) sebelum dikeluarkan zakatnya. Sebagian menyatakan terbatas hanya pada kebutuhan sandang, pangan dan papan, sebagian lagi menyatakan ditambah segala macam kebutuhan yang berkaitan dengan tugas (pekerjaan) seperti transportasi dan sebagainya. Sebenarnya jika melihat sejarah, yang lebih obyektif untuk menentukan nilai dan jumlah zakat yang dikeluarkan adalah amil (pengelola) zakat.

**Syarat–syarat harta yang wajib dizakati adalah:**

1. Milik penuh, yaitu kekayaan yang berada di bawah kekuasaan pemilik dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.
2. Berkembang, yaitu kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang produktif dan memberikan keuntungan atau pendapatan.
3. Cukup satu nisab, yaitu jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu.
4. Lebih dari kebutuhan biasa (kebutuhan rutin). Yang dimaksud dengan kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan alat-alat kerja.
5. Bebas dari utang (pemilikan sempurna). Bila mempunyai utang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah satu nisab, maka pemilik tidak wajib mengeluarkan zakat.
6. Berlaku satu tahun (haul). Persyaratan satu tahun hanya untuk ternak, uang, dan harta perdagangan. Zakat dari jenis harta seperti ini disebut dengan istilah zakat modal. Sedangkan hasil pertanian (seperti buah-buahan dan madu), logam mulia, harta temuan, dan lain-lainnya yang sejenis, disebut dengan istilah zakat pendapatan.
7. Macam-macam Zakat :

Zakat mal (harta), yaitu salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah swt dan sekaligus merupakan amal sosial kemanusiaan. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.

Zakat fitrah (zakat badan), yaitu zakat yang diwajihkan pada akhir puasa Ramadhan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik orang merdeka maupun hamba sahaya.

1. Penerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) disebutkan secara jelas dalam AI-Qur'an surah *at-Taubah* ayat 60, yang artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*". Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut juga asnaf. Dalam ayat tersebut, penerima zakat terdiri dari delapan golongan/kelompok (*ashnaf tsamaniyah*). Perumusan dan pengaturan pembagiannya lebih lanjut diserahkan kepada ijtihad manusia, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan kemashlahatan masyarakat.

1. Amil Zakat

Orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan zakat, seperti pengumpul zakat, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung, dan pembagi harta zakat. Adapun Syarat-syarat amil zakat antara lain adalah :

* Muslim
* Mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
* Jujur ( dapat dipercaya).
* Dapat memahami hukum-hukum zakat.
* Sanggup memikul tugas sebagai amil.
* Menurut sebagian ulama amil zakat harus laki-laki.
* Sebagian ulama juga mengharuskan amil zakat itu orang merdeka, bukan hamba sahaya.

1. Distribusi dan zakat produktif dalam Kajian Fiqh Islam

Zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Karena sistem perekonomian Islam berdasarkan pada pengakuan bahwa Allah swt adalah pemilik asal, maka hanya Dia yang berhak mengatur masalah kepemilikan. Hak-hak, kewajiban dan penyaluran serta pendistribusian harta zakat merupakan pencerminan dari semua itu. Karena hal tersebut merupakan salah satu hak terpenting yang dijadikan Allah di dalam kepemilikan.

Disamping itu, dalam harta yang kita miliki, masih ada hak-hak lain diluar zakat. Dalam sebuah hadits dikatakan : "Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat". Tetapi zakat merupakan hak terpenting di dalam harta. Karena ia merupakan penyerahan total kepada Allah dalam persoalan harta. Sabda Nabi Muhammad saw: "Zakat adalah bukti penyerahan".

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa harta zakat itu tidak harus dibagi delapan bagian, bahkan penguasa atau imam dapat menyerahkan harta zakat itu untuk satu atau dua golongan saja meskipun golongan lain masih ada. Berbeda dengan pendapat ketiga imam tersebut, Imam Syafi'i berpendirian bahwa dana zakat harus diserahkan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an memang menyebutkannya secara terperinci terkecuali jika golongan itu memang tidak ada pada waktu zakat dibagikan.

Ada pula satu golongan yang mengatakan bahwa bila dana zakat itu banyak dan dapat dibagi secara merata untuk semua golongan yang ada, maka harus didistribusikan untuk semua golongan. Namun bila jumlah zakat itu sedikit, sehingga kurang bisa dimanfaatkan jika dibagi-bagikan, maka pembagiannya diserahkan pada kebijaksanaan imam atau penguasa. Mereka boleh memberikannya hanya kepada satu golongan saja.

Mengenai urutan prioritas golongan yang berhak menerima zakat juga tidak disebutkan dengan tegas, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits. Akan tetapi kebanyakan ulama memahami bahwa urutannya adalah sebagaimana yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60, walaupun kata penghubung yang terdapat dalam ayat itu bukan untuk "tertib". Para ulama memahami bahwa urutan dalam al-Qur'an menunjukkan urutan prioritas. Hal ini dapat dimengerti karena yang disebutkan dalam ayat itu lebih dahulu memang golongan yang sangat memerlukan dibandingkan dengan golongan yang disebut kemudian. Namun tidak berarti urutan yang lebih dahulu menutupi urutan yang datang kemudian, baik menutupi secara penuh maupun hanya sebagian, seperti sistem hijab (penghalang) yang berlaku dalam hal waris.

Dalam pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin itu tidak hanya kebutuhan makan dan minum saja, tetapi mencakup segala macam kebutuhan, seperti tempat tinggal, pakaian, dan pendidikan. Untuk semua itu perlu ada skala prioritas. Memprioritaskan fakir dan miskin seperti ini juga pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mengangkat seorang amil zakat yang kemudian ditempatkan di Afrika. Umar memerintahkan amil zakat itu agar memprioritaskan pembagian zakat untuk para fakir dan miskin. Tetapi setelah semua fakir dan miskin menerima bagian, ternyata harta zakat masih banyak dan petugas itu pun lalu berkirim surat kepada Khalifah untuk meminta petunjuk bagaimana membagikan zakat yang masih ada. Khalifah memberi petunjuk agar harta zakat yang tersisa itu diberikan kepada kaum *al-garimm*. Kemudian apabila sisanya masih ada, supaya diberikan kepada hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.

Di samping ada hadits yang mengisyaratkan agar membagi harta zakat itu secepat mungkin, ada pula hadits yang memberi petunjuk untuk mengeluarkan zakat dari jenis yang sama dengan barang yang harus dizakati itu, sebagaimana terdapat dalam riwayat dari Mu'az bin Jabal yang mengatakan bahwa sewaktu Nabi saw mengutusnya ke Yaman sebagai penguasa atau wali, Nabi saw berkata: "Pungutlah (zakat) biji-bijian dari biji-bijian, kambing dari kambing, unta dari unta, dan sapi dari sapi" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Hadis ini mengisyaratkan bahwa zakat tidak dapat diganti dengan barang lain, walaupun sesuai dengan harga barang itu sendiri. Oleh sebagian besar ulama hadis ini dijadikan alasan bahwa zakat harus diberikan apa adanya untuk digunakan secara konsumtif. Sedangkan ulama lain, termasuk Imam Abu Hanifah, memperbolehkan mengganti zakat dengan harganya (uang tunai).

Pemberian zakat kepada para mustahiq dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendayagunaannya adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Namun apabila berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan harta zakat itu sampai batas diperkirakan mereka tidak akan terlantar lagi di hari depannya, maka pemberian zakat secara konsumtif kurang menjamin masa depan para mustahiq. Karena bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai keterampilan dan kemauan bekerja, harta zakat itu akan cepat habis. Padahal harta atau dana zakat tersebut diperlukan untuk membuka lapangan kerja baru yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang diberikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Apabila fakir dan miskin itu tidak mempunyai keterampilan apa pun, mereka diberi zakat yang dapat mencukupi biaya hidup selama satu tahun atau selama hidupnya.

Oleh karena itu, untuk mengelola dan mendayagunakan dana zakat yang terkumpul dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijaksanaan amil zakat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60.

Bertitik tolak dari nash al-qur'an tersebut, Bazis DKI Jakarta misalnya membuat ketentuan umum yang merupakan kebijaksanaan pendayagunaan zakat ke dalam 4 sektor, yaitu :

1. Sektor fakir-miskin 35% (dua puluh lima persen untuk dana produktif dan sepuluh persen untuk dana konsumtif)

2. Sektor Amil 10 %, yang pelaksanaannya dialihkan kesektor fakir miskin dan sektor fisabilillah karena amil sebagai pegawai negeri mendapat gaji dan subsidi dari APBD.

3. Sektor muallaf, gharim, ibnusabil 10%.

4. Sektor sabilillah 45%, dua puluh lima persen untuk bantuan fisik, lima belas persen pembinaan dakwah, dan lima persen untuk bantuan sosial.

7. Zakat produktif dalam Perekonomian

a. Bentuk distribusi zakat produktif terhadap mustahiq

Pada prinsipnya zakat harus diterima secara langsung oleh mustahiq. Namun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari mereka, termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya. Sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi mustahiq zakat, tapi diharapkan menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah atau pengelola zakat. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Jadi, bentuk pendistribusian zakat diarahkan bukan semata-mata untuk keperluan sesaat yang sifatnya konsumtif. Seyogianya mustahiq tidak diberi zakat lantas dibiarkan tanpa ada pembinaan yang mengarah pada peningkatan tersebut. Para ulama seperti Imam Syafi'i, An-Nawawi dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahiq zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya kepadanya diberikan modal usaha yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Demikian juga jika mustahiq memiliki keterampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai untuk bekerja. Jika mustahiq tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin Ar-Ramli kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu, sehingga mustahiq tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.Monzer kahf Menyatakan bahwa distribusi dana zakat kepada empat katagori (fakir, miskin, musafir, orang yang dalam hutang) dari delapan asnaf dapat diberdayakan dalam hubungan sebagai jaminan sosial-ekonomik.Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ( QS 5:2 )
2. Meningkatan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan rakyat (QS 9:7 )
3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata QS 9:34
4. Melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah.

Pola distribusi dana zakat yang dikembangkan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) saat ini adalah :

* Distribusi *"konsumtif-traditional"* yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat konsumtif barang makanan untuk kebutuhan sehari-hari.
* Distribusi *"Konsumtif kreatif"* yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lainnya dari barang semula seperti dalam bentuk alat sekolah atau beasiswa.
* Distribusi *"Produktif-tradisonal*" dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, kerbau,dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
* Distribusi *"Produktif-kreatif*" dimana dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau modal usaha kecil.

Pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skim *qardhul al-hasan*, satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return) dari pokok pinjaman.

Itu adalah cara pendistribusian kekayaan sehingga terbentuk akumulasi modal yang kuat untuk kaum dhuafa. Apabila zakat ini dikelola dengan profesional, dapat berpotensi menjadi sumber daya yang produktif. Selain itu, konsep *zakat maal* ini akan membawa ekonomi rakyat kecil terbebas dari sumber-sumber modal yang mengandung riba sehingga dengan pengelolaan dan pelembagaan manajemen zakat secara profesional ini diharapkan kecenderungan investasi akan lebih tinggi daripada konsumsi.

1. Effek zakat produktif kepada cost structur mustahiq

Karakteristik dari sistem bunga dalam analisa biaya produksi adalah bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan oleh produsen sifatnya tetap. Dengan demikian, biaya bunga akan menjadi bagian dari fixed cost, dengan kata lain berapapun jumlah output yang diproduksi bunga tetap harus dibayar. Konsekuansi lebih lanjut, keberadaan biaya bunga akan meningkatan total biaya secara keseluruhan.

Dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam penerapan sistem pemberian modal usaha bagi musthiq, hal ini tidak terjadi, naiknya total cost akan mendorong break even point dari titik ***Q*** ke ***Qi***. Secara grafis efek kenaikan biaya bunga dan tanpa bunga dalam analisa biaya produksi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**RP**

*TR*

BEPi

*TCi*

*TC*

BEP

*FCi*

*FC*

*Q Qi*  **Q**

*Keterangan :*

**TR** = Total Revenue

**TC** = Total Cost tanpa biaya bunga

**TCi** = Total Cost dengan biaya bunga

**FC** = Fixed Cost tanpa biaya bunga

**FCi** = Fixed Cost dengan biaya bunga

**BEP** = BEP tanpa bunga

**BEPi**= BEP dengan bunga

Tabel diatas mengilustrisasikan perbedaan dampak dari penggunaan bunga dan sistem bagi hasil pada pola pendistribusian dana zakat untuk modal usaha.

Seorang petani yang menanam padi menghadapi kendala pasar beras sebagai berikut; harga jual beras yang yang diminta pasar adalah Rp 2000 persatu kilo, bila dua Kg, maka penerimaannya dari penjualan beras adalah Rp 4000, dan seterusnya.

Adanya beban bunga yang harus dibayar produsen sama sekali tidak akan mempengaruhi kurva penerimaan. Oleh karena itu, kurva total penerimaan *(TR)* dalam sistem bunga adalah *TRi=TR.* Berbeda dengan sistem bunga, maka sistem bagi hasil (pola distribusi zakat dalam bentuk mudharabah) dimana kurva total cost tidak terpengaruh. Akan tetapi pemberlakuan sistem ini akan berpengaruh terhadap kurva *TR* (total revenue). Misalkan pada saat masa tanam, si petani membutuhkan sejumlah dana dari seorang *shahibul maal* (Amil zakat). Diasumsikan bahwa petani dan shahibul maal membuat kesepakatan nisbah bagi hasil sebesar 70:30 dari penerimaan (70% untuk petani,30% untuk amil zakat) contoh, bila terjual satu kilo, maka bagi hasil yang diterima petani adalah Rp 1400,- sedangkan porsi bagi hasil untuk shahibul maal Rp 600,- bila dua kilo maka Rp 2800, untuk petani dan seterusnya..

Jadi bila dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva TC, yaitu kurva TC akan bergeser pararel ke kiri atas, sedangkan dalam sistem bagi hasil yang berubah adalah kurva TR akan berputar searah jarum jam dengan titik 0 sebagai sumbu putarannya. Semakin besar nisbah bagi hasil yang diberikan kepada pemodal (ekstrimnya limit dari nisbah 0:100), maka kurva TR itu semakin mendekati horizontal sumbu X.

Titik BEP adalah titik impas, yaitu ketika kurva TR berpotongan dengan TC, atau secara matematis titik BEP terjadi ketika : TR=TC. Dengan berputarnya kurva total penerimaan dari TR menjadi TRrs, titik BEP yang tadinya terjadi pada jumlah output Q sekarang menjadi pada jumlah output Qrs.

Adapun grafisnya dapat digambarkan seperti dibawah ini;

**Rp**

*TR*

*TRrs*

BEPrs

*TC*

BEP

*FC*

*Q Qrs*

**Q**

*Keterangan :*

**TR** = Total Revenue tanpa profit sharing

**TRrs** = Total Revenue dengan profit sharing

**TC** = Total Cost

**FC** = Fixed Cost

**BEP** = BEP tanpa profit sharing

**BEPrs** =BEP dengan profit sharing

Dari sisi BEP, kita tidak dapat menjawab pertanyaan apakah pengunaan sistem bunga akan membawa perilaku produsen untuk berproduksi pada tingkat output yang lebih kecil, lebih besar atau sama dengan tingkat output system bagi hasil.

Dikedua sistem ini, kita mendapatkan bahwa Qi > Q dan Qrs >Q. Apakah Qi>Qrs atau Qi<Qrs atau Qi=Qrs ditentukan dari berapa besar bunga dibandingkan dengan berapa besar nisbah bagi hasil. Perbedaannya adalah pada penyebabnya. Bila Qi disebabkan naiknya TC, maka Qrs disebabkan berputarnya TR. Yang pasti adalah bahwa kedua sistem, baik sistem bunga maupun revenue sharing akan menggeser Q menjadi lebih besar. Kenapa bisa demikian. logika sederhananya begini, bila si petani dalam memproduksi padi tanpa menggunakan sumber modal dari pihak lain, maka si petani akan berproduksi dan menjual berasnya pada jumlah yang menyebabkan atau paling sedikit memberikan keuntungan. Contoh keuntungan baru akan didapat apabila jumlah beras yang diproduksi minimal 100 kg, namun apabila si petani tersebut menggunakan sumber dana ( baik dengan sistem bunga maupun bagi hasil), maka tuntutan untuk memenuhi keuntungan minimal adalah lebih besar dari 100 Kg. tuntutan ini sebagai konsekuensi pembayaran bunga dan bagi hasil yang harus dibagi ke pihak lain. Misalkan, dengan adanya konsekuensi pembayaran bunga atau bagi hasil, keuntungan minimal baru akan didapat apabila jumlah beras yang diproduksi minimal 120 kg. dengan demikian karena adanya konsekuensi pembayaran kepada pihak ketiga, maka produsen akan mendorong untuk memproduksi barang pada jumlah yang lebih besar.

Dari segi efesiensi produksi kita telah mengetahui bahwa produksi dengan sistem bagi hasil lebih efesien dalam pengembangan usaha mustahiq. Bentuk lain dalam pendistribusian zakat yaitu dalam bentuk qiradh (pinjaman tanpa return) dan pemberian modal usaha secara tunai. Effek ini tentu lebih besar dari pola bagi hasil. Misalnya seorang petani mampu menghasilkan padi sebanyak 200 kg pada lahan seluas 50 M3, setelah ditambah dengan dana zakat produktif berupa alat-alat pertanian (misalnya mesin pembajak) maka produktivitas hasil pertanian meningkat dari 200 kg menjadi 300 kg pada usaha mustahiq tersebut.

Bentuk pendistribusian dana zakat dalam bentuk ini memang sangat berpengaruh, namun konsekuensinya pada pengelolaan dana zakat tersebut tidak banyak mengubah mustahiq untuk menjadi muzakki dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab dari mustahiq itu sendiri untuk memaksimalkan produktivitasnya dalam penggunaan zakat produktif tersebut. Skim mudharabah dan qiradh merupakan pola pendistribusian dana zakat produktif yang dikembangkan oleh badan amil zakat sekarang ini, menurut penulis sangat efektif dalam memfungsikan pengelolaan dana zakat tersebut untuk menunjang kemerataan kesempatan bantuan modal usaha bagi mustahiq yang tergolong sangat membutuhkan dalam mengembangkan usahanya pada suatu masyarakat yang luas.

8. Perkembangan dan Problematika Zakat Produktif

a. Perkembangan zakat produktif

Zakat sebagai sebuah kewajiban dalam Islam memiliki sifat dasar *trust* yang tinggi dan kokoh, bila dibandingkan dengan mekanisme lain seperti pajak, iuran, dan sebagainya. Semakin tinggi tingkat kesadaran kaum kaya terhadap Islam sebagai agamanya, akan semakin banyak dana zakat yang dikeluarkan.

Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 telah mengamanatkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang pelaksanaannya dilakukan oleh presiden. Untuk itu, berdasar keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2001 telah dibentuk Baznas.

Sesuai dengan tuntutan UU No 38/1999, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, telah memfasilitasi agar Baznas dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan UU, antara lain dengan menyiapkan kantor dan sarananya diantaranya Gedung Sasana Amal Bhakti Departemen Agama. Di samping itu, pemerintah memberikan bantuan keuangan untuk menunjang administrasi Baznas. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (BIPH) telah mengusulkan kepada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan agar biaya operasional Baznas dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka mendinamisasi tugas-tugas Baznas, telah diangkat Direktur Eksekutif dengan beberapa staf sebagai pelaksana tugas sehari-hari. Untuk melengkapi organisasi pengelola zakat, Departemen Agama berupaya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah (Bazda), Sampai saat ini hampir seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki Bazda, kecuali Provinsi Banten yang masih dalam proses pembentukan Bazda.

Selain itu, telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan kebutuhan pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. UPZ yang telah terbentuk sebagai kelengkapan organisasi Baznas adalah UPZ Departemen Dalam Negeri; Departemen Agama; Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Mahkamah Agung; Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata; Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Negara dan BUMN; Departemen Perindustrian dan Perdagangan; Departemen Pertahanan dan Keamanan; Kantor Menteri Kelautan dan Perikanan; serta Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Adapun UPZ luar negeri, yakni Amerika Serikat, Madagaskar, Hongkong, Kuwait, Thailand, Rusia, Belgia, Australia, Brunei Darussalam, Roma (Italia), India, Polandia, Jerman, San Fransisco (AS), Wina (Austria), Oslo (Norwegia), dan Melbourne (Australia).

Bila melihat potensi ummat Indonesia saat ini akan semakin terakomodasi pemberdayaan zakat tersebut, mengingat ummat saat ini telah memiliki saluran khasnya, terlebih lagi bila menghitung prospek "lembaga keuangan syariah" yang semakin menjamur sekarang ini.

Undang-undang zakat adalah suatu produk hukum politik dan hukum yang sangat baik bagi kemashalatan ummat. Undang-undang harus segera membumi, menjiwai kehidupan muslim Indonesia dan mengarahkan media zakat kepada tujuan jangka panjang, karena zakat sebagai suatu fenomena sosial yang populer. Karena itu lembaga zakat sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis.

1. Problematika Zakat Produktif

Terdapat dua dilema klasik yang harus segera dipecahkan dalam upaya mengefektifkan peran zakat ini, yaitu :

***Pertama***: Saat ini banyak lembaga sosial keagamaan yang melaksanakan langsung aktivitas pengumpulan dan pembagian zakat ini. Hal tersebut bukan suatu hal yang salah, persoalannya adalah apakah mekanisme yang demikian sudah cukup efektif dalam memberdayakan ummat yang miskin yang menyebar dipelbagai wilayah.

***Kedua:*** Telah dijembatani pula upaya untuk mengkoordinasikan zakat ini ke dalam suatu badan resmi pemerintah (BAZIS). Sayangnya, sejauh ini belum tampak hasil efektif yang bisa memecahkan persoalan kemiskinan struktural ummat.

Dua catatan kecil dari sisi lemah opsi kedua adalah masih banyaknya penyimpangan dana/modal zakat yang dikelola oleh amil zakat (ketidakamanahan), khusus pada mekanisme penyalurannya ke struktur yang lebih atas dan sebaliknya, ketika didistribusikan ke struktur dibawahnya, dengan kata lain mekanisme distribusi yang belum menyentuh sebagian besar kaum dhu’afa.

Dari dua gambaran di atas, sesungguhnya apa modal yang efektif bagi pelaksanaan penyebaran zakat ini ? Paling tidak terdapat dua hal, yaitu kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*). Hal tersebut sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat masyarakat sehingga fungsi dana zakat benar-benar berefek pada struktural masyarakat terutama kaum dhu'afa.

Cuma persoalan besarnya adalah, menjadikan zakat sebagai sebuah fenomena sosial atau sebuah trend populer di masyarakat merupakan suatu tantangan besar, seperti yang saat ini populer di negara-negara Timur Tengah (Mesir, Kuwait, dsb). Selanjutnya, modal dasar kepercayaan inilah yg harus dipegang kokoh.

Elemen kedua adalah kekuatan jaringan (networking) yang amanah. Persoalan jaringan adalah persoalan manajemen lokal yang efektif. Masing-masing pihak berpikir global untuk secara praktis bertindak lokal, dan dalam kinerja lokalnya mengkoordinasikan diri dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih besar. Peran jaringan pada tingkat lokal akan semakin bersinergis peran dengan kekuatan-kekuatan jaringan muslim lainnya yang ada di wilayah negeri lain.

Kekuatan jaringan didukung strategis oleh kekuatan amanah, dan kekuatan amanah akan semakin nyata manakala spiritualitas *ihsan* diikuti dengan aspek penegakan hukum (*law enforcement*) yang nyata ditingkat legal dan politik, sehingga kebutuhan tegaknya media zakat yang efektif menjadi lebih kokoh dan bermakna.

Meski umat Islam menjadi warga mayoritas di negeri ini, namun mereka kurang dan masih setengah hati merealisasikan ajaran agama yang berdimensi sosial ini. Selama ini, potensi dan pentingnya zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran masih dianggap sebelah mata. Padahal dana zakat dapat menjadi solusi paling *'jitu'* di era multi krisis seperti sekarang ini.

Menurut pakar ekonomi Islam Syafei Antonio, konsep pemerataan berdasarkan *trickle down effect* (kesejahteraan yang menetes ke bawah) di masyarakat kita tidak berhasil dilaksanakan. Seandainya manajemen zakat bisa profesional, barangkali sedikit banyak akan membantu kesuksesan konsep pemerataan tersebut.

Salah satu strategi pembangunan ekonomi yang melibatkan rakyat dalam menciptakan tetesan tersebut adalah zakat maal. Zakat harta (maal) adalah merupakan salah satu bentuk konkret konsep *trickle down effect* yang bersifat langsung menurut Islam. Hal itu memang sudah ditegaskan dalam Al-quran yaitu agar kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, tetapi setiap Muslim diperintahkan oleh Allah untuk membayar zakat.

Tapi, yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan derajat ekonomi kaum dhuafa perlu diciptakan strategi pembangunan ekonomi yang tidak hanya bisa menciptakan tetesan ke bawah bagi rakyat kecil, tetapi diperlukan partisipasi masyarakat. Karena elemen utama pembangunan ekonomi adalah partisipasi masyarakat dalam membawa perubahan struktur perekonomian.

Mengenai masih terjadinya kesenjangan ekonomi yang begitu lebar, hal ini dapat dilihat dari dimensi sosial dan dimensi ekonomi.

Dari dimensi sosial, kemiskinan adalah salah satunya adalah berakar dari cara berpikir dan lingkungan yang statis. Sehingga untuk keinginan untuk mengubah kondisi yang lebih baik relatif tidak ada. Penyebab lain adalah pendidikan yang rendah serta ketiadaan sumber-sumber ekonomi yang cukup (modal dan sumber daya alam).

Sedangkan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu:

* 1. Berkurangnya kekayaan orang miskin dalam proses pembangunan yakni akibat dari berkurangnya tanah pertanian akibat dari pembagian warisan, dijual karena pembangunan pemukiman. Sedangkan harga pergantiannya sangat rendah.
  2. Terlalu sedikitnya hasil produksi yang bisa mereka jual. Hal ini terjadi karena kemampuan untuk berproduksi sangat terbatas dan sangat sulit melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan pada sektor industri kecil, masih lemahnya teknis produksi dan sumber-sumber daya lain, menyebabkan rendahnya produk yang dapat ditawarkan.
  3. Terlalu rendahnya harga jasa yang mereka terima. Karena rendahnya tingkat pendidikan, maka kualitas jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga harga jasa mereka rendah.

Secara kalkulasi materiil, pemberlakuan zakat dalam ekonomi islam akan menguntungkan pihak yang berhasrat konsumsi lebih tinggi, dimana pihak surplus mengorbankan asset 2,5% dari jumlah assetnya untuk konsumsi pihak deficit. Hal ini artinya zakat tidak saja mampu meningkatkan asset pihak deficit tetapi juga segala macam pendapatan, sedang dilain pihak Metwallly menegaskan bahwa hasrat konsumsi seorang penerima dana zakat lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran zakat. Jika demikian, upaya pendayagunaan dana zakat dalam bentuk distribusi produktif tentunya harus memperhitungkan perilaku konsumsi dari pihak deficit agar tujuan dari fungsi zakat sebagai instrument pemerataan pendapatan dan peningkatan hasil produksi mustahiq dapat tercapai.

Dr Yusuf Qordhowi menyatakan bahwa sedikitnya ada beberapa faktor yang mendasari keberhasilan suatu lembaga pengelolaan zakat :

1. Memperluas cakupan harta wajib zakat dengan dalil umum, sebagai strategi dalam *“fundraising”* (penghimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang nampak “Dhohiroh” dan yang tidak nampak “bathinah”

2. Manajemen yang profesional.

3. Distribusi yang baik.

Lembaga amil zakat sangat memilki peran yang menentukan dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Peranan itu diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumberdaya dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

1. **Sistem Moneter Islam**
   1. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi konvensional, Uang dikenal sebagai benda-benda yang disetujui (disepakati) masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdaganga. Adapun dikalangan pemikir Islam sebagian diantara mereka masih bersikeras mendifinisikan uang dengan emas dan perak, sebagian yang lain tidak memaksakan bahan uang dari logam maupun kertas. Perbedaan dikalangan pemikir islam ini pada dasarnya tidaklah mempengaruhi perekonomian, apabila tidak menjadikan perbedaan tersebut dalam penentuan moneter standar. Dr. danan Khalied At-Turkumani dalam bukunya "as-siyasah an-naqdiyah wa almashrafiyah fi-Islam" menyatakan bahwa kesatuan uang dengan standar nilai yang stabil dengan logam mulia akan membebaskan kenkangan hemogoni Negara-negara industri terhadap dunia ketiga. Turkumani dalam mendefinisikan uang tidak mengaitkan pembuatan uang dari logam mulia, akan tetapi harus berstandar pada logam mulia. Nampaknya inilah upaya untuk menemukan perbedaan perbedaan pendapat dikalangan ulama Islam.

* 1. Jenis dan fungsi uang ( 2 )

Pada umumnya para ulama dan ilmuwan sosial Islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja. Deretan ulama ternama seperti Imam Ghazali, Ibnu Taymiyyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, Ar-Raghib al-Ashbahani, Ibnu Khaldun, al-Al-Maqrizi dan Ibnu Abidin dengan jelas menandaskan fungsi pokok uang sebagai alat tukar. Karena itu mata uang haruslah bersifat tetap, nilainya tidak naik dan turun. Dalam setiap sistem perekonomian, fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar (medium of exchange). Dari fungsi utama ini diturunkan fungsi-fungsi lain seperti uang sebagai standard of value, store of value, unit of account dan standard of deferred payment. Mata uang manapun niscaya akan berfungsi seperti ini. Para ekonom membagi uang kepada beberapa bentuk,diantaranya Nuqud Sil'iyyah (mata uang komoditi), mata uang refrentatif (refsentatif money/nuqud naibah), fiduciary money (credit money/nuqud I'timaniyah)

Dalam perkembangan sejarahnya, uang telah mengalami evolusi sebelum akhirnya menjadi alat tukar modern seperti saat ini. Sebelum manusia menemukan logam yang dapat dijadikan sebagai alat tukar, mereka telah menggunakan barang dan bahkan hewan ternak sebagai sebagai alat tukar yang berfungsi sebagai uang dan disebut sebagai uang komoditas. Namun ketika logam dan batu mulia ditemukan, mereka mulai melakukan pertukaran dengan menggunakan logam mulia, terutama emas dan perak. Logam mulia dicetak oleh pihak otoritas menjadi pecahan-pecahan dengan bobot tertentu, sebagai alat tukar yang sah.

**Uang yang digunakan oleh orang Arab adalah Dinar dan Dirham. Menurut Abdul Qadim Zallum (Al-Arnwal fi Daulatit khilafah, Beirut:Darul almi lil malayin, 1983). Mata uang ini diperoleh dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dinegara-negara sekitarnya. Para pedagang kalau pulang dari Syam, mereka membawa dinar emas Romawi (Byzantium), dan dari Irak mereka membawa Dirham perak persia (sassanid). Terkadang juga mereka membawa dirham Himyar dari Yaman Dinar dan Dirham yang digunakan orang Arab saat itu tidak didasarkan pada nilai nominalnya, melainkan menurut beratnya, sebab Dinar dan Dirham tersebut hanya dianggap sebagai kepingan emas dan peraknya saja. Dinar dan Dirham tidak dianggap sebagai mata uang yang dicetak mengingat bentuk dan timbangan Dirham yang tidak sama dan karena kemungkinan terjadinya penyusutan berat akibat peredarannya.**

Untuk mencegah terjadinya penipuan atas perilaku transaksi, maka mereka menggunakan standart timbangan khusus yang telah mereka miliki, yaitu:

1. Auqiyah
2. Nasy
3. Nuwah
4. Mitsqal
5. Dirham
6. Daniq
7. Qirath
8. Habbah

Mitsqal merupakan berat pokok yang sudah diketahui umum, yaitu setara dengan 22 Qirath kurang 1 Habbah.

10 Dirham = 7 mitsqal

1. Permintaan Uang dalam Ekonomi Islam

Permintaan kan *real money* yg seimbang akan tergantung pada pendapatan real dan tingkat harapan return asset keuangan.

Ketergantungan pada *real income* disebabkan seorang memegang uang untuk membuthkan kebutuhan mereka.

L = By

Demand untuk uang juga tergantung pada tingkat harapan return asset keuangan, sehingga mengurangi kebutuhan akan uang Ini bagian dari permintaan uang yg tidak mungkin berfungsi spekulatif. Inilah perspektif islam akan uang

Di samping transaksi sebagai demand uang, ada suatu demand jangka pendek yaitu meminjam kebutuhan dari orang lain, yaitu dengan qardul hasan dan keinginan membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Dalam lingkungan yang islam, hal ini ada ketika meminjamkam suatu jumlah uang yang dibutuhkan orang lain.

Dalam investasi demand akan uang, tergantung pada tingkat return investasi yang diinginkan.

Demand akan uang yang termotivasi oleh sifat menolong merupakan satu fungsi yaitu pendapatan (Y) dan tingkat pengembalian (Q). sehingga Y merupakan hubungan positif dan Q hubungan negatif. Inilah demand akan uang, yang jika demand akan uang cash digabungkan dengan sikap membantu ini akan dapat ditulis persamaan:

A = a2 y - hQ

kombinasi antara keduanya dapat kita tulis:

LA = ky - HQ

Sejauh permintaan uang bersifat spekulatif adalah kekhawatiran, menurut teori, hal itu pada ekonomi didasarkan hal yang sama.

Return yg diharapkan akan sangat mudah berubah dibandingkan dengan tingkat bunga yang tetap. Meskipun demikian spekulasi akan selalu ada pada tingkat return yang diinginkan, tetapi kita terjemahkan ke dalam profits-sharing yang terjadi dalam pasar. Tingginya nisbah profit sharing dengan tingkat investasi yang rendah akan menjadikan spekulasi pada permintaan uang dan begitu sebaliknya. Oleh sebab itu spekulasi dalam Islam dilarang.

Sejak akan ada suatu keperluan untuk memegang uang dalam periode tertentu yang return rendah dan akan meng-ivestasikan dananya pada periode yang tinggi returnnya. masa tersebut tidak bisa dicontrol oleh suatu lembaga. Ada beberapa pengendalian institusional pada permintaan bersifat speculatif untuk uang dalam koridor zakat. Itu akan menguatkan alasan yang rendah hati (dermawan) untuk demand fungsi yang sama.

Karenanya, permintaan real uang akan seimbang dengan peningkatan tingkatan pendapatan nyata dan dikurangi dengan tingkat return bagi hasil yang diinginkan pada asset keuangan. Kita dapat tulis permintaan untuk fungsi sebagai:

LA = KY - hQ -----> k > O ; h >O

L = Demand akan Uang

Q = Tingkat Pengharapan Profit atas asset.

Q = a R

Dimana R adalah variabel exogeunes

LA = KY - haQ

Atau, LA = KY - h'a

dimana, h' = h R

*Money Market Equilibrium*

mengumpamakan suatu uang beredar yg tetap(m) dan suatu tingkatan harga tetap(P) menyiratkan uang riil ditetapkan atas kesiembangan M/p, sehingga kita tulis keseimbangan pasar uang sebagai

Ky – h'a = M\_

P

ini memberi suatu hubungan antara A dan Y, sebagaimana di bawah:

a = I\_\_ ( kY - M\_ )

h' P

ini adalah yang persamaan kurva LM dalam ordo untuk menciri kurva LM yang menghadirkan interest- permintaan bersifat untung-untungan yang didasarkan dalam likuwiditas. Kurva LM didasarkan pada permintaan untuk likwiditas yang yang termotivasi oleh laba- cum- pada pertimbangan rendah hati (dermawan)

*Income determination IS\_LM*

Slope Kurva LM

Kurva Lm pada persamaan :

a = I\_\_ ( kY - M\_ )

h' P

adakah suatu bagian vertical pada kurva LM ?

Jawaban tergantung pada apakah 'h dapat nol. Apakah permintaan untuk uang dapat memberikan perubahan pada a'.( money demand M = Ky – h'a)

a' boleh berhenti untuk mempunyai efek atas permintaan untuk uang tatkala Q (tingkat pengembalian yang diinginkan untuk pemilik asset keuangan) adalah sangat rendah.

Pada tingkatan sangat rendah Q, pemilik asset keuangan tidak boleh menyukai untuk menginvestasikan pada hal positif a' sebagai ketidakinginan akan resiko. Hal positif bermakna juga responbilatas untuk membawa suatu kerugian.

Yang rendah Q, tidak boleh menggoda pemilik asset untuk membawa tanggung jawab kerugian termasuk dalam hal ini Q.

pada sisi lain adalah suatu biaya dalam memegang uang.

Pemilik membayar Z (pajak) pada jumlah tertentu dalam memegang uang.

Dalam hal ini, suatu situasi di mana pemilik uang tidak suka menginvestasikan pada profit/loss sharing dan juga ingin menghindari finalty Z, mereka lebih menyukai untuk meminjamkan uang ke mereka yang memerlukan dana.

Meminjamkan uang dalam kerangka ini, tidak berbagi laba dan dapat dikenakan untuk dikembalikan dalam jumlah penuh pada beberapa masa yang akan datang.

Ini boleh juga dikenal sebagai investasi dengan a=0, tidak rugi dan tidak untung.

Permintaan uang akan menginsentivaskan tingkatan a' sampai Q, menjangkau suatu tingkatan tertentu ( Q) di luar pemilik yang asset keuangan menjadi berubah terhadap tingkat a'. dengan R (yang diharapkan total rasio laba modal) menyiratkan bahwa ada suatu kesesuaian a' juga di bawah h'a yang mana adalah nol. Karenanya itu, adalah mungkin untuk mempunyai suatu bagian vertikal di bawah suatu tertentu a', jika R tidaklah rendah.

Apakah suatu garis mendatar di dalam kurva LM? jawaban tergantung pada apakah mungkin untuk demand uang dan asset keuangan untuk menyempurnakan pengganti dengan yang lain. Dalam kaitan dengan lebih rendah Q, kita tidak membahas bahwa mungkin bahwa semua penambahan ke uang beredar boleh menambah demand uang oleh karena keberadaan suatu cos (z) tentang memegang uang.

Seperti hal tersebut, kurva LM tidak bisa horizontal pada nilai yang lebih rendah Q. mungkin saja atas vertikal suatu tingkatan tertentu ' a' dan setelah itu akan mempunyai suatu slope positif.

Bagaimanapun, ada batasan atas nilai a' seperti itu, tidak bisa sama dengan atau lebih besar suatu unit.

Jika R adalah sangat tinggi, ada kelangkaan modal dan persediaan kelebihan sumber daya manusia berkeinginan mengambil pekerjaan usahawan, 'a boleh naik pada suatu tingkatan sangat tinggi, masih menyisakan cukup p (return yang diharapkan untuk usahawan dari investasi) Untuk mempengaruhi dia untuk tetap bekerja sebagai usahawan.

Sebagai a' mendekati ke kesatuan(=1), kurva LM akan menjadi dekat.

Pada tingkat yang lebih tinggi untuk a' dengan R menjadi tinggi, Q akan juga menjadi yang sangat tinggi, yg akan memungkinkan untuk menuntut lebih uang untuk membayar Z pada saldo uang mereka ke luar dari Q atas pendapatan pada alat-alat pembayaran yg telah diinvestasikan.

Karenanya penambahan penyaluran uang beredar pada langkah ini bisa dipastikan menambah demand money.

Seperti hal itu, kita boleh mengamati dua keadaan terakhir di bawah:

1. ketika Q adalah sangat rendah berkaitan dengan nilai-nilai lebih rendah R, kurva LM mungkin vertikal di bawah suatu tingkatan yang tertentu ' a'.

2. ketika Q adalah tinggi oleh karena lebih tinggi R, kurva LM akan menjadi horizontal seperti a' mendekati ke suatu Unit.

Di tengah dua situasi ekstrim ini, slope kurva LM akan tergantung pada slope fungsi uang yang merupakan pertanyaan empiris.

dalam kerangka ini, adalah sangat penting untuk mengetahui bahwa slope kurva LM akan berbeda pada langkah-langkah pembangunan ekonomi. Di mana vertikal kurva LM akan terjadi pada awal langkah pengembangan. Horizontal kurva bisa terjadi pada tahapan lebih lanjut dari suatu pembangunan ekonomi.

Kebijakan Moneter Islam

Ilmu moneter merupakan bidang kajian ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari sifat serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada umumnya diartikan suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran produksi, harga dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional.

3 alasan mempelajari kebijakan moneter dalam ekonomi islam:

1. Mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme uang , bagi hasil, lembaga keuangan, sistem dan kebijakan moneter, serta mekanisme ekonomi bagi hasil.
2. Menganalisa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijaksanaan moneter terhadap kegiatan ekonomi islam.

Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor ekonomi riil. Kebijakan moneter merupakan instrument penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi baik modern maupun islam. Namun perbedaan yang mendasar terletak pada tujuan dan larangan bungan dalam islam.

Syarat tercapai dan terjamin berfungsinya sistem moneter secara baik adalah Otoritas moneter harus melakukan pengawasan kepada keseluruhan sistem.

Tujuan-tujuan Kebijakan Moneter Islam:

1. Menurut Iqbal dan khan

* *Economic well-being full employment and optimum rate of economic growth*
* *Sosio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*
* *Stability in the value of money*

1. Menurut Umer Chapra

* Kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan *full employment* dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum
* Keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan
* Stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium of exchange dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil
* Penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan

Dari ke 4 tujuan diatas sekilas hampir sama dengan sistem kapitalis. Akan tetapi kalau dikaji lebih dalam, ada perbedaan penekanan dan komitmen yaitu tentang nilai-nilai spritual, keadilan sosio ekonomi dan persaudaraan manusia.

Didalam islam, tujuan yang hendak dicapai tidak dapat dipisahkan dari ideologi dan keyakinan. Tujuan membawa sanksi dan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist.

Alat-alat kebijakan Moneter

1. Target pertumbuhan dalam M dan Mo
2. Peran serta masyarakat dalam permintaan tabungan
3. Penyediaan cadangan yang sesuai dengan ketentuan
4. Alokasi kredit yang berorientasi pada nilai
5. Sertifikat deposito

Sumber Ekspansi Moneter

Fungsi utama sistem moneter adalah melengkapi kebutuhan transaksi masyarakat, khususnya dalam rangka menumbuhkan ekonomi. Dari pendekatan ekonomi islam, ada 3 sumber ekspansi moneter, yaitu:

1. Fiat Money Creation

Alasan Bank sentral membuat uang:

1. Pemerintah meminjam secara langsung uang pada bank ini. Dengan kasus:

* Terjadinya anggaran defisit
* Bank sentral berusaha menstabilkan ekonomi melalui kegiatan psar-terbuka (*open market*)

1. Bank sentral memutuskan melakukan “perluasan” kegiatan pasar-terbuka
2. Credit Money
3. Balance-of-payments surplus

Instrumen Keuangan

Fungsi fundamental yang ke dua dari sistem moneter dan keuangan adalah harus mendorong penanaman sumber dan pengalokasiannya ke investor. Dalam sistem konvensional dilakukan oleh lembaga perantara keuangan yang didasarkan pada tingkat bunga fix, sedangkan dalam ekonomi bebas dilakukan dengan sistem bagi hasil.

Fungsi Uang Dan Bank

Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi modern.

Adapun fungsi uang :

1. Uang sebagai alat tukar
2. Uang sebagai satuan pengukur nilai
3. Uang sebagai alat penimbun/penyimpan kekayaan

Keadaan riil menunjukkan bahwa perkembangan pasar uang dunia saat ini, sebagian besar dipergunakan untuk memperdagangkan uang itu sendiri. Hanya 5% dari transaksi di pasar uang yang berkaitan dengan transaksi barang dan jasa. Bahkan volume transaksi pasar barang dan jasa hanya 1,5% dibandingkan dengan turn over transaksi di pasar uang.

Ekonomi klasik mengatakan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*Direct Utility Junction)*, hanya bila uang itu digunakan untuk membeli barang, maka barang itu akan memberikan kegunaan.

Teori Ekonomi Neo Klasik mengatakan kegunaan uang timbul dari daya beli. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*Indirect Utility Function*)

2 Fungsi fundamental uang pada sistem finansial secara keseluruhan:

1. Memungkinkan terjadinya likuiditas secara mencukupi, sehingga produksi dan tukar menukar dapat terjadi secara wajar
2. Termobilisasinya pendapatan, sumber daya dan pengalokasian investor secara sesuai.

Berkaitan dengan fungsi uang diatas, maka keberadaan lembaga dan pengatur peredaran uang diperlukan. Seperti yang dijelaskan oleh Munawar Iqbal dan M. Fahim khan “A *survey of Issues and A Programme for Research in monetary and Fiscal Economics of Islam”*:

*The modern banking system also creates money which is lent to government, consumenr, business, etc. The basic feature common to both these activities is that money balances are on the basis of being repaid in fixed monetary sum with an agreed interest return*

Teori moneter modern, penimbunan uang berarti menghambat atau memperlambat perputaran uang yang berarti semakin kecil transaksi yang terjadi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Sedangkan peleburan uang berarti mengurangi jumlah penawaran uang yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

1. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah,* Juz 1, (t.p: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.), hal. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah,* Juz I, hal. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz I (t.kp: Maktabah dan Mathba’ah Thaha Putra Semarang, t.t.), hlm. 22. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh,* hal. 8-9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh,* hal. 9. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh,* hal. 9. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz I..., hal. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz I..., hal. 22-23. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 28. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. I, hlm 17. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 29. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. I, hlm 17. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 29. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. I, hlm 17-18. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. I, hlm 19. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 13 [↑](#footnote-ref-16)
17. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 45. [↑](#footnote-ref-17)
18. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 45. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 45. [↑](#footnote-ref-19)
20. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. I, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 45. [↑](#footnote-ref-21)
22. Cek Sunan at-Tirmidzi [↑](#footnote-ref-22)
23. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 46. [↑](#footnote-ref-23)
24. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 46. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 46. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 47. [↑](#footnote-ref-26)
27. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 47. [↑](#footnote-ref-27)
28. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 47-48. [↑](#footnote-ref-28)
29. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 48-49. [↑](#footnote-ref-29)
30. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 49-50. [↑](#footnote-ref-30)
31. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 136. [↑](#footnote-ref-31)
32. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2007), hlm. 218. [↑](#footnote-ref-32)
33. Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib...,* hlm. 146. [↑](#footnote-ref-33)
34. Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), 58. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-‘Arba’ah,* Juz 1, (t.kp.: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.t.), hal., 187. [↑](#footnote-ref-35)
36. Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-‘Arba’ah,* Juz 1, (t.kp.: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.t.), hal., 187. [↑](#footnote-ref-36)
37. Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madhahib al-‘Arba’ah,* Juz 1, (t.kp.: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.t.), hal., 187. [↑](#footnote-ref-37)
38. M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. Tim IKAPI, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, Cetakan Pertama, 1997), 19. [↑](#footnote-ref-38)
39. Diambil dalam M. Umar Chapra, *What is Islamic Economics*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islami Development Bank, 1996), 33. [↑](#footnote-ref-39)
40. M. Nejatullah Shiddiqi, *History of Islamic Economic Thought*, (London: Mansell, 1992), 69. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Wadi’ah* mempunyai dua bentuk, yaitu; (a) *Wadi’ah Yad Al-Amanah*, dimana barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai, dan (b) Wadi’ah Yad Ad-Dhamanah, dimana barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang. dari hasil penggunaan barang atau uang ini si pemilik dapat diberikan kelebihan keuntungan dalam bentuk bonus dimana pemberiannya tidak mengikat dan tidak diperjanjikan. [↑](#footnote-ref-41)
42. Akad *bai’* (jual beli) terdiri dari (a) *Bai’ naqdan*, adalah  jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. Dalam jual beli ini bahwa baik uang maupun barang diserahkan di muka pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi (tunai), (b) *Bai’  muajjal*, adalah jual beli dengan cara cicilan. Pada jenis ini barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode, (c) *Murabahah*, adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, (d) *Salam,*  adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, dan (e) *Istisna*, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli, *Mustashni’*) dan penjual (Pembuat, *shani’*). [↑](#footnote-ref-42)
43. Akad *ijaroh (sewa menyewa).* *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna  atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi 2 yaitu; (a) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, adalah *ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarahnya pada akhir periode, dan (b) *Ju’alah*, adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan kepada kinerja objek yang disewa /diupah. [↑](#footnote-ref-43)
44. Macam–macam musyarakah: (a) *Mufawadhah*, akad kerjasama dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana yang sama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. (b)  ‘*Inan*, akad kerjasama dimana pihak yang bekerjasama memberikan porsi dana yang tidak sama jumlahnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sebesar porsi modal. (c) *Wujuh*, akad kerjasama dimana satu pihak memberikan porsi dana dan pihak lainnya memberikan porsi berupa reputasi. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal, pihak yang memberikan dana akan mengalami kerugian kehilangan dana dan pihak yang memberikan reputasi akan mengalami kerugian secara reputasi. (d) *Abdan*, akad kerjasama dimana pihak-pihak yang bekerjama bersama-sama menggabungkan keahlian yang dimilikinya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. dengan akad ini maka pihak yang bekerjasama akan mengalami kerugian waktu jika mengalami kerugian. Dan (e) *Mudharabah*, akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi. *Mudharabah* terbagi dua; *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

    [↑](#footnote-ref-44)
45. Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi dalam Islam*, Bandung: PPM Fi Zhilal, 1996, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-45)